



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
(STUDI KASUS DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET)**

TESIS

**FUAT ISKANDAR
0906589526**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA, 2012**

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
(STUDI KASUS DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister dalam Ilmu Administrasi**

**FUAT ISKANDAR
0906589526**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA, 2012**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Fuat Iskandar

NPM : 0906589526

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini di ajukan oleh :

Nama : Fuat Iskandar

NPM : 0906589495

Program Studi : Ilmu Administrasi

Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Departemen Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Amy YS Rahayu, M.Si

Pembimbing : Dr. Roy V Salomo, M.Soc, Sc

Penguji Ahli : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Sekretaris : Dra. Lana Miftahul Jannah, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2012

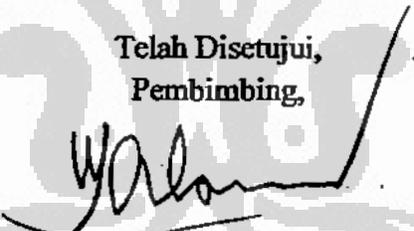
Universitas Indonesia

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Fuat Iskandar
NPM : 0906589526
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret)

Telah Disetujui,
Pembimbing,


(Dr. Roy V Salomo, M.Soc, Sc)

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas segala taufiq dan rahmat-NYA tugas penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan pernah terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan dari lubuk hati yang dalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

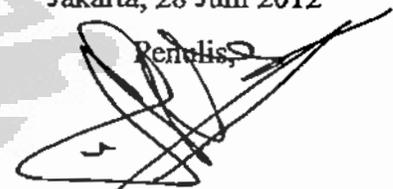
1. Bapak Dr. Roy V Salomo, M.Soc, sebagai dosen pembimbing, di tengah kesibukan yang padat, berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA, Ibu Dr. Amy Ys Rahayu, M.Si, Ibu Lina Miftahul Jannah, M.Si, selaku Tim Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan.
3. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Para pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi
5. Bapak Suhadi, S.Pd, M.T, selaku pimpinan yang telah memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini
6. Bapak Drs. A.G Thamrin, M.Pd, Ibu Dra. Katiah, M.Pd, dan Bapak Dr. Adi Syahputra, M.Si sebagai koordinator program dari Perguruan tinggi yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasinya.
7. Ibunda tercinta Hj. Mukminah, Bsc yang selalu memberikan do'a yang tulus dan memberikan semangat dari jauh kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini.

8. Istriku Ummu Abbas Rita,S.T,M.Si yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dan anak penulis 'Abbas 'Abdillah yang selalu ceria dan pengertian menemani sambil bermain games.
9. Jajaran sekretariat FISIP UI yang dengan sabar selalu melayani dan memberi informasi kepada penulis.
10. Mas Andy Bangkit, Ph.D yang telah berkenan membantu memberikan koreksi dan masukan.
11. Teman-teman seangkatan yang telah memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
12. Teman-teman kantor yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan pemikiran, waktu dan tenaga kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa apa yang tersaji dalam karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pembaca, sehingga tesis ini bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 28 Juni 2012

Penulis,



Fuat Iskandar

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuat Iskandar
NPM : 0906589526
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret)"

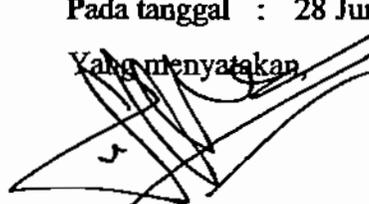
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Fuat Iskandar)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Fuat Iskandar
Program Studi : Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Administrasi
Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan
Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat
Pembinaan SMK (Studi Kasus di Universitas Sebelas
Maret)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dengan mengambil studi kasus di Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Subyek penelitian adalah Pejabat Direktorat Pembinaan SMK, koordinator program di Perguruan Tinggi, Dosen pembimbing lapangan, bendahara program, peserta program, kepala sekolah serta guru pamong. Hasil penelitian pada komponen konteks menunjukkan adanya relevansi dan hubungan yang kuat antara program pendampingan dengan tujuan dari stakeholder yang terlibat yaitu pihak Direktorat Pembinaan SMK, perguruan tinggi pelaksana dan sekolah kejuruan, pada komponen *input* institusi pelaksana merupakan perguruan tinggi yang memiliki program studi yang dibutuhkan di sekolah kejuruan serta mampu menyediakan peserta dengan program studi yang sesuai dengan program keahlian di sekolah kejuruan yang menjadi sasaran, pada komponen proses menunjukkan adanya *living cost* peserta yang kurang mencukupi serta waktu pelaksanaan yang kurang optimal dikarenakan kurang sesuai dengan tahun ajaran sekolah, dan dari komponen *product* menunjukkan bahwa semua peserta telah memberikan manfaat bagi sekolah dalam pelaksanaan program pembelajaran di sekolah baik aspek *teaching* maupun *non-teaching*.

Kata Kunci : Pendampingan SMK, Evaluasi, CIPP

ABSTRACT

Name : Fuat Iskandar
Study Program : Graduate Program Administrative Science Program Specificity of Educational Administration and Public Policy
Title : Evaluation of Implementation Assistance Program Directorate of Vocational Education (Case study at Sebelas Maret University)

This study aims to analyze the implementation of vocational education assistance program administration by taking a case study at the University of March, Surakarta using CIPP Model (Context, Input, Process, Product). Subjects were Officer Directorate of Vocational, program coordinator at the University, Lecturer of the field supervisor, treasurer of the program, program participants, principals and teachers officials. The results show the components of the relevance and context of the strong relationship between the mentoring program with the aim of the stakeholders involved, namely the Directorate of vocational school, college and vocational school executive, the input component of the implementing institutions are universities that have courses that are needed in schools vocational and able to provide participants with an appropriate program of study with expertise in vocational education programs that are targeted, the component indicates the presence of living cost as well as those who lack sufficient implementation time is less than optimal due to lack of fit with the school year, and the product of the components showed that all participants have provided benefits to schools in the implementation of learning programs in both school and non-teaching aspects of teaching.

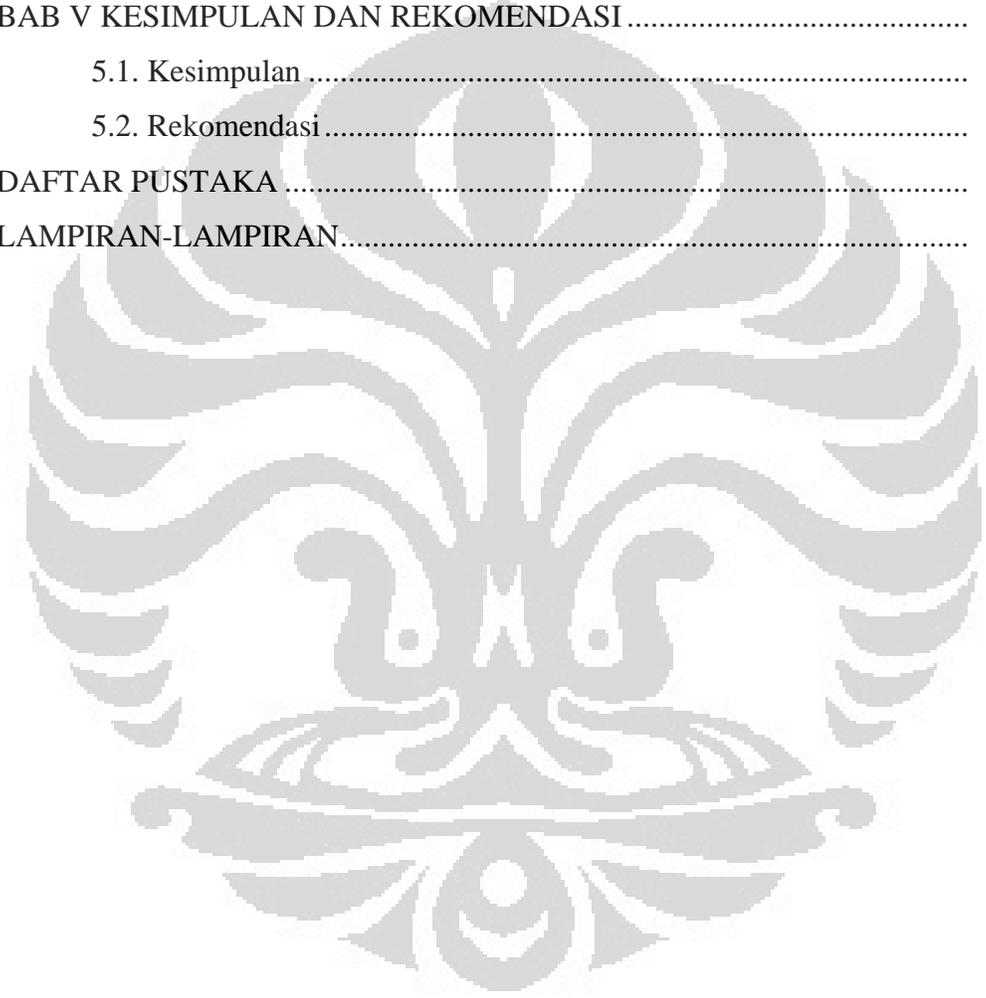
Keywords: Vocational Assistance, Evaluation, CIPP

DAFTAR ISI

Judul	
Halaman Pernyataan Orisinalitas	I
Lembar Pengesahan	II
Lembar Persetujuan.....	III
Kata Pengantar	IV
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	VI
Abstrak	VII
Abstract	VIII
Daftar Isi	IX
Daftar Tabel	XII
Daftar Gambar.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian	13
1.4.Manfaat Penelitian	13
1.5.Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Konsep Evaluasi Program	15
2.1.1 Tujuan Evaluasi Program	16
2.1.2 Jenis Evaluasi Program	17
2.2. Konsep Pendampingan.....	18
2.2.1 Pengertian Pendampingan	18
2.2.2 Peran dan Fungsi Pendampingan	20
2.2.3 Proses Pendampingan.....	27
2.2.4 Konsep Pendampingan Pendidikan Kejuruan	32
2.3. Konsep Pendidikan	41
2.3.1 Definisi Pendidikan menurut bahasa	41

2.3.2 Menurut Para Ahli Pendidikan	42
2.3.3 Menurut Kamus dan Ensiklopedi	42
2.4. Konsep Pendidikan Kejuruan.....	43
2.4.1 Definisi Pendidikan Kejuruan	43
2.4.2 Prinsip-prinsip Pendidikan Kejuruan	45
2.4.3 Tujuan Pendidikan Kejuruan.....	49
2.5. Konsep Implementasi.....	51
2.6. Konsep Evaluasi Program CIPP	49
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Tipe Penelitian	59
3.2. Pendekatan Penelitian	59
3.3. Tipe Evaluasi.....	60
3.4. Lokasi Penelitian.....	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.5.1 Pengumpulan Data Primer	61
3.5.2 Pengumpulan Data Skunder.....	65
3.6. Teknik Analisa Data.....	65
3.7. Keterbatasan Penelitian.....	66
3.8. Penelitian Terdahulu	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1. Gambaran Obyek Penelitian	69
4.2. Aspek Konteks	71
4.3. Aspek Input	75
4.3.1 Panduan Pelaksanaan/KAK	75
4.3.2 Manajemen dan Sumberdaya PT Pelaksana	79
4.3.3 Peserta Program	86
4.3.4 Sekolah Sasaran	90
4.4 Aspek Proses	94
4.4.1 Sosialisasi Program	94
4.4.2 Seleksi dan Penetapan	98
4.4.3 Pembekalan	101

4.4.4 Supervisi.....	103
4.4.5 Waktu Pelaksanaan	106
4.4.6 Pendanaan	109
4.4.7 Pelaporan.....	114
4.5 Aspek Produk.....	116
4.5.1 Aspek Teaching.....	122
4.5.2 Aspek Aspek Non-Teaching	134
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Rekomendasi.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	136



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Siswa SMA & SMK Th. 2000/2001 dan 2005/2006.....	7
Tabel 1.2	Rasio guru SMA & SMK Th. 2000/2001 dan 2005/2006	7
Tabel 1.3	Rasio Jumlah Sekolah SMK & SMA tahun 2000/2001 dan 2005/2006..	8
Tabel 2.1	Ringkasan Definisi Pendampingan.....	19
Tabel 2.2	Rangkuman Terminologi Pendampingan.....	29
Tabel. 2.3	Matrik Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan dengan model CIPP.....	51
Tabel 4. 1	Anggaran Biaya.....	110
Tabel 4.2	UMP di beberapa Propinsi di Wilayah Indonesia.....	112
Tabel 4.3	Rangkuman Hasil Kerja Peserta di Sekolah.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan tujuan pendidikan kejuruan dan pendidikan umum .	5
Gambar 1.2	Tahapan pembalikan ratio siswa SMK : SMA.....	9
Gambar 2.1	Tahapan Pendampingan, Adi (2002).....	29
Gambar 2.2	Konsep Pendidikan Kejuruan di USA.....	48
Gambar 3.1.	Teknik Pengumpulan Data Kualitatif.....	61
Gambar 4.1	Proses Pembentukan Guru Profesional.....	89



BAB I. PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian yaitu mengenai adanya kebijakan otonomi daerah yang melatar belakangi digulirkannya program pendampingan penyelenggaraan pendidikan, selain itu akan diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah konsekuensi dari keinginan berbagai pihak pasca reformasi dalam rangka menghidupkan nilai-nilai demokrasi agar menyebar ke berbagai daerah. Otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Pemerintah pusat hanya menangani penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif. Untuk propinsi, kewenangan terbatas pada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu, dan penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok/modul pendidikan bagi siswa. Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan propinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah tingkat II. Ini berarti bahwa tugas dan beban Pemda tingkat II dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi daerah yang *capacity building* dan sumberdaya pendidikannya kurang.

Di era otonomi daerah jumlah guru yang tidak merata antar wilayah sulit diatasi, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Baedhowi mengatakan,

Kemendiknas sebenarnya sudah mengajukan usulan penambahan guru ke pemerintah daerah yang kekurangan, Namun ada juga pemerintah daerah yang langsung mengajukan permintaan ke pusat. Baedhowi menjelaskan, kalau daerah yang meminta maka proses penempatan guru ke daerah akan lebih mudah dan langsung difasilitasi. Sementara jika atas usulan Kemendiknas agak rumit karena ada saja daerah yang melakukan penolakan. "Padahal kita sudah mencari guru dari propinsi lain untuk ditempatkan di daerah yang kekurangan," katanya. Akhirnya harus ada kesepakatan terlebih dulu dengan pemerintah daerah. karena, tambahnya, di era otonomi daerah seperti ini Kemendiknas tidak dapat melakukan apapun untuk menempatkan guru tanpa persetujuan pemerintah daerah. Kalau dipaksakan, jelasnya, maka guru yang diperbantukan akan kabur kembali ke daerahnya karena tidak merasa nyaman (<http://news.okezone.com/read/pemerataan-guru-terganjal-otoda>)

Otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya ditujukan bagi daerah tingkat II tetapi juga dibebankan bagi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan terdepan dan dikontrol oleh *stakeholders* pendidikan (orangtua, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri, Dewan Perwakilan Rakyat, serta LSM pendidikan). Pengembangan SMK menjadi sangat tergantung dari kepedulian Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, di mana sekolah-sekolah yang ada merupakan milik Pemerintah Daerah termasuk kewenangan terhadap guru. Pada masa pemerintahan sentralistik Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menempatkan guru di suatu tempat baik itu mengangkat guru di suatu wilayah yang terjadi kekeurangan guru maupun memindahkan guru dari tempat yang memiliki kelebihan guru ke wilayah lain yang masih terjadi kekurangan guru, namun setelah otonomi daerah hal tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat karena hal tersebut telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah II.

Pelaksanaan otonomi pendidikan, walaupun secara konsepsional disepakati sebagai arah yang benar dalam penyelenggaraan pendidikan masa depan, bukanlah tanpa tantangan dan masalah. Tantangan dan masalah utama otonomi pendidikan adalah *capacity building* daerah yang bersangkutan dan merupakan hal yang harus diperhatikan setiap daerah, baik pada level birokrasi maupun sekolah. Bila hal ini tidak diperhatikan maka bukan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan utama

otonomi pendidikan ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, *profesionalisme dan merit sistem* harus menjadi alat utama dalam mengelola, menyelenggarakan, dan mengontrol layanan pendidikan di daerah. Tantangan kedua, adalah ketersediaan sumberdaya pendidikan yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing. Daerah dan sekolah harus pandai-pandai mencari dan mengembangkan *resources* di daerah masing-masing kalau ingin kompetitif dengan daerah lain. Karena itu, upaya-upaya *networking* harus digalakkan dengan masyarakat, lembaga-lembaga profit dan non-profit, di daerah dan antar daerah untuk mengatasi kekurangan *resources* ini. Tantangan ketiga adalah masalah *leadership* dan *transparency*. Sukses tidaknya layanan pendidikan di suatu daerah amat bergantung pada kepemimpinan pendidikan di daerah/sekolah itu dan bagaimana daerah/sekolah mengembangkan dan menciptakan iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam melaksanakan misinya sebagai institusi yang menyiapkan tamatan yang profesional dan berkualitas agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang adalah terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara efektif dan efisien. Guru sebagai sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah mempunyai peranan yang sangat menentukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, karena guru adalah pengelola pelaksanaan KBM bagi para siswa. Agar pelaksanaan KBM ini berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran maka harus disediakan guru yang profesional dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap SMK baik jumlah, kualifikasi maupun spesialisasinya, baik pendidikan kejuruan (*vocational education*) maupun pendidikan umum (*general education*) pada dasarnya sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan tenaga kerja. Pendidikan umum didefinisikan sebagai pendidikan dalam rangka membekali peserta didik di dalam mendapatkan pengetahuan yang bersifat umum untuk kehidupan manusia, sedangkan pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai pendidikan khusus yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik terutama yang berminat dalam berbagai bidang khusus atau pada bidang

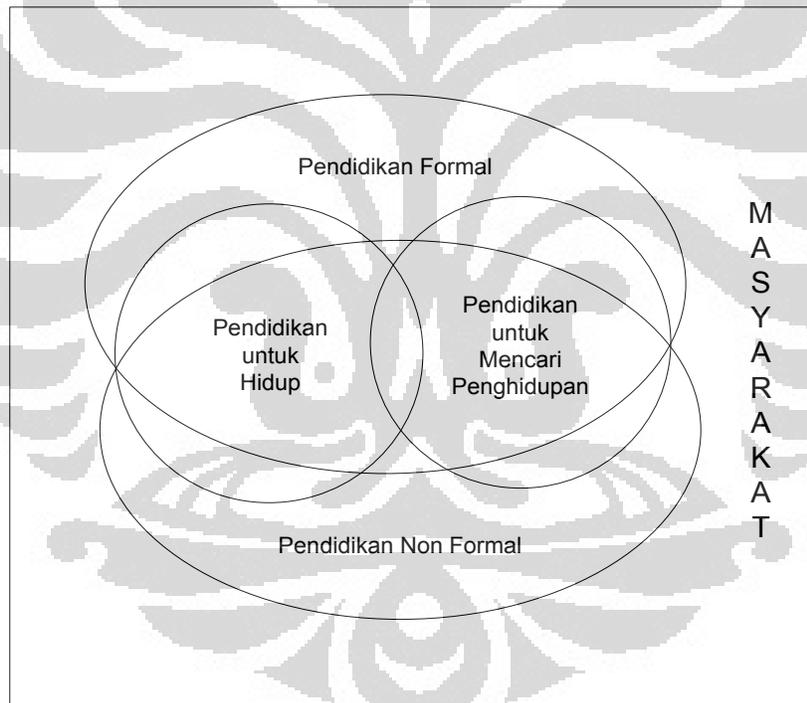
kejuruan. Adapun definisi pendidikan kejuruan menurut aturan yang tertuang dalam perundangan RI, yaitu :

- Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa : Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa 'pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 dijelaskan bahwa : 'Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu

Pendidikan kejuruan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, karena itu peran sertanya dalam memberikan pelayanan bagi semua warga masyarakat pada berbagai usia kerja dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan dan bidang usaha merupakan suatu keharusan dan kebutuhan nasional. Pelayanan Pendidikan Kejuruan yang efektif dan berhasil secara nasional akan turut meningkatkan taraf dan mutu kehidupan individu dalam aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik baik tingkat daerah maupun nasional. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan khusus/spesial yang sangat penting dalam suatu masyarakat maupun dunia usaha/pasar kerja. Lembaga mempersiapkan tenaga kerja selaras dengan adanya tuntutan masyarakat akan adanya kerja. Manusia menuntut adanya pekerjaan karena adanya kebutuhan (*need*), perlu aktivitas, kebebasan, kekuasaan, pengakuan sosial dan rasa senang. Masalah besar yang dihadapi generasi muda Indonesia pada

waktu mendatang adalah lapangan kerja, di mana mereka dapat berkembang menjadi manusia dewasa. Hanya sedikit orang muda lewat pendidikan di dalam dan di luar negeri berhasil menduduki posisi sentral di dalam berbagai lembaga kemasyarakatan dan di bidang profesional, sedangkan sisanya harus berusaha dengan berbagai cara meningkatkan keterampilan di berbagai bidang usaha agar supaya bisa bertahan menghadapi tantangan hidup. Pendidikan kejuruan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan majemuk penuh dengan spesialisasi dan diversifikasi.

Bilamana dikaitkan dengan tujuan pendidikan itu sendiri maka pendidikan umum bertujuan untuk hidup dan kehidupan manusia sedangkan pendidikan kejuruan bertujuan untuk mencari penghidupan. Seperti yang dilukiskan oleh Finch dan Crunkilton dalam Johar Maknun (2008) di bawah ini :



Gambar 1.1. Hubungan tujuan pendidikan kejuruan dan pendidikan umum

Slamet PH (1990) dalam Johar Maknun (2008) memberi penjelasan tentang arti pentingnya pendidikan kejuruan bagi : (1) Peserta didik adalah untuk :Persiapan kerja, Perbaikan konsep diri, Pengembangan kepemimpinan, Persiapan untuk belajar lebih lanjut, Memberi dasar untuk mencapai penghasilan, Persiapan karir lebih lanjut,

Penyesuaian terhadap perubahan. (2) Organisasi/Institusi, adalah untuk : Memberikan pekerja yang terampil, Memberikan etos kerja yang tinggi, Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, Menghemat biaya operasional. (3) Masyarakat, adalah : Meningkatkan penghasilan, Mengurangi pengangguran, Menciptakan penduduk yang lebih baik. (4) Bangsa Indonesia, adalah :Diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam *Road Map of DPSMK 2006-2010* disebutkan bahwa pendidikan kejuruan (*vocational education*) dalam sistem pendidikan menengah di Indonesia sangat penting untuk ditingkatkan. Dokumen tersebut memberikan beberapa alasan sebagai berikut:

1. SMK merupakan bagian tak terpisahkan dari sektor ekonomi, yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sistem SMK perlu ditingkatkan (*improved*) baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Kualitas SMK mencerminkan kualitas angkatan kerja Indonesia, yang perlu dikembangkan terus-menerus untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia Indonesia.
3. SMK berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran (*jobless index*) di Indonesia.

Agar mampu tampil dalam pasar tenaga kerja, SMK harus berpartner dengan sektor usaha, dan pengusaha harus lebih berperan dalam mendukung kebijakan pendidikan kejuruan

Sejak tahun 1998, Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) yang sekarang disebut Direktorat Pembinaan SMK, melakukan reformasi pendidikan kejuruan yang ditekankan pada dua hal. *Pertama*, memanfaatkan potensi lokal, mulai dari sumber daya alam, mineral, pertanian, perikanan. *Kedua*, relevansinya ditekankan kepada kebutuhan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah kebutuhan industri internasional.

(<http://one1thousand100education.wordpress.com/2008/02/07/pendidikankejuruan>)

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah terus mengembangkan pendidikan menengah, terutama pendidikan kejuruan dengan terus

meningkatkan jumlah sekolah kejuruan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah penancangan program peningkatan jumlah SMK yaitu pencapaian proporsi SMK dan SMA tahun 2010 ditargetkan 50:50, dan diharapkan menjadi 70:30 pada tahun 2015. Pada tabel berikut dijelaskan rasio siswa SMA dan SMK pada tahun 2000/2001 dan pada tahun 2005/2006 :

Tabel 1.1. Rasio Siswa SMA & SMK Th. 2000/2001 dan 2005/2006

No	Jenis Pendidikan	Th. 2000/2001		Th. 2005/2006	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	SMA	2.938.514	60	3.497.420	61
2	SMK	1.933.937	40	2.231.927	39
Jumlah		4.872.451	100	5.729.347	100

Sumber : Kajian kebutuhan Guru SMK menurut bidang keahlian yang dibuka, Direktorat PSMK.

Seperti disajikan pada tabel 1, pada tahun 2005/2006 rasio siswa SMA : SMK adalah 61:39 yang berarti jumlah siswa SMA justru jauh lebih banyak daripada jumlah siswa SMK, maka untuk membalikan kondisi di atas dimana jumlah siswa SMK lebih banyak dari siswa SMA maka dalam kurun delapan tahun ke depan akan banyak dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembangunan unit sekolah baru dan ruang sekolah baru untuk SMK. Secara nasional banyaknya guru SMK memang selalu meningkat seiring dengan bertambahnya populasi siswa yang memasuki sekolah menengah kejuruan. Pada tahun 2000/2001 terdapat 136.077 guru SMK, lima tahun kemudian jumlah guru SMK menjadi 201.941 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 65.864 orang (48%). Rasio guru SMA:SMK pada tahun 2000/2001 sekitar 62:38, sedangkan pada tahun 2005/2006 menjadi 57:43 dengan kata lain pertambahan guru SMK cenderung lebih banyak daripada pertambahan guru SMA yang selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Rasio guru SMA & SMK Th. 2000/2001 dan 2005/2006

No	Jenis Pendidikan	Th. 2000/2001		Th. 2005/2006	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	SMA	218.571	62	267.419	57
2	SMK	136.077	38	201.941	43
Jumlah		354.648	100	469.360	100

Sumber : Kajian kebutuhan Guru SMK menurut bidang keahlian yang dibuka, Direktorat PSMK.

Namun pertumbuhan guru SMK tersebut tidak akan mampu mengimbangi penambahan siswa sesuai dengan yang ditargetkan apabila penambahan guru SMK berjalan sesuai dengan tren yang ada. Harus ada kebijakan khusus sehingga penambahan siswa, guru dan sekolah bisa berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang diinginkan.

Pada tabel berikut dijelaskan rasio jumlah sekolah SMK dan SMA pada tahun 2000/2001 dan 2005/2006 dimana terlihat ada sedikit perubahan, dimana ada penambahan prosentase jumlah sekolah SMK dibanding SMA.

Tabel 1.3. Rasio Jumlah Sekolah SMK & SMA
tahun 2000/2001 dan 2005/2006

No	Jenis Pendidikan	Th. 2000/2001		Th. 2005/2006	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	SMA	7.980	64	9.317	61
2	SMK	4.429	36	6.025	39
Jumlah		12.409	100	15.342	100

Sumber : Indonesia Educational Statistics in Brief

Jika dibandingkan antara tabel 1.1, tabel 1.2 dan tabel 1.3 menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah guru dan sekolah kejuruan yang terlihat dari peningkatan persentase guru dan sekolah. Namun hal ini tidak diikuti oleh penambahan siswa SMK dimana persentasenya justru cenderung menurun dimana hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengembangan pendidikan kejuruan belum berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam rangka mendukung kebijakan pembalikan rasio jumlah siswa SMK yang berkisar 70% dan siswa SMA 30% yang akan dicapai pada tahun 2015 maka akan banyak dibutuhkan guru SMK, namun penambahan guru tersebut harus memperhatikan beberapa aspek sehingga kebijakan ini bisa tepat sasaran, sebab di lapangan banyak terjadi guru kejuruan yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya serta masih banyaknya sekolah yang kekurangan guru produktif. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain : bidang dan program keahlian apa saja yang sebenarnya dibutuhkan, besarnya rasio siswa:guru, sebaran atau proporsi guru menurut bidang/program keahlian serta bagaimana relevansinya dengan bidang dan program keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dikabupaten/kota di seluruh Indonesia.

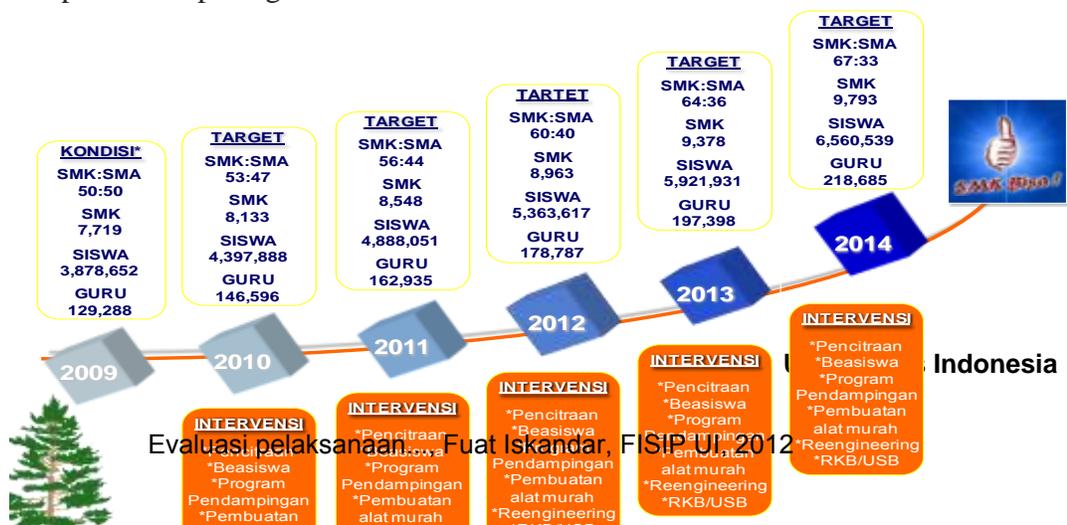
Kementerian Pendidikan Nasional memiliki 3 tujuan strategis pengembangan SMK, yakni:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu,
2. Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang bertaraf Internasional dan
3. Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip *Good Governance*

Upaya pemerintah merealisasi target yang telah dicanangkan tersebut disusun tahapan strategi dan target pencapaian tahunan yang meliputi (i) rasio siswa didik, (ii) jumlah siswa SMK, (iii) jumlah sekolah SMK, (iv) pertumbuhan siswa SMK dan (v) jumlah guru SMK menjelang tahun 2010. Tahapan tersebut tertuang dalam *roadmap* Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014.

(Sumber: Slide Bahan Masukan Pasar Kerja, Di PSMK 2009)

Adapun tahapan pembalikan ratio siswa SMK : SMA sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Tahapan pembalikan ratio siswa SMK : SMA

Selanjutnya dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di wilayahnya, serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, maka sejak tahun 2003 Direktorat Pembinaan SMK telah mengalokasikan dana melalui bantuan pembangunan pendirian Unit Sekolah Baru-SMK yang dilaksanakan dengan cara swakelola melalui unsur pendekatan partisipasi masyarakat. Adanya dukungan dan perhatian ini, diharapkan Pemerintah Daerah juga dapat mengalokasikan dan merealisasikan dana pembangunan untuk pendirian Unit Sekolah Baru (USB) . Sejak tahun 2003 sampai dengan 2009 lebih dari 400 Unit Sekolah Baru sudah didirikan di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Sekolah-sekolah ini tentunya harus terus dibantu baik dari segi sarana-prasarananya maupun pemenuhan guru khususnya guru produktif.

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, .Joko Sutrisno mengatakan bahwa lonjakan daya tampung siswa di SMK beberapa tahun terakhir belum mampu diikuti dengan peningkatan kuantitas guru. Kondisi ini menjadi salah satu kendala menggenjot pertumbuhan SMK, di lain pihak ada aturan tidak boleh mengangkat pegawai honorer. Secara terpisah, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas Baedhowi mengatakan, kekurangan guru teknis ini terutama terjadi di SMK yang baru berdiri. (dimuat di harian umum kompas dikutip dari <http://www.penapendidikan.com>).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sejak tahun 2008 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan SMK telah menggulirkan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan dalam rangka

membantu pemenuhan guru produktif di SMK yang masih berstatus sebagai Sekolah USB (Unit Sekolah Baru). Pada tahun 2010 program ini dilaksanakan dengan menggandeng 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang tersebar di wilayah Indonesia sebagai pelaksana Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan, ke-sepuluh perguruan tinggi tersebut adalah :

1. Universitas Negeri Medan
2. Universitas Negeri Padang
3. Universitas Pendidikan Indonesia
4. Universitas Negeri Jakarta
5. Universitas Sebelas Maret Surakarta
6. Universitas Gajayana Malang
7. Universitas Negeri Surabaya
8. Universitas Negeri Makassar
9. Universitas Tanjung Pura Pontianak dan
10. Universitas Negeri Manado.

Perguruan Tinggi tersebut diharapkan bisa dijadikan mitra dalam rangka merealisasikan program-program yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Pembinaan SMK karena Perguruan Tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Konsisten terhadap upaya mengangkat derajat pendidikan bangsa melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, (2) Merupakan lembaga penghasil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selalu aktif mengangkat permasalahan pendidikan ke dalam kajian pokok akademik sehingga relevan dengan adanya upaya penyediaan calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di daerah, (3) mempunyai misi untuk membangun masyarakat agar tanggap terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan ini dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan mahasiswa dan *fresh graduate* dari beberapa Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program Praktek Pengalaman Lapangan/ Kuliah Kerja Nyata, dimana para mahasiswa tersebut di tempatkan sebagai guru pendamping selama 5 bulan di SMK yang membutuhkan tenaga pengajar untuk bidang Produktif.

Berdasarkan laporan akhir pelaksanaan pada tahun 2008 dan 2009 yang disampaikan oleh perguruan tinggi pelaksana banyak permasalahan yang ditemui di lapangan, salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta, antara lain :

- Ditemukan adanya ketidaksesuaian data di pihak Direktorat Pembinaan SMK dengan data di lapangan berkaitan dengan lokasi dan program keahlian yang ada di sekolah, sebagai contoh yaitu : SMKN 1 Sawo dan SMKN 1 Siahung yang seharusnya terletak di kabupaten Ponorogo justru terdata di kabupaten lain Probolinggo, kemudian SMKN Pujon di Malang serta SMKN 1 Suboh Situbondo yang seharusnya membutuhkan program keahlian Teknologi Informasi justru data yang ada membutuhkan program keahlian teknik bangunan.
- Beberapa SMK yang didampingi ternyata merupakan SMK yang sudah baik dengan kualifikasi Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), di mana seharusnya sekolah yang menjadi sasaran program adalah sekolah yang masih berstatus Unit Sekolah Baru (USB).
- Banyak sekolah belum mengetahui adanya Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan, hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program ini.
- Kebutuhan biaya hidup di beberapa lokasi khususnya di luar pulau Jawa yaitu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua ternyata cukup tinggi sehingga tunjangan biaya hidup yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi kepada peserta relatif tidak mencukupi dan sangat minim.

Melihat permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan tahun 2010 pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional dengan mengambil studi kasus pelaksanaan Program yang dilaksanakan oleh

Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal ini dikarenakan Universitas Sebelas Maret Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang sejak awal sudah terlibat dalam pelaksanaan program serta merupakan satu-satunya institusi yang mengembangkan konsep pelaporan secara *on-line*.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran dari Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan tidaklah mudah, hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan program ini, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan tahun 2010 Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Sebelas Maret, Surakarta dilihat dari aspek konteks, input, proses dan produk.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan, Direktorat Pembinaan SMK dengan mengambil studi kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta dilihat dari aspek konteks, input, proses dan produk

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan dunia akademis tentang pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

2. Manfaat Praktis

- Sebagai masukan bagi lembaga pendidikan khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam memberikan layanan kepada sekolah khususnya berkaitan dengan pemenuhan tenaga pendidik di sekolah kejuruan.
- Sebagai masukan yang konstruktif bagi Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan Nasional sehingga ke depan dapat melaksanakan program dengan lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini sistematika yang akan dituliskan adalah sebagai berikut:

Bab 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pembahasan teoritis tentang konsep pendampingan secara umum, konsep pendidikan kejuruan, dan konsep tentang implementasi/pelaksanaan program.

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tipe penelitian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data hasil penelitian

Bab 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis tentang pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilihat dari aspek konteks, input, proses, dan produk serta bagaimana implementasiya kemudian menganalisis permasalahan yang muncul untuk ditemukan solusinya.

Bab 5 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bahasan ini membuat kesimpulan tentang hasil penelitian dan analisisnya, selanjutnya membuat rekomendasi berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan penilaian yang sistematis dan seobyektif mungkin terhadap suatu obyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau sudah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya, dimana tujuan dari evaluasi program adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efisiensi, efektifitas, dampak dan keberlanjutannya, dimana suatu evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna agar donor serta pihak penerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses pengambilan keputusan. (World Bank, 2004). Sedangkan Musa (2005) mendefinisikan evaluasi program sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas. Evaluasi sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa fakta, data dan informasi, evaluasi selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi merupakan suatu landasan untuk menilai suatu program dan memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki lagi.

Menurut Arikunto dan Cepi (2009) yang menjadi titik awal dari kegiatan evaluasi program adalah keingintahuan untuk melihat apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Jika sudah tercapai, bagaimanakah kualitas pencapaian kegiatan tersebut, dan jika belum tercapai, bagian manakah dari rencana yang telah dibuat namun belum tercapai dan apa penyebab bagian rencana tersebut belum tercapai. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian program. Pietrzak (Solihat, 2007) mengemukakan mengapa evaluasi program perlu dilaksanakan, yaitu : pertama, bahwa hasil evaluasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program yang selanjutnya menjadi dasar bagi perbaikan program. Kedua, evaluasi berfungsi menganalisa dan efektifitas suatu program.

Dengan melihat kepada beberapa definisi diatas, maka evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dari suatu program

secara sistematis yang bertujuan untuk mengukur atau menilai suatu program, meningkatkan keefektifan program dan mengambil keputusan berkaitan dengan program di masa yang akan datang.

2.1.1 Tujuan Evaluasi Program

Suchman sebagaimana dikutip oleh Nazir (1998) menyebutkan bahwa penelitian evaluasi merupakan penentuan hasil yang diperoleh dari beberapa kegiatan (suatu program) yang dibuat untuk memperoleh suatu tujuan tentang nilai atau *performance*, Tujuan penelitian evaluasi menurutnya adalah untuk mengukur pengaruh suatu program terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuatan keputusan tentang suatu program dan untuk meningkatkan dan memperbaiki program di masa yang akan datang. Sesuatu di sini bisa berupa program, proyek dan sebagainya. Seringkali orang ingin mengetahui bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi dan sedang terjadi, serta bagaimana dan mengapa sesuatu dikerjakan dan sedang dikerjakan. Dari sana kemudian orang akan bisa belajar dari hasil penilaian tersebut untuk meningkatkan kinerja (*performance*).

Menurut Mark, Henry dan Julnes (Solihat,2007) ada empat tujuan evaluasi program, yaitu : pertama, menilai kekuatan dan kelemahan program, mengembangkan penilaian terhadap nilai suatu kebijakan program pada level individu atau masyarakat. Kedua, peningkatan organisasi dan program, sebagai upaya menggunakan informasi secara langsung untuk memodifikasi dan meningkatkan pelaksanaan program. Ketiga, menilai seberapa luas sebuah program sesuai dengan undang-undang, regulasi, aturan dan harapan. Keempat, mengembangkan pengetahuan, menemukan atau menguji teori, preposisi dan hipotesa dalam lingkup kebijakan dan program. Dalam kajian literatur Monev, Direktorat Pembinaan SMK (2009) menyebutkan bahwa secara umum evaluasi memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk: (i) pembelajaran (*lesson learning*). Evaluasi terhadap suatu program akan memberikan pembelajaran (*learning*) yang berharga yang sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan atau perencanaan program yang akan datang. (ii) memberikan pertimbangan bagi keputusan pengoperasian, pengambilan kebijakan, atau strategi yang terkait dengan program yang berjalan atau yang akan datang (berdasarkan

pengalaman). (iii) menunjukkan akuntabilitas pada pemberi bantuan dan pengambil keputusan (*decision-makers*)

Banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang ingin mengetahui apakah dana atau resources lainnya digunakan secara tepat, apakah suatu pekerjaan telah selesai atau perlu dilanjutkan. Dengan pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang baik diharapkan akan memberikan hasil program yang baik dan lebih efisien terhadap penggunaan sumber daya (*resources*). Selain itu juga ada beberapa tujuan lain dari evaluasi, meliputi untuk verifikasi kualitas dan manajemen program, mengidentifikasi strategi-strategi yang berhasil dan yang gagal, mengukur efek atau manfaat program. Dari uraian diatas dapat diringkas bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan dan untuk mengukur suatu program, kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang agar lebih baik.

2.1.2. Jenis Evaluasi Program

Dalam konteks umum, evaluasi dibedakan atas evaluasi formatif (*formative evaluation*) dan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) (DFID, 2005) dengan pengertian sebagai berikut:

1. Evaluasi formatif (*formatif evaluation*)

Evaluasi formatif dilakukan pada saat implementasi program berjalan dan bertujuan pada peningkatan kinerja program yang dievaluasi, melalui pembelajaran (*learning*) dari pengalaman yang telah diperoleh. Pada kebanyakan program, evaluasi ini lebih substansial diarahkan pada terjadinya perubahan antara disain program dan implementasi, validasi atau penilaian awal terhadap relevansi, efektivitas dan efisiensi. Evaluasi ini juga bermanfaat untuk menilai adanya tanda-tanda kegagalan dan keberhasilan suatu pelaksanaan program. Evaluasi formatif seringkali diacu sebagai ‘*reviews*’ terhadap suatu program.

2. Evaluasi sumatif (*summatif evaluation*)

Evaluasi summatif dilakukan setelah implementasi program selesai. Tujuan utamanya adalah untuk menilai keberhasilan suatu program, dari sisi disain, manajemen, efektivitas, output, dampak. Temuan-temuannya bisa digunakan untuk

pembelajaran dalam perencanaan dan implementasi program lainnya yang sejenis. Pada saat ini evaluasi sumatif lebih diutamakan untuk menilai akuntabilitas (*accountability*) pelaksanaan program.

2.2. Konsep Pendampingan

Pada bab pendahuluan telah dikemukakan bahwa tujuan digulirkannya program pendampingan penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai solusi terhadap kekurangan guru produktif di sekolah utamanya adalah sekolah USB (unit sekolah baru). Pada bab ini akan dijelaskan berbagai konsep pendampingan yang dikutip dari berbagai literatur dan pendapat para ahli sebagai pendukung kerangka pemikiran dan landasan teori.

2.2.1 Pengertian Pendampingan

Secara harfiah pendampingan adalah suatu hubungan antara pendampingan dengan yang didampingi, dimana kedua belah pihak berada pada posisi dekat. Dalam Pendampingan, pihak pendamping menyertai atau menemani pihak yang didampingi.

Pendampingan menurut Karjono seperti yang dikutip oleh Ismawan (1994), sebagai berikut :

“Pendampingan adalah suatu strategi pengembangan (cara untuk mencapai tujuan) dimana hubungan antara pendampingan dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) diantara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas ke arah yang lebih baik”

Hubungan antara pendamping dan yang didampingi berfungsi sebagai media atau saluran yang bisa di isi dengan aktivitas untuk saling memberikan pengaruh antar kedua belah pihak, saling belajar memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta saling memenuhi kebutuhan sebagai mahluk sosial.

Berkaitan dengan pengertian pendampingan, Ife (1995) menyatakan bahwa pendampingan lebih diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menuntut untuk dapat melakukan beragam kegiatan dan menjalankan berbagai peranan yang dibutuhkan dalam satu waktu. Sehingga dalam prakteknya seorang pendamping masyarakat dapat berubah dari satu peranan ke peranan lainnya.

Pandangan Ife sejalan dengan Ismawan (2000,h.19) yaitu bahwa pendamping adalah mitra atau fasilitator yang membantu kelompok swadaya masyarakat di dalam melaksanakan agenda-agendanya dalam mencapai tujuannya sendiri. Wawasan yang luas berarti menuntut pendamping untuk peka terhadap kelompok, sehingga kegiatan pendampingan juga didasarkan pada pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pengertian lain yang hampir sama maknanya adalah pengertian pendamping menurut Mubyarto (1994,h.154) yang menyatakan bahwa pendamping adalah seseorang atau kelompok yang bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

Kredibilitas seorang pendamping yang dikerjakan oleh pemerintah maupun swasta sangat menentukan keberhasilan program yang dijalankan di masyarakat. Hal ini disebabkan seorang pendamping akan berperan ganda baik sebagai nara sumber maupun sebagai penggerak dan sekaligus fasilitator bagi pelaksanaan pengembangan suatu komunitas atau masyarakat yang didampingi. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dirumuskan beberapa definisi pendampingan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Definisi Pendampingan

Tinjauan	Karjono	Ife	Ismawan	Mubyarto
Sifat	Agen perubah	Agen perubah	Mitra atau fasilitator	Agen perubah
Tujuan	Mengubah realitas yang ada ke arah kualitas yang lebih baik	Melakukan beragam kegiatan dan menjalankan berbagai peranan yang dibutuhkan dalam satu waktu	Membantu kelompok swadaya masyarakat	Bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok
Sasaran	Masyarakat	Masyarakat	Individu dan	Individu dan

			Masyarakat	Masyarakat
--	--	--	------------	------------

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat, tujuan dan sasaran yang sama dari kegiatan pendampingan adalah membantu masyarakat untuk mengubah kondisi yang ada ke arah yang lebih baik dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang didampingi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Berkaitan dengan siapa yang akan melaksanakan tugas pendampingan, Sumodiningrat dalam Priyono dan Pranarka (1996) mengemukakan bahwa pendamping dapat meliputi yaitu :

- Pendamping setempat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, kader-kader PKK, aparat desa setempat dan kader-kader yang ada di desa setempat.
- Pendamping teknis yang berasal dari tenaga penyuluh kementerian teknis.
- Pendamping khusus yang disediakan bagi masyarakat desa miskin di desa tertinggal dengan pembinaan khusus.

Menurut DJamal dkk (1994) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pendamping dalam suatu masyarakat, hendaknya pendamping menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- Tinggal di lingkungan masyarakat yang hendak dikembangkan, ini bisa berarti menetap (selama berlangsungnya proses pemberdayaan) atau bisa sekali-kali tinggal di masyarakat yang bersangkutan.
- Menggunakan bahasa ibu yang dipergunakan masyarakat, misalnya untuk masyarakat Sunda gunakan bahasa Sunda dan lain sebagainya.
- Tidak menggurui, meskipun tingkat pengetahuan dan ketrampilan suatu kelompok masyarakat kelihatannya rendah tapi dalam hal-hal tertentu bisa jadi mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dari pendamping. Jika pendamping menggurui mungkin mereka diam saja tidak ada reaksi dan akibatnya bisa fatal.
- Jangan mudah memberikan janji-janji apalagi yang muluk-muluk, sekali pendamping memberi janji mereka akan teringat terus dan selalu mengharapkan realisasi janji itu.

- Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti arisan, pengajian, kerja bakti, kegiatan posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya.

2.2.2 Peran dan Fungsi Pendampingan

Pendamping perlu melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan peran pentingnya dalam memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, mereka perlu menyampaikan informasi program melalui tokoh dan kelompok masyarakat serta generasi muda, membujuk, mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat, memberi informasi mengenai manfaat partisipasi kelompok, menunjukkan peluang pengembangan dan perbaikan kondisi fisik, sosial dan ekonomi, memudahkan akses kelompok/organisasi masyarakat ke berbagai sumberdaya, menempatkan kelompok masyarakat ke dalam organisasi formal, mengadakan penyuluhan dan keterampilan teknis kepada masyarakat serta mendukung koordinasi program (*The National Association of Countries the United States, 1990*).

Pendamping perlu memiliki pula sikap dan kemampuan manajemen. Sikap yang perlu adalah demokratis dan terbuka, kebersamaan serta ketanggapan. Sedangkan kemampuan manajemen yang dimiliki itu meliputi kemampuan pendelegasian wewenang, berkreasi serta kemampuan memberi dan bereaksi terhadap umpan balik.(UNDP, 1998). Pendamping perlu menggerakkan untuk menyadari situasi kehidupan mereka serta memahami penyebab dan alternatif pemecahan situasi tersebut, selain itu pendamping berperan juga sebagai motivator dan *community organizers*.

Sikap demokratis dan terbuka adalah sikap yang utama yang perlu dimiliki pendamping, yakni bersedia memberi dan menerima pendapat masyarakat, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, selain itu pendamping perlu menyebarluaskan informasi program secara jujur kepada masyarakat. Sikap pendamping yang kurang demokratis dan terbuka menyebabkan kurang berhasilnya proses pendampingan. Pendamping tidak boleh menetapkan pemecahan masalah, mereka hanya membantu

masyarakat dalam merumuskan dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan (Midgley, 1986)

Pendamping perlu memiliki sikap kebersamaan yang diwujudkan dalam setiap tahap program, selain itu dibutuhkan pula sikap tanggap dalam memberikan reaksi terhadap masalah yang dilontarkan masyarakat. Bila pendamping secara cepat mampu memberikan tanggapan, masyarakat memiliki kepercayaan sehingga kemauan masyarakat dalam menyampaikan usul/masalah menjadi meningkat. Pendamping perlu menunjukkan pula sikap kenetralan dalam melaksanakan tugas pendampingan. Sikap kenetralan ditunjukkan dengan upaya mendamaikan serta memfasilitasi komunikasi diantara pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Pendamping perlu mendapatkan pelatihan formal agar memiliki sikap dan kemampuan manajemen yang mendukung proses pendampingan, melalui pelatihan, pendamping diharapkan memahami program secara mendalam, memahami hubungan antar individu/kelompok, memberi dukungan aktivitas kelompok, meningkatkan solidaritas kelompok dan meningkatkan akses masyarakat ke sumberdaya (Midgley,1989,h.30)

Sedangkan menurut Ife (1995,h.201) setidaknya seorang pendamping harus melaksanakan peranan-peranan yaitu :

"....community work roles have been grouped into four clusters, namely fasilitative roles, educational roles, representational roles and techni cl roles"

(Peranan-peranan pendamping dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok yaitu peranan fasilitatif, peranan edukasional, peranan representasional dan peranan teknis). Peranan tersebut harus dijalankan oleh pendamping, dimana masing-masing terdapat peran-peran yang lebih spesifik yang lebih mengarah pada teknik-teknik.

Adi (2003) menjelaskan tentang keempat peran tersebut yaitu peran fasilitatif dan peran edukasional merupakan peran-peran yang lebih mendasar dan langsung dalam intervensi dengan komunitas, sedangkan dua peran lainnya yaitu peran perwakilan masyarakat dan peran teknis lebih bersifat kurang langsung ke komunitas sasaran bila dibandingkan dua peran pertama, meskipun demikian kesemua peran tersebut merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Lebih lanjut Ife (1995,h.201-210) menjelaskan peran-peran tersebut sebagai berikut :

1. Peran fasilitatif (*fasilitative roles*)

merupakan peran-peran yang berkaitan dengan upaya-upaya merangsang dan mendorong pengembangan masyarakat. Pendampingan dapat menggunakan berbagai teknik untuk mempermudah proses secara efektif. Peran-peran yang dikelompokkan ke dalam fasilitatif adalah sebagai berikut :

- Animasi Sosial (*Social Animation*)

Ife mengemukakan bahwa keterampilan melakukan animasi sosial menggambarkan kemampuan pendamping sebagai agen perubah ataupun pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.

- Mediasi dan Negosiasi (*Mediation and Negotiation*)

Pendamping dalam upaya melakukan intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana) kadangkala bertemu dengan situasi dimana terjadi konflik minat dan nilai dalam komunitas. Dalam kaitan dengan hal tersebut, seorang pendamping (*community worker*) harus dapat menjalankan fungsi mediasi, ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik.

- Pemberi dukungan (*Support*)

Dalam kaitan dengan peran sebagai pemberi dukungan, Ife melihat bahwa salah satu peran dari pendamping adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan itu tidak selalu bersifat ekstrinsik atau material tetapi dapat juga bersifat intrinsik seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari pendamping terhadap apa yang dilakukan warga.

- Membentuk konsensus (*Bulding consensus*)

Pencapaian konsensus adalah mensepakati untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan keragaman dalam masyarakat tersebut, sehingga

tercapai rasa menghargai keragaman budaya dan pandangan yang ada, dalam upaya mencari jalan terbaik untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat.

- Fasilitasi kelompok (*Fasilitation group*)

Sebagian besar waktu yang dikerjakan oleh pendamping dihabiskan dalam kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Karena itu keefektifan kerja dari seorang pendamping juga akan sangat terkait dengan keterampilannya untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil. Di sinilah kemampuan memfasilitasi kelompok dari agen pemberdaya masyarakat mendapat ujian, karena keanekaragaman masyarakat termasuk juga dalam tuntutanannya : Kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat pada dasarnya merupakan suatu modal sosial karena adanya unsur norma (*norms*) dan nilai (*values*) dalam kelompok tersebut serta adanya unsur resiprositas (*reciprocity*) dan kepercayaan (*trust*) yang merupakan suatu ciri modal sosial (*social capital*).

- Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan (*Utilization of skills and resources*)

Peranan pendamping harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai keterampilan kelompok warga harus mendapat perhatian dari pendamping sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka, yang tentu saja di sini perlu dipertimbangkan pula potensi daerah pemasaran dimana produk tersebut dapat diterima.

- Mengorganisir (*Organizing*)

Peran terakhir dari pendamping dalam kaitannya dengan fasilitator adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisir melibatkan kemampuan pendamping untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, hal mana yang tidak perlu dilakukan sendiri dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan.

2. Peran Edukasional

- Membangkitkan kesadaran masyarakat (*Consciousness raising*)
Upaya membangkitkan kesadaran masyarakat (*consciousness raising*) berawal dari upaya menghubungkan antara individu dengan struktur yang lebih makro (seperti struktur dan politik). Hal ini bertujuan untuk membantu individu melihat permasalahan, impian, inspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari perspektif sosial politik yang lebih luas.
- Menyampaikan informasi (*Informing*)
Pendamping dalam upaya pemberdayaan suatu komunitas masyarakat tidak jarang juga harus menyampaikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh komunitas sarannya. Seorang pendamping dapat memberikan informasi yang berguna antara lain dengan menggambarkan kesuksesan atau program yang telah dilaksanakan di daerah lain dengan situasi dan kondisi yang mempunyai kemiripan dengan komunitas sasaran.
- Mengkonfrontasikan (*Confronting*)
Meskipun teknik konfrontasi kadangkala kurang menguntungkan dalam beberapa upaya pemberdayaan masyarakat, Ife menyatakan dalam kasus-kasus tertentu kadangkala seorang pendamping perlu juga melakukan konfrontasi komunitas sasaran ataupun kelompok-kelompok dalam komunitas tersebut.
- Pelatihan (*Training*)
Pelatihan merupakan peran edukasional yang paling efektif, karena secara mendasar memfokuskan pada upaya untuk melakukan sesuatu. Pelatihan pada dasarnya akan menjadi lebih efektif bila keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan yang diinginkan oleh komunitas yang didampingi.

3. Peran perwakilan masyarakat (*Representative roles*)

Peranan-peranan yang dikategorikan pada peranan ini digunakan dalam kaitannya dengan interaksi pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama komunitas yang didampinginya dan untuk kepentingan disekitarnya. Peran-peran tersebut adalah :

- Mencari sumber-sumber (*Obtaining resources*)

Prinsip kemandirian membutuhkan tersedianya sumber-sumber baik sumber internal yang didapatkan dari dalam komunitas masyarakat maupun eksternal. Pelibatan dalam mencari sumber-sumber eksternal merupakan salah-satu peran dari pendamping. Keterlibatannya diharapkan dapat membuat aplikasi permohonan, melobi untuk penggalian dana dan bantuan lainnya bagi kelompok-kelompok masyarakat.

- Pembelaan (*Advocacy*)

Pendamping dapat melakukan atau mengadopsi peran advokasi atas nama masyarakat atau atas nama kelompok maupun atas nama individu dalam masyarakat. Melalui kegiatan advokasi maka dapat diperkuat kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan kehidupannya sendiri.

- Penggunaan Media (*Using the media*)

Pendamping dalam beberapa hal dapat menggunakan media secara efektif. Penggunaan media oleh pendamping merupakan bagian dari suatu aksi kampanye yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang didampingi. Penggunaan media sebagai metode yang tepat dalam situasi krisis tertentu dimana pemanfaatannya dapat berupa *pres release*, *interview* melalui televisi atau media lain.

- Hubungan Masyarakat (*Public relation*)

Peran ini diperlukan pendamping dalam rangka membuat dan meningkatkan image yang baik atas proyek-proyek masyarakat. Peran ini dapat melibatkan pendamping dalam berbagai peran seperti pembicara dalam pertemuan kelompok pelayanan, kelompok wanita dan badan-badan lainnya.

- Jaringan Kerja (*Networking*)

Jaringan kerja yaitu mempunyai makna menjalin hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk upaya-upaya perubahan dalam masyarakat. Jaringan kerja ini merupakan peran pendamping yang dapat dibentuk dengan menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok lain seperti pekerja sosial, psikolog, petugas kesehatan dan lain-lain.

- Tukar pengalaman dan pengetahuan (*Sharing knowledge and experience*)
Pendamping mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan tugas-tugasnya. Mereka tidak mungkin berada pada posisi yang serba mengetahui. Mereka akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari pihak lain dalam masyarakat. Oleh karena itu peran pendamping adalah mengadakan *sharing* tentang pengetahuan dan pengalaman dengan pihak-pihak lain.

4. Peran Teknis (*Technical roles*)

Peran-peran teknik ini lebih mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat teknis. Dalam peran ini pendamping dituntut untuk tidak saja mampu mengorganisasi kelompok tapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis, pengumpulan data dan menganalisanya, penggunaan komputer, kemampuan presentasi verbal maupun tertulis, kemampuan dalam manajemen maupun pengendalian keuangan.

2.2.3 Proses Pendampingan

Menurut Adi (2003) proses pendampingan yang dilakukan oleh organisasi pelayanan masyarakat dimana antara kelompok yang satu dengan yang lain memang tampak ada beberapa perbedaan, tetapi secara umum tahapan yang dilakukan mencakup beberapa tahapan dibawah ini :

a. Tahapan persiapan (*engagement*)

Penyiapan petugas, diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubah mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Penyiapan petugas lebih diperlukan lagi bila tenaga petugas yang dipilih mempunyai latar belakang yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga perlu dilakukan pelatihan awal untuk menyamakan persepsi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang akan dikerjakan di daerah tersebut. Penyiapan lapangan yang juga dikenal dengan tahap *engagement*, petugas pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, harus mencoba jalur formal untuk mendapatkan perijinan dari pihak terkait, tetapi disamping itu petugas juga harus menjalin

kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Pada tahap inilah terjadi kontak awal dengan komunitas sasaran.

b. Tahapan Pengkajian (*assesment*)

Proses *assesment* dapat dilakukan dengan cara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah berusaha untuk mengidentifikasi masalah dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam melakukan *assesment* ini sebaiknya masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Disamping itu pada tahap ini petugas juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Petugas sebagai agen perubah (*change agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Program dan kegiatan yang akan mereka kembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Dalam proses ini petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan saat itu.

d. Tahap pemformulasian rencana aksi

Petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Tahap ini petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan

Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik

akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas pendamping dan warga masyarakat.

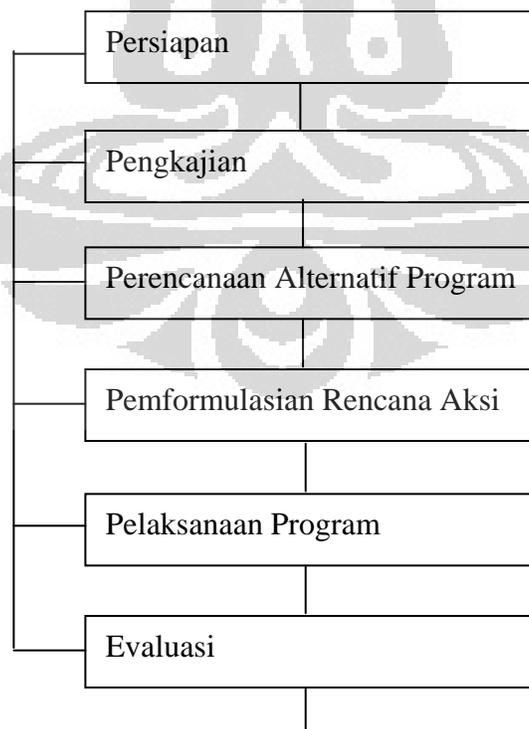
f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya melibatkan warga, dengan keterlibatan warga ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat dianggap sudah mandiri tetapi lebih karena waktu proyek sudah berakhir atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan.

Tahap-tahap tersebut diatas dalam pelaksanaannya sebenarnya bukanlah merupakan penjenjangan yang ketat, dalam arti setiap tahap harus diselesaikan dahulu sebelum memasuki tahap selanjutnya, tetapi pelaksanaan tahap-tahap tersebut berbentuk spiral, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Terminasi

Gambar 2.1 Tahapan Pendampingan, Adi (2003)

Berikut disajikan rangkuman konsep pendampingan ditinjau dari berbagai sumber :

Tabel 2.2 Rangkuman Terminologi Pendampingan

No.	Sumber	Tinjauan	Penjelasan
1.	Mubyarto	Sebagai fasilitator dan dinamisator	Seseorang atau sekelompok yang bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator
2.	Karjono	Sebagai suatu strategi pengembangan	Pendampingan adalah sebagai suatu strategi pengembangan diantara dua subjek, diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas ke arah yang lebih baik.
3.	Ismawan	Sebagai fasilitator atau mitra kelompok swadaya masyarakat	Mitra dan fasilitator yang membantu kelompok swadaya masyarakat melaksanakan agen-agennya dalam mencapai tujuannya sendiri
4.	Sumodiningrat	Sebagai suatu cara atau metode	<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping setempat yaitu tokoh-tokoh masyarakat • Pendamping teknis yang berasal dari tenaga penyuluh • Pendamping khusus dengan pembinaan yang khusus pula
5.	Ife	Sebagai peranan	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan fasilitatif

			<ul style="list-style-type: none"> • Peranan edukasional • Peranan representasional • Peranan teknis
6.	Jamal dkk	Perspektif fungsi dan teknik	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggal dilokasi sasaran • Memakai bahasa setempat • Tidak menggurui • Tidak mudah memberikan janji • Aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
7.	Midgley	Peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat	Pendamping memiliki peran penting dalam memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendamping berperan sebagai motivator dan <i>community organizers</i> .
8.	<i>The National Association of Countries the United States</i>	Peran dalam membuka akses ke berbagai sumber	Pendamping perlu menyampaikan informasi program melalui tokoh dan kelompok masyarakat serta generasi muda, menunjukkan peluang pengembangan dan perbaikan kondisi fisik, sosial dan ekonomi, memudahkan akses kelompok/organisasi masyarakat ke berbagai sumberdaya.
9.	UNDP	Kemampuan dalam menjalankan manajemen dan sikap demokratis	Pendamping perlu memiliki sikap dan kemampuan manajemen, sikap yang perlu adalah demokratis, terbuka, kebersamaan serta tanggap.
10.	Djatmiko	Kemampuan pendamping yang	Pendamping harus mampu memberikan tanggapan sehingga

		mampu memberikan tanggapan dan sikap netral	masyarakat memiliki kepercayaan sehingga kemampuan masyarakat dalam menyampaikan usul/masalah menjadi meningkat. Pendamping perlu menunjukkan sikap netral dalam melaksanakan tugas
11.	Adi	Sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap persiapan • Tahap assesment • Tahap perencanaan alternatif program • Tahap pemformulasian rencana aksi • Tahap pelaksanaan program atau kegiatan • Tahap evaluasi • Tahap terminasi

2.2.4 Konsep Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan

Konsep pendampingan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang digulirkan oleh Direktorat Pembinaan SMK adalah konsep pendampingan dengan mengadopsi sistem PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) yang ada di Perguruan Tinggi dimana mahasiswa maupun *fresh graduate* dari perguruan tinggi pelaksana melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah kejuruan yang ditentukan, yaitu sekolah-sekolah SMK yang masih kekurangan guru bidang produktif, sehingga pada pembahasan berikut akan dijelaskan konsep PPL yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan literatur dan pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh perguruan tinggi pelaksana :

a. Definisi PPL

Menurut Panduan PPL Universitas DR. Soetomo (Surabaya,2005) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan media bagi mahasiswa untuk

mengaplikasikan dasar profesi. Dalam fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Praktik Pengalaman Lapangan diaplikasikan dalam bentuk praktik mengajar dan kegiatan edukasional lainnya di lembaga sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan yang dilakukan mahasiswa merupakan salah satu wadah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman profesi yang dapat diandalkan sebagaimana tercantum pada Undang-undang profesi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 6 Desember tahun 2005 dimana guru ditetapkan sebagai profesi dengan demikian pekerjaan guru selain harus mempunyai nilai tawar yang tinggi seperti profesi dokter dan professional lainnya, guru harus mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan. Dalam PPL mahasiswa akan dihadapkan pada kondisi riil aplikasi bidang keilmuan, seperti: kemampuan mengajar, kemampuan bersosialisasi dan bernegosiasi, dan kemampuan manajerial kependidikan lainnya. PPL tidak hanya kegiatan mengajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa, tetapi juga menyangkut kemampuan berpartisipasi, membangun, atau mengembangkan potensi pendidikan dimana ia berlatih. Partisipasi tersebut dapat berupa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstra seperti pembuatan atau pengembangan majalah sekolah, teater, penulisan kreatif, kelompok diskusi dan sebagainya.

Menurut Hadiyanto (Bulletin UNP,1999) PPL kependidikan merupakan kegiatan pembekalan keterampilan membelajarkan siswa di sekolah latihan yang wajib diikuti mahasiswa calon guru sebagai persiapan untuk menjadi guru atau tenaga kependidikan. Dari program itu diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman-pengalaman keguruan yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas sebagai guru nantinya.

PPL merupakan ajang pelatihan untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dalam rangka pembentukan guru yang profesional. Dengan demikian PPL adalah suatu program yang mensyaratkan kemampuan aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berkaitan dengan jabatan keguruan, baik kegiatan mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya. Kegiatan PPL ini diarahkan dalam bentuk : pelatihan terbatas, pelatihan terbimbing, dan pelatihan mandiri. Semua

kegiatan ini harus terjadwal secara sistematis, dibawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong.

Dipandang dari sudut kurikulum, PPL adalah suatu program mata kuliah proses pembelajaran yang menjadi persyaratan dalam pendidikan prajabatan guru. PPL dirancang untuk menyiapkan mahasiswa calon guru agar memiliki atau menguasai kemampuan keguruan yang terpadu secara utuh, sehingga setelah mahasiswa tersebut menjadi guru, dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Dibandingkan dengan pelatihan prajabatan pada lembaga pelatihan lainnya, PPL hampir sama dengan pelatihan kerja. Kesamaannya, yaitu mempersiapkan para calon pengemban tugas agar mampu melaksanakan tugas-tugas rutin, dan peka terhadap kemungkinan dan kekurangannya. Dipandang dari isi, PPL adalah seperangkat komponen pelatihan prajabatan guru yang berlangsung dalam siklus teori-praktik secara berlapis dan berulang pada setiap langkah yang dipersyaratkan dalam program pelatihan tersebut. Setiap langkah dalam komponen pelatihan itu selalu mengacu pada teori yang telah dipelajari menuju kepada praktik pelaksanaan tugas. Selanjutnya teori dapat dibenarkan, diperbaiki atau ditolak berdasarkan efektivitas dan ketepatannya dalam praktik dan kondisi tertentu. (Panlak PPL Universitas Borneo,2008)

b. Tujuan PPL

Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut: memberikan wahana aplikasi keilmuan bagi mahasiswa, memberikan pengalaman profesional mahasiswa sebagai calon guru, sehingga benar-benar menjadi lulusan kependidikan yang siap terjun di masyarakat khususnya dunia kependidikan, menjalin kerjasama edukasional dengan lembaga sekolah sebagai mitra dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Pedoman PPL FKIP Unitomo,2005).

Menurut Stones dan Morris (1976) yang dikutip oleh Hadiyanto (Bulletin UNP,2008) bahwa praktek mengajar bertujuan agar mahasiswa calon guru:

- mengetahui tingkat pemahaman siswa di kelas, untuk mengetahui apakah mereka mampu melakukan kontak dan berkomunikasi dengan siswa dengan baik.
- untuk menyesuaikan pikiran mahasiswa calon guru dengan kenyataan praktis di lapangan, dan untuk menghubungkan apa yang telah mereka pelajari di bangku kuliah tentang konsep pengembangan anak agar mereka lebih jelas tentang tujuan pembelajaran yang mereka lakukan di kelas.
- untuk belajar menjadi lebih sensitif dengan situasi kelas dan belajar menciptakan situasi itu; serta untuk mengembangkan suasana kelas yang penuh dengan sumber belajar.
- untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa calon guru dalam melaksanakan observasi tentang proses pembelajaran.
- untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa calon guru dalam berkomunikasi yang baik dengan siswa.
- untuk membentuk minat mahasiswa calon guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan kemampuan untuk menghubungkannya dengan situasi nyata di kelas.
- untuk mendapatkan pemahaman mahasiswa calon guru tentang organisasi sekolah dan persiapan untuk menghadapi segala situasi dan kemampuan untuk melakukan analisisnya.
- untuk membentuk kematangan pribadi mahasiswa (misalnya kematangan hubungan sosial dengan siswa dan guru lainnya);
- memberi kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk mengevaluasi diri sendiri.
- memberi kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk memperoleh kesempatan dalam pembelajaran yang normal, sebagai bagian dari tim mengajar.
- memberikan pemahaman kepada mahasiswa calon guru tentang jaringan yang kompleks antara sekolah dengan kelas, lebih khusus adanya kesadaran dalam

menerima kenyataan bahwa hubungan kemanusiaan muncul dalam suasana itu;

- untuk melakukan diagnosis, karena tahun-tahun pertama praktek mengajar merupakan pengalaman berharga untuk diagnostik yang dilaksanakan sepanjang tahun.

Lebih lanjut Wang (1992) dalam Hadiyanto (Bulletin UNP,2008) menyebutkan bahwa PPL bermanfaat bagi mahasiswa calon guru karena:

(i) merupakan kesempatan untuk menguji prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan yang telah diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah.(ii) untuk mengetahui keberhasilan dalam mendidik siswa (dalam proses pembelajaran di kelas).(iii) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan tanggung jawab dan praktek menjadi guru yang sebenarnya di sekolah. (iv) untuk menguji cara-cara dan karakteristik yang ideal yang perlu dipunyai oleh seorang guru di sekolah.(v) untuk lebih menguasai kompetensi dan pengetahuan yang profesional.(vi) untuk memulai menumbuhkan minat dan keinginan calon guru dalam melakukan studi lebih lanjut di bidang pendidikan.

Dari beberapa pendapat diatas bisa diambil kesimpulan bahwa program PPL secara umum bertujuan untuk mempraktekan teori yang sudah diperoleh oleh mahasiswa selama berada di bangku kuliah serta menyiapkan mereka agar siap untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

c. Tahapan Pelaksanaan PPL

- **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan adalah suatu tahap dimana mahasiswa mempersiapkan diri sebelum melaksanakan praktik mengajar di sekolah. Pada tahap ini mahasiswa sudah memprogram dan lulus mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar/*Micro teaching*. *Micro teaching* adalah kegiatan latihan yang dilakukan saat mahasiswa menempuh mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar.

Adapun pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan *Micro teaching* yaitu :

1. *Microteaching* dilakukan saat mahasiswa menempuh mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar (2 SKS).
2. Selama Menempuh mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar atau *Microteaching*, setiap mahasiswa harus melakukan kegiatan mengajar lebih dari 6 (enam) kali.
3. Kegiatan *Microteaching* dibimbing oleh dosen mata kuliah Keterampilan dasar mengajar atau *Microteaching* dibantu tim PPL.
4. Kegiatan *Microteaching* dilakukan dengan pemanfaatan multi media (komputer, LCD, internet, dan media lain yang berhubungan dengan materi pembelajaran).

- **Tahapan Pembekalan**

Pada tahap pembekalan ini peserta mendapatkan pengarahan dari pihak perguruan tinggi yang antara lain berisi : Materi pengarahan berisi relevansi tuntutan sekolah dan materi umum tentang perkembangan teoritis dan praktis, masalah administrasi di sekolah dan tata tertib dan masalah profesi keguruan.

- **Tahapan Pelaksanaan**

Menurut Panlak PPL (Universitas Borneo,2008) Materi pokok di dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Materi pokok yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan mengajar dan tugas-tugas keguruan lainnya secara terbimbing.

Dalam tahap pelatihan secara nyata ada dua materi pokok yang diberikan dalam pelatihan secara terbimbing, yaitu :

(1). Materi Pokok dalam Pelatihan mengajar terbimbing

Pelatihan ketrampilan mengajar terbimbing adalah salah satu materi pelatihan dalam PPL yang mengupayakan Mahasiswa calon guru dapat menerapkan kemampuan mengajar secara utuh dan terintegrasi melalui pembelajaran bidang studi speialisasinya, dengan bimbingan yang intensif dari Guru Pamong dan Dosen Pembimbing.

Materi dalam mengajar terbimbing adalah :

a. Penyusunan program tahunan, semester dan harian.

- b. Pengembangan materi, media dan sumber belajar.
- c. Penyusunan SP/RPP.
- d. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
- e. Pelaksanaan penilaian/evaluasi hasil belajar.

(2).Materi Pokok yang berkaitan dengan ketrampilan mengajar di depan kelas :

- a. Pengelolaan tugas rutin, fasilitas belajar dan waktu.
- b. Penggunaan strategi pembelajaran.
- c. Kemampuan berkomunikasi dengan siswa.
- d. Kemampuan mendemonstrasikan khasanah metode mengajar.
- e. Kemampuan mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya antara topik dan ilmu pengetahuan lain.
- f. Kesan umum rencana pembelajaran baik tentang kebersihan dan kerapian maupun tentang penggunaan bahasa tulis.
- g. Kemampuan untuk tampil dengan menggunakan bahasa dan perilaku yang tepat.

(3).Materi pokok kemampuan untuk mengadakan hubungan antar pribadi dengan siswa dan orang lain, meliputi :

- a. Penumbuhan sikap positif siswa.
- b. Keterbukaan dan keluwesan terhadap siswa dan orang lain.
- c. Kegairahan dan kesungguhan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan dalam pelajaran yang diajarkan.
- d. Pengelolaan interaksi dan perilaku dalam kelas.

(4). Materi pokok dalam tugas-tugas keguruan lainnya secara terbimbing.

Guru yang berhasil dalam tugasnya, tidak hanya memahami dan terampil dalam mengajarkan materi pelajaran bidang keahliannya, melainkan juga harus memahami dan terampil melaksanakan materi pokok yang berkaitan dengan tugas-tugas keguruan lainnya. Pelatihan ketrampilan tugas-tugas keguruan lainnya adalah pelatihan di luar dari kegiatan mengajar di kelas, yaitu :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan administrasi guru bidang studi.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan bimbingan belajar bidang studi.

- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan OSIS, PMR, Pramuka, Kesenian, Olah Raga dan lain-lain.

b. Materi pokok yang berkaitan dengan latihan mandiri

Pelatihan mandiri secara konseptual dapat ditahapkan menjadi dua tahap, yaitu pelatihan yang dikelola sendiri (*self-managed practice*) dan pelatihan yang diprakarsai sendiri (*self-initiated practice*). Pelatihan yang dikelola sendiri sangat mirip dengan penugasan terstruktur dalam konsep sistem kredit semester yang berlaku, yaitu tugas yang ditetapkan oleh pembimbing dan pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa.

Sedangkan pelatihan yang diprakarsai sendiri, mahasiswa sebagian besar kegiatannya dilepas, sehingga mahasiswa harus menetapkan sendiri tugas, pelaksanaan, dan cara penilaian/evaluasi hasil belajar. Namun demikian pembimbing tetap bertanggung jawab atas terjadinya proses pelatihan sebagaimana mestinya. Adapun materi pokok pelatihan mandiri sama saja dengan materi pokok dalam pelatihan terbimbing.

Sedangkan Menurut Hadiyanto (Bulletin UNP, 2008) pelaksanaan PPL dilapangan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

No	Step Kegiatan	Keterangan Kegiatan
1	Orientasi di sekolah	Mahasiswa berkenalan dengan civitas sekolah dan melakukan observasi umum tentang fasilitas sekolah. Orientasi biasanya dilakukan dengan membuat permainan yang melibatkan mahasiswa dan guru pamong. Ide utamanya adalah agar guru pamong dan mahasiswa saling mengenal dan cepat akrab.
2	Mulai <i>Co teaching</i>	Mahasiswa bersama-sama guru pamong membuat persiapan belajar mengajar, kadang-kadang mengajar bersama dengan guru pamong

3	<i>Guided teaching I</i>	Mengajar dengan bimbingan guru pamong untuk hal-hal tertentu
4	Melanjutkan <i>Co teaching</i>	Melakukan kegiatan lanjutan co teaching; mengkaji balikan guided teaching pertama dan merencanakan untuk guided teaching kedua
5	<i>Guided Teaching II</i>	Mengajar dengan bimbingan guru pamong untuk hal-hal tertentu
6	Melanjutkan <i>Co teaching</i>	Melakukan kegiatan lanjutan co teaching
7	Liburan sekolah	
8	Melanjutkan <i>Co Teaching</i>	Melakukan kegiatan lanjutan co teaching dan membuat rencana untuk lead teaching
9	<i>Lead teaching</i>	mahasiswa mengajar di kelas tanpa diamati atau diawasi oleh guru pamong, persiapan mengajar dan pengaturan waktu poses belajar mengajar adalah tanggung jawab mahasiswa sendiri
10	Membuat laporan (project)	Laporan dibuat khusus dikaitkan dengan matakuliah

- **Tahapan Evaluasi**

Secara umum evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi program pengalaman lapangan dan evaluasi untuk mahasiswa yang telah melakukan praktek mengajar di sekolah. Adapun kriteria evaluasi (Panlak PPL FKIP Unitomo,2005) :

1. Aspek-aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan PPL antara lain :

(i) Proses persiapan mengajar, kesesuaian SAP dengan prinsip kurikulum yang berlaku dan teori-teori mutakhir. (ii) kemampuan membuka pelajaran, (iii) kemampuan mengelola kelas dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Proses Belajar Mengajar, (iv) keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik lain dan ekstra kurikuler, (v) laporan mahasiswa tentang pelaksanaan PPL.

2. Alat Evaluasi PPL:

(i) Lembar observasi praktik, (ii) pedoman tentang penulisan laporan PPL, (iii) portofolio atau catatan khusus yang dibuat oleh guru pamong tentang kognisi, afeksi, dan psikomotor setiap mahasiswa yang melakukan praktik.

3. Pihak yang melakukan evaluasi (penilaian) dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan adalah: (i) Guru pamong yang ditentukan oleh pihak sekolah, (ii) dosen Pembimbing yang ditentukan oleh tim PPL.

d. Unsur-unsur yang terlibat dalam PPL

- Mahasiswa PPL

Pelaksanaan PPL adalah masa transisi mahasiswa menjadi calon guru. Untuk mencapai kondisi ini seorang mahasiswa PPL harus mengetahui dan memahami materi bidang studi dan cara mengajarkannya, mampu bekerja sama dengan siswa, mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik serta bekerja dan belajar tentang sekolah dan profesi guru.

- Dosen Pembimbing PPL

Tugas utama dosen pembimbing adalah mengadakan komunikasi dengan mahasiswa, mendukung proses pembelajaran mahasiswa, mencatat perkembangan belajar mahasiswa, mengadakan pertemuan, dan melakukan observasi ke sekolah-sekolah latihan.

1. Membimbing pembuatan rencana pembelajaran
2. Membimbing metode-metode dan teknik pembelajaran
3. Meninjau pelaksanaan PPL di sekolah

4. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPL (memberikan penilaian kepada mahasiswa)

- **Guru Pamong**

Guru pamong ditentukan oleh sekolah masing-masing. Guru pamong memiliki hak penuh terhadap mahasiswa yang melakukan PPL, adapun tugas guru pamong yaitu : membimbing pembuatan rencana pembelajaran, mengatur jadwal pelaksanaan pembelajaran oleh mahasiswa (praktik mengajar), mengatur pembagian tugas mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, melakukan evaluasi terhadap mahasiswa (memberi penilaian). (*Panduan PPL Univ.DR. Soetomo,2005*)

2.3. Konsep Pendidikan

Dalam tesis ini berkaitan dengan evaluasi program dalam dunia pendidikan dan lebih khusus pendidikan kejuruan sehingga pada bagian berikut akan dijelaskan berbagai definisi pendidikan secara umum serta definisi dan karakter pendidikan kejuruan

2.3.1 Definisi pendidikan menurut bahasa (etimologi)

1. Bahasa Yunani :

berasal dari kata Pedagogi, yaitu dari kata “paid” artinya anak dan “agogos” artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai “ilmu dan seni mengajar anak (*the art and science of teaching children*).

2. Bahasa Romawi :

berasal dari *kataeducare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia.

3. Bangsa Jerman :

berasal dari kata *erziehung* yang setara dengan *educare*, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak.

2.3.2 Menurut para ahli pendidikan

1. Menurut para ahli, definisi pendidikan adalah "Berbagai upaya dan usaha yang dilakukan orang dewasa untuk mendidik nalar peserta didik dan mengatur moral mereka".
2. Langefeld : Mendidik adalah membimbing anak dalam mencapai kedewasaan
3. Heageveld : Mendidik adalah membantu anak dalam mencapai kedewasaan
4. Bojonegoro : Mendidik adalah memberi tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai tercapai kedewasaan
5. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
6. Rosseau : Mendidik adalah memberikan pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, tapi dibutuhkan pada masa dewasa.
7. Darmaningtyas mengatakan tentang definisi pendidikan yaitu pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik.
8. Paulo Freire ia mengatakan, pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa dimana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka.

(Warta Politeknik Negeri Jakarta, April 2007)

2.3.3 Menurut kamus dan ensiklopedi

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia :
"Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, pembuatan mendidik;"
2. Ensiklopedi Wikipedia:
Education is a social science that encompasses teaching and learning specific knowledge, beliefs, and skills. The word education is derived from the Latin educare meaning "to raise", "to bring up", "to train", "to rear", via "educatio/nis", bringing up, raising.

(Pendidikan adalah ilmu sosial yang mencakup pengajaran dan pembelajaran pengetahuan khusus, keyakinan, dan keterampilan. Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu 'Educare' yang berarti "meningkatkan", "untuk membuka", "untuk melatih", "untuk belakang", melalui "educatio / nis", membesarkan, mengangkat)

3. Dalam *Dictionary of Education* dikatakan bahwa pendidikan adalah :

- Proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk – bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup.
- Proses sosial dimana orang diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol khususnya yang datang dari sekolah, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum

Dalam hal ini pendidikan tidak dipandang hanya sebagai usaha pemberian informasi dan ketrampilan saja namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga pola hidup pribadi dan sosial memuaskan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap individu serta kebudayaan suatu masyarakat.

2.4. Konsep Pendidikan Kejuruan

Pada penelitian ini sangat berkaitan erat dengan pendidikan kejuruan dimana pendampingan yang dilakukan oleh para peserta dilakukan di sekolah-sekolah kejuruan dan menjadi guru produktif di sekolah tersebut, untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan definisi pendidikan kejuruan, konsep serta tujuan pendidikan kejuruan.

2.4.1 Definisi Pendidikan Kejuruan

Berbagai definisi pendidikan kejuruan menurut para pakar pendidikan yang dirangkum oleh Johar Maknun (2008) :

- Evan (1978) : *'Part of education which makes an individual more employable in one group of occupations than in another'*

(Bagian dari pendidikan yang membuat individu lebih dipekerjakan dalam satu kelompok pekerjaan daripada di tempat lain)

- Good (1959) : *'A program of education below college grade organize to prepare the learner for entrance into particular chosen vocation or to upgrade employed workers'*

(Sebuah program pendidikan di bawah level perguruan tinggi yang mengatur untuk mempersiapkan pelajar untuk masuk ke pendidikan kejuruan tertentu yang dipilih atau untuk pekerja yang akan meningkatkan kemampuan pekerjaannya)

- Harris (1960) : *' Vocational education is education for work any kind of work which individual finds congenial and for which society has need, Vocational education in specialized education as distinguished from general education'*.

(Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk dalam beberapa jenis pekerjaan yang menyenangkan untuk individu dan untuk kebutuhan masyarakat, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan khusus yang dibedakan dari pendidikan umum)

- American Vocational Association (1960) : *' Vocational education as education designed to develop skills, abilities, understandings, attitudes, workhabbits, and appreciation needed by worker to enter and make progress in employments on a usefull and productive basic'*.

(Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, pemahaman, perilaku, sikap kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja untuk masuk dan membuat kemajuan dalam pekerjaan pada hal bermanfaat dan produktif dasar)

- Thomson : *'Vocational education is any education that provides experiences, visual stimuli, affective awareness, cognitive information or psychomotor*

skills, and that enhances the vocational development process of exploring, establishing and maintaining one self in the world off work'

(Pendidikan kejuruan adalah setiap pendidikan yang menyediakan pengalaman, rangsangan visual, kesadaran afektif, informasi atau keterampilan kognitif psikomotor, dan yang meningkatkan proses pengembangan kejuruan, membangun dan mempertahankan dirinya di dalam dunia kerja).

2.4.2 Prinsip-prinsip Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan formal untuk jenjang pendidikan menengah yang bermaksud menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja tingkat menengah tertentu yang sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja dan memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena pendidikan kejuruan pada dasarnya mengarahkan peserta didik pada bidang tertentu melalui suatu organisasi, sehingga hasil pendidikan ini dapat dipakai sebagai bekal mencari kehidupan atau nafkah. Pendidikan ini dapat juga dinamakan *'education for earning a living'*.

Sedangkan Miller dalam Maknun (2008) : memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang digolongkan dalam 10 prinsip yaitu :

1. Bimbingan merupakan komponen pendidikan kejuruan yang penting
Bimbingan merupakan unsur penting dalam pendidikan kejuruan dan lebih jauh dari itu dengan bimbingan melalui pendidikan kejuruan dapat memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat dalam rangka hidup dan kehidupannya.
2. Belajar seumur hidup dipromosikan melalui pendidikan kejuruan
Prinsip belajar seumur hidup atau secara terus menerus dapat ditingkatkan melalui pendidikan kejuruan. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan zaman melalui pendidikan kejuruan masyarakat akan selalu dapat menyesuaikan, mengantisipasi dan adaptif.

3. Kebutuhan masyarakat dicerminkan oleh program pendidikan kejuruan
Segala kebutuhan masyarakat akan terpenuhi baik dari kepentingan individu, masyarakat, maupun nasional. Hal ini tergambar dari Presiden *National Metal Trades Association* :
Kebutuhan dari pendidikan kejuruan di Amerika sangat besar, efisiensi industri masa depan secara hebat dapat berkembang melalui sistem pelatihan kejuruan (*vocational training*)
4. Pendidikan kejuruan terbuka bagi umum
Pendidikan ini terbuka untuk semua masyarakat tanpa kecuali, tanpa membedakan yang kaya atau miskin, pria ataupun wanita. Pendidikan kejuruan memberikan kebebasan individu/masyarakat untuk menentukan alternatif pilihan pendidikannya maupun keahliannya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki.
5. Penempatan di dalam langkah berikutnya adalah suatu tanggung jawab pendidikan kejuruan
Pendidikan kejuruan lebih bertanggung jawab dalam mencetak dan membentuk individu/masyarakat untuk dapat menduduki atau menempati di dalam berbagai bidang pekerjaan atau jabatan di dalam hidupnya. Asumsi dari pernyataan ini dikemukakan oleh Miller sebagai berikut : ”Pendidikan kejuruan secara umum kurang lebih merupakan format penawaran bimbingan lapangan kerja dan tindakan penempatan tenaga kerja untuk lulusan mereka”.
6. Perbedaan peran pendidikan jenis kelamin dipromosikan melalui pendidikan kejuruan
Melalui pendidikan kejuruan dapat menghilangkan anggapan yang salah terhadap pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan kejuruan hanya untuk kaum pria saja. Sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan kejuruan tidak membedakan kaum pria dan wanita, memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Prinsip ini pada kenyataannya di dunia usaha/dunia industri banyak memerlukan tenaga kerja baik pria maupun wanita dengan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai. Bahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu malah membutuhkan tingkat ketelitian,

kesabaran, kecermatan maupun kehalusan yang tinggi yang hal ini memerlukan tenaga wanita yang berasal dari pendidikan kejuruan.

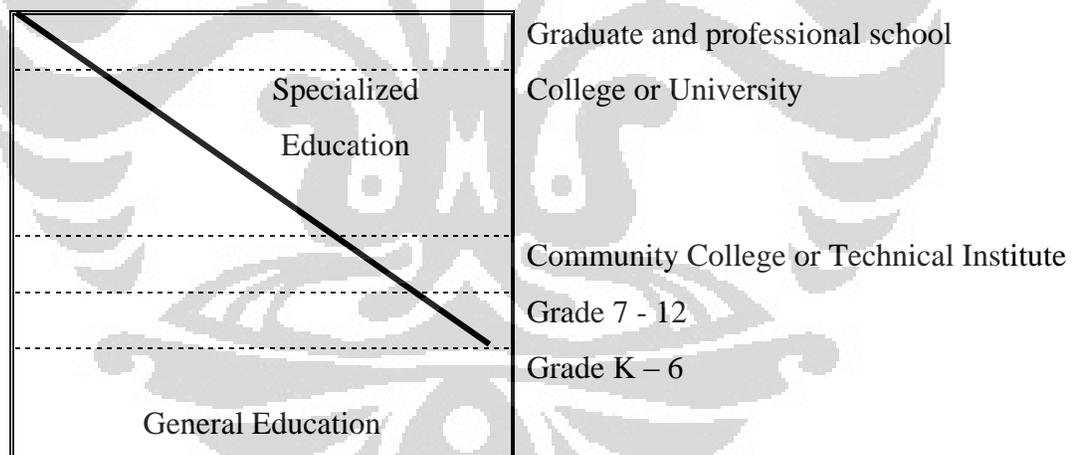
7. Individu dengan kebutuhan khusus dilayani dengan pendidikan kejuruan
Setiap individu/masyarakat mempunyai keinginan atau kebutuhan yang khusus yang saling berbeda dengan yang lainnya. Pendidikan kejuruan menawarkan berbagai program sesuai dengan kebutuhan tersebut.
8. Organisasi siswa adalah suatu corak pendidikan kejuruan integral
Melalui pendidikan kejuruan dapat dibentuk berbagai macam kelompok peserta didik yang terorganisir secara melembaga. Dalam pendidikan kejuruan dapat dibedakan antara lain : pendidikan/sekolah teknik, bidang kedokteran, bisnis, ekonomi, pertanian, kehutanan, industri management dan lain sebagainya.
9. Guru dalam pendidikan kejuruan merupakan komponen guru profesi dan guru jabatan
Guru merupakan komponen utama dalam pendidikan kejuruan, di samping komponen lain yang harus ada, seperti :
 - a. Guru harus berkompeten secara khusus di bidang yang akan diajar
 - b. Guru harus mengetahui bagaimana cara memberi pengajaran
 - c. Guru harus berhadapan dengan suatu kelompok permasalahan yang melibatkan pengetahuan siswa dan bisa dihadapi secara khusus.
 - d. Guru harus mempunyai suatu pengalaman mendidik yang luas
10. Suatu etos kerja (*work ethic*) dipromosikan melalui pendidikan kejuruan.
Etos dapat diinterpretasikan sebagai kebiasaan, kecenderungan modal, sikap terhadap sesuatu atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Jadi etos kerja dapat diartikan sebagai kebiasaan kerja, kecenderungan modal kerja atau pandangan hidup tentang kerja, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi etos kerja seseorang akan semakin tinggi dalam prestasi kerjanya. Melalui pendidikan kejuruan seseorang dapat meningkatkan etos kerjanya, prestasi kerjanya dan akhirnya dapat menunjukkan produktivitasnya yang tinggi. Oleh karena itu dalam pendidikan kejuruan disamping menekankan skill tetapi juga

segi afektif dan *knowledge* pada umumnya. Dimana pada pendidikan non kejuruan tidak akan di jumpai.

Pendidikan kejuruan dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan khusus (*specialized education*) karena kelompok pelajaran atau program yang disediakan hanya dipilih oleh orang-orang yang memiliki minat khusus untuk mempersiapkan dirinya bagi lapangan kerja di masa mendatang. Agar lapangan kerja khusus ini dapat sukses, maka pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan di masyarakat. Ada tiga istilah sehubungan dengan pendidikan khusus ini, yaitu pendidikan teknologi (*technical education*), pendidikan kejuruan (*vocational education*) dan pendidikan karir (*career education*).

Pendidikan karir mempunyai arti yang lebih luas dari pendidikan khusus. Pendidikan karir merupakan proses pengembangan sejak masa kanak-kanak, yakni pada waktu mereka menduduki taman kanak-kanak.

Dibawah ini dijelaskan konsep pendidikan kejuruan yang ada di Amerika Serikat :



Gambar 2.2 : Konsep Pendidikan Kejuruan di USA

Prinsip pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai generalisasi untuk menyiapkan dan melayani bagi program dan konstruksi kurikulum, evaluasi, seleksi praktek instruksional dan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain : para praktisi pendidikan kejuruan dapat merencanakan/membuat program dan kurikulum pendidikan, evaluasi dan proses pembelajaran maupun kebijaksanaan lain yang

dikembangkan berdasarkan kepentingan dan perkembangan zaman atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.4.3 Tujuan Pendidikan Kejuruan

Banyak rumusan pendidikan dalam menjelaskan tentang tujuan pendidikan kejuruan, diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Rupert Evans dalam Wardiman (1998) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan bertujuan untuk :

- a. Memenuhi masyarakat akan tenaga kerja
- b. Meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu
- c. Mendorong motivasi untuk terus belajar

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 merumuskan bahwa “*Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional*”.

Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0409/U/1990 sebagai berikut : mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih dan atau meluaskan pendidikan dasar; meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan timbal balik dengan lingkungan social, budaya dan sekitarnya; meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian; menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional.

Dua rumusan tersebut mengandung kesamaan yaitu mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan Negara.

2.5. Konsep Pelaksanaan/Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Selanjutnya implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup "*a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps*". Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik disebut "*policy delivery system*" (system penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Uraian tersebut menggambarkan demikian pentingnya peranan implementasi dalam menjabarkan strategi yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Hal tersebut akan merupakan suatu batu penguji kemampuan seorang manajer dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai suatu perubahan, memberi dorongan kepada orang-orang yang dipimpinnya, membangun dan memantapkan kompetensi serta kemampuan kompetitif mereka, menciptakan dan mematangkan strategi –yang mendukung iklim kerja, dan mencapai atau meraih kinerja yang ditargetkan. Inisiatif menempatkan strategi yang telah ditetapkan ini harus disampaikan dan dikelola secara cerdas di jajaran organisasi terdepan. Dalam implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006;139), mendefinisikan implementasi sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.
(<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan
- Adanya hasil kegiatan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.6. Konsep Evaluasi Program CIPP

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan

menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan,

Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan para ahli. Salah satunya adalah model CIPP (*context – input – process – product*). Model ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawan di Ohio State University (1991), dimana keempat model evaluasi tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan keseluruhannya, keunikan dari model-model tersebut adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan dan operasi sebuah program.

a. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu, relevansi dan keterkaitan program, pada evaluasi konteks merupakan tahapan yang paling mendasar yang memiliki misi untuk menyediakan suatu rasional/landasan untuk penentuan tujuan.

b. Evaluasi Input

Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan waktu dan penjadwalan.

c. Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas. Tujuan utama evaluasi proses yaitu : mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan, memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, dan memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan.

d. Evaluasi Produk

Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan di administrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Evaluasi produk merupakan tahap akhir yang berfungsi untuk membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan dalam analisis hasil yang diperlukan sebagai perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan program yang dicapai.

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dimana program tersebut dilihat tingkat keberhasilannya ditinjau dari aspek konteks, input, proses dan produk dengan menggunakan metode Evaluasi CIPP sebagai berikut :

- a. Aspek konteks, pada aspek ini dilihat hubungan antara tujuan program dengan stakeholder yang terlibat yaitu Direktorat Pembinaan SMK, Institusi pelaksana dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- b. Aspek input, meliputi panduan pelaksanaan dan kerangka acuan kerja (KAK), organisasi dan manajemen, peserta program serta SMK sasaran.
- c. Aspek proses, meliputi proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Direktorat SMK dan institusi pelaksana, seleksi dan penetapan, kegiatan pembekalan, supervisi, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dan serta pelaporan.
- d. Aspek produk, meliputi kegiatan *teaching* dan *non-teaching*

Matrik kerangka evaluasi program sebagai indikator keberhasilan atau pencapaian program dilihat dari aspek konteks, input, proses dan produk pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Matrik Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Program
Pendampingan dengan model CIPP

No	Aspek	Komponen	Indikator Keberhasilan Program	Informan/Sumber

No	Aspek	Komponen	Indikator Keberhasilan Program	Informan/Sumber
1	Context	Latar belakang dan Relevansi Program	Adanya relevansi program dengan pihak terkait (Dit. PSMK, Perguruan Tinggi, dan SMK)	Direktorat Pembinaan SMK ,Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah, Dokumen
2	Input	Panlak/KAK	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Panlak/KAK • Adanya buku panduan dari Direktorat PSMK dan Perguruan Tinggi yang lengkap 	Direktorat Pembinaan SMK , Perguruan Tinggi, Kepala sekolah, Dokumen terkait
		Organisasi/Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi terakreditasi di Kemdiknas • Perguruan Tinggi Memiliki Program PPL atau yang sejenis • Perguruan Tinggi memiliki Program Studi sesuai dengan Program Keahlian yang ada di SMK • Adanya sarana dan prasarana yang memadai • Perguruan Tinggi memiliki SDM yang memadai • Adanya tim pelaksana Pendampingan di Perguruan Tinggi • Adanya mekanisme dan 	Direktorat Pembinaan SMK, Perguruan Tinggi, Dokumen terkait

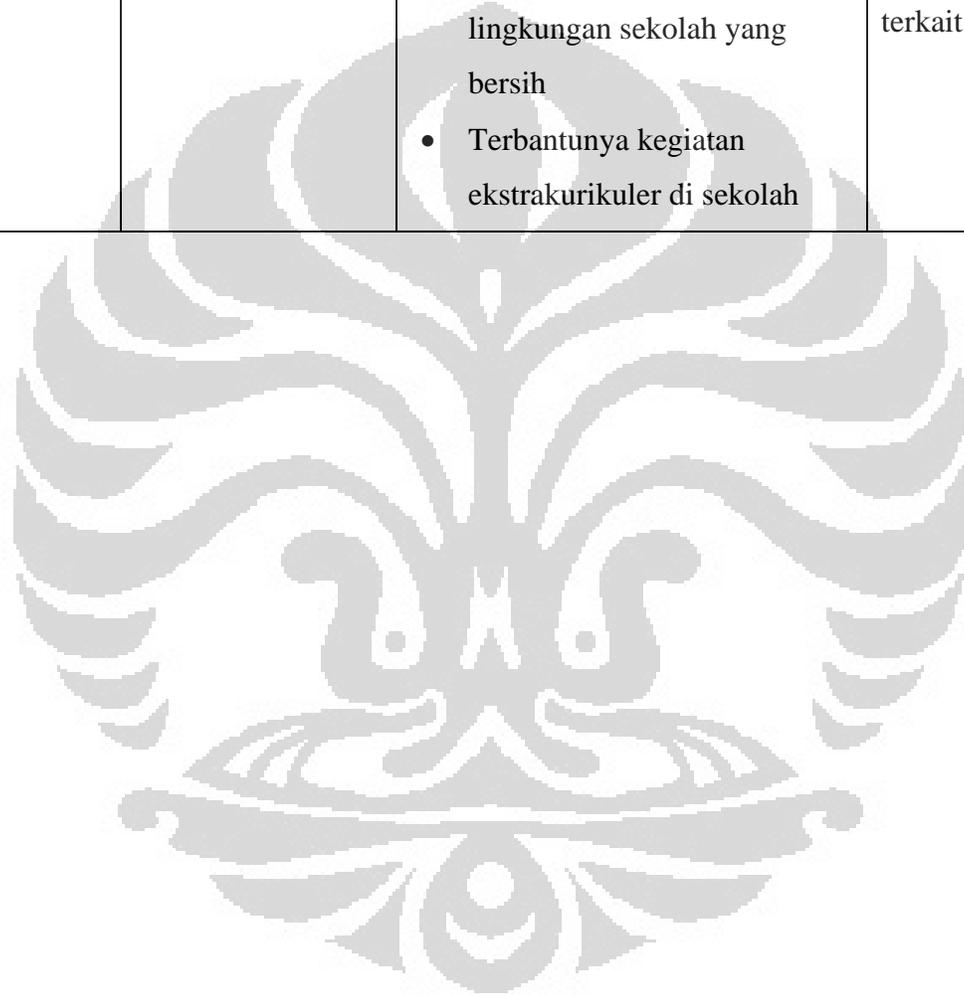
No	Aspek	Komponen	Indikator Keberhasilan Program	Informan/Sumber
			pembagian kerja di Perguruan Tinggi	
		Kriteria Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Terdaftar sebagai mahasiswa atau alumni yang masih <i>fresh graduate</i> • Telah menempuh minimal 110 SKS • Telah lulus mata kuliah Pengajaran Mikro atau yang ekuivalen • Program studi sesuai dengan program keahlian yang di butuhkan SMK sasaran • Bersedia ditempatkan di SMK yang ditetapkan oleh 	Perguruan Tinggi, Peserta, Dokumen Terkait

No	Aspek	Komponen	Indikator Keberhasilan Program	Informan/Sumber
			Direktorat Pembinaan SMK	
		Kriteria SMK	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan sekolah negeri • Masih kekurangan tenaga Pendidik bidang produktif • Merupakan sekolah Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2005 dan setelahnya 	Direktorat PSMK, Kepala Sekolah, Guru pamong, Dokumen terkait
3	Proses	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sosialisasi dari pihak Direktorat Pembinaan SMK ke Perguruan Tinggi • Adanya sosialisasi dari Pihak Perguruan Tinggi ke peserta 	Direktorat PSMK, Perguruan Tinggi, Peserta, Dokumen terkait
		Seleksi dan Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tim seleksi dan instrumen • Adanya mekanisme seleksi dan penetapan • Adanya penetapan lokasi 	Direktorat PSMK, Tim Pelaksana PT, Dokumen terkait
		Pembekalan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pembekalan oleh Perguruan Tinggi • Tersampainya program pendampingan, kebijakan Direktorat PSMK dan materi manajemen sekolah ke peserta program pendampingan 	Tim Pelaksana PT, Peserta Program, Dokumen terkait

No	Aspek	Komponen	Indikator Keberhasilan Program	Informan/Sumber
		Supervisi	<ul style="list-style-type: none"> • Termonitornya keberadaan peserta di lokasi SMK • Adanya <i>progress report</i> dari peserta 	Tim Pelaksana PT , Dokumen terkait
		Waktu Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu pelaksanaan program sesuai dengan Tahun Pelajaran di sekolah • Waktu pelaksanaan program sesuai dengan Tahun akademik yang ada di Perguruan Tinggi pelaksana • Jangka waktu pelaksanaan program sesuai dengan Tahun Pelajaran dan proses kegiatan belajar-mengajar yang ada di sekolah 	Direkorat PSMK, Tim Pelaksana PT, Kepala SMK, Dokumen terkait
		Pemanfaatan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Tersalurkannya dana dari Direktorat PSMK ke Rekening Perguruan Tinggi dengan tepat waktu • Kesesuaian penggunaan dana oleh Perguruan Tinggi dengan juklak • Tercukupinya dana yang diberikan Perguruan Tinggi ke peserta 	Direkorat PSMK, Tim Pelaksana PT, Dokumen terkait

No	Aspek	Komponen	Indikator Keberhasilan Program	Informan/Sumber
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>inception report</i> dari perguruan tinggi pelaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan • Adanya <i>progress report</i> dari perguruan tinggi pelaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan • Adanya <i>final report</i> dan laporan pertanggungjawaban dana dari perguruan tinggi pelaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan • Adanya laporan foto dokumentasi kegiatan peserta di SMK sesuai dengan waktu yang ditentukan 	Direktorat PSMK, Tim Pelaksana PT , Peserta, Dokumen terkait
4	Product	Teaching	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya guru produktif yang mengajar sesuai dengan program keahlian di sekolah • Adanya Perangkat Pembelajaran untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah • Terbantunya proses KBM di sekolah 	Koordinator Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah, Guru Pamong, Peserta, Dokumen terkait

No	Aspek	Komponen	Indikator Keberhasilan Program	Informan/Sumber
		Non-teaching	<ul style="list-style-type: none"> • Terbantunya proses administrasi di SMK • Adanya penataan perpustakaan SMK • Terbantunya penataan lingkungan sekolah yang bersih • Terbantunya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 	Koordinator Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah, Peserta, Guru Pamong, Dokumen terkait



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan kejuruan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mengambil studi kasus di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, oleh karena itu tipe penelitian yang sesuai untuk digunakan adalah penelitian evaluasi. Adapun konsep tentang evaluasi, tujuan dan jenisnya sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2001) penelitian kualitatif adalah merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini dipilih karena obyek penelitian dipandang sebagai individu/kelompok secara utuh. Menurut Prasetya Irawan (2006:50) metode penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan dengan data yang murni kualitatif. Bersifat deskriptif adalah berupa gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan sample. Temuan dalam penelitian kualitatif bersifat kasuistik, unik dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke konteks lain. Generalisasi dalam penelitian kualitatif tetap ada tapi berbeda dari generalisasi di penelitian kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi proses pelaksanaan program pendampingan SMK yang dilaksanakan oleh Universitas Sebelas Maret, disamping metode tersebut lebih fleksibel untuk memotret suatu obyek penelitian. Menurut Neuman (1997) dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan dapat menemukan suatu pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap suatu gejala secara induktif, dalam penelitian

kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber primer, observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

3.3. Tipe Evaluasi

Tipe evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe evaluasi formatif mengingat program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan terus dilaksanakan seiring dengan kebijakan pembalikan rasio jumlah siswa SMK dengan jumlah siswa SMA. Evaluasi formatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan secara menyeluruh juga sebagai bahan masukan bagi Direktorat Pembinaan SMK sebagai pembuat kebijakan dan juga bagi Institusi pelaksana untuk perbaikan program di waktu berikutnya.

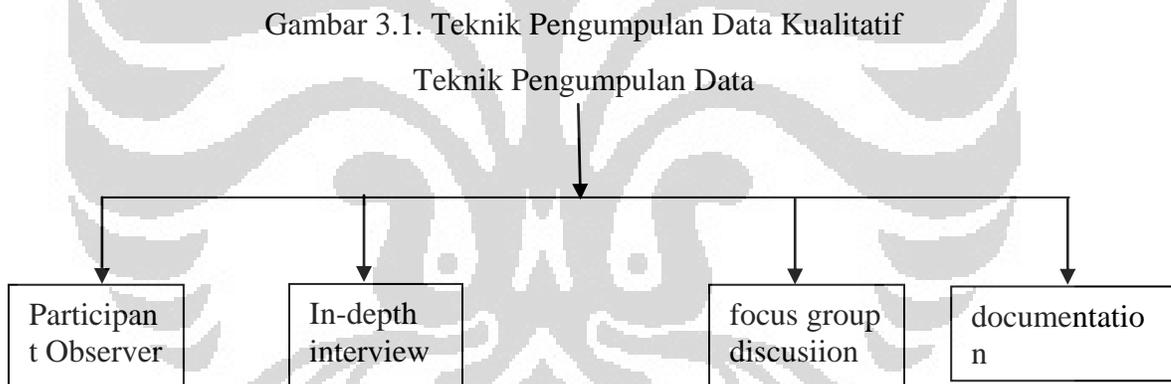
3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Pembinaan SMK, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, di Universitas Sebelas Maret Kampus Pabelan Jalan A. Yani 200 Surakarta sebagai institusi pelaksana serta mendapatkan informasi dan data secara langsung, dilakukan kunjungan ke sekolah yang menjadi sasaran program untuk melakukan wawancara dan pengamatan, ke-4 sekolah yang dikunjungi yaitu : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sawit Boyolali, Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kemusu Boyolali, Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sukoharjo, Jawa Tengah dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Miri, Sragen, Jawa Tengah. Di sekolah tersebut dilakukan pengamatan langsung serta wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru pamong.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan fase terpenting dari suatu penelitian. Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam suatu penelitian dimana tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mengetahui data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan skunder. Sumber primer langsung memberikan data dan informasi kepada pihak pengumpul data sedangkan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data dan informasi kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.

Berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ditunjukkan pada gambar berikut :



3.5.1 Pengumpulan Data Primer

Pada penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan *focus group discussion*.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi dan percakapan antara peneliti dengan informan dengan maksud menghimpun informasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman

wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan informan yang diperlukan,. Informan merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Penetapan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mengetahui tentang informasi yang ingin diperoleh. Informan yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pertanyaan yang diajukan, selain itu informan dianggap mengetahui dan memahami kondisi nyata dilapangan. Adapun unsur-unsur informan yang dilibatkan serta aspek yang digali adalah sebagai berikut :

- Pejabat Direktorat Pembinaan SMK, adapun informasi yang digali berkaitan dengan : latar belakang dan relevansi program, ketersediaan juklak dan panduan pelaksanaan, organisasi dan manajemen program, kriteria sekolah yang menjadi sasaran program, proses sosialisasi, seleksi dan penetapan perguruan tinggi pelaksana, seleksi dan penetapan lokasi sekolah, pelaporan oleh perguruan tinggi pelaksana, waktu pelaksanaan program serta pemanfaatan dana
- Koordinator Program di Perguruan Tinggi, adapun informasi yang digali berkaitan dengan : latar belakang dan relevansi program, ketersediaan juklak dan panduan pelaksanaan, organisasi dan manajemen program, kriteria peserta, sosialisasi program, seleksi dan penetapan peserta, seleksi dan penetapan lokasi sekolah, pelaksanaan pembekalan, proses keberangkatan, pelaksanaan supervisi, pelaporan oleh perguruan tinggi, waktu pelaksanaan program dan pemanfaatan dana.
- Dosen Pembimbing Lapangan, adapun informasi yang digali berkaitan dengan : proses keberangkatan peserta ke sekolah, pelaksanaan supervisi serta kompetensi peserta.
- Bendahara program, informasi yang digali berkaitan dengan : pengelolaan keuangan serta kondisi sarana dan prasarana pendukung.
- Peserta program, untuk informasi yang digali dilakukan dengan metode FGD yang akan di jelaskan pada bagian selanjutnya.
- Kepala Sekolah, adapun informasi yang digali berkaitan dengan : relevansi program, kondisi dan criteria sekolah, kesesuaian jurusan peserta, waktu pelaksanaan program serta hasil yang dicapai.

- Guru Pamong : informasi yang digali berkaitan dengan : kondisi dan criteria sekolah, kompetensi peserta, waktu pelaksanaan program serta hasil yang dicapai

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan dengan menggunakan topik diskusi yang disusun sedemikian rupa, sehingga urutannya tidak kaku, dengan demikian wawancara dalam suasana diskusi dapat berjalan dengan lancar namun terstruktur dan bisa terfokus.

Lebih lanjut Krueger dalam Suwandi dan Basrowi (2009), menyebutkan tentang karakteristik FGD bahwa:

Karakteristik FGD mencakup lima hal, yaitu: “Sejumlah orang, yang memiliki karakteristik tertentu, memberikan data, tentang sifat atau keadaan kualitatif tertentu, dalam sebuah diskusi terfokus”

FGD dibangun berdasarkan asumsi : a) keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi tersebut, b) masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuan satu dengan yang lainnya dalam pergaulan kelompok, c) setiap individu dikontrol oleh individu lain, d) kelemahan subyektif terletak pada kelemahan individu yang sulit dikontrol oleh individu yang bersangkutan, e) intersubyektif selalu mendekati kebenaran terbaik. Di dalam FGD kebenaran informasi bukan lagi kebenaran perorangan (subyektif) namun menjadi kebenaran intersubyektif, karena selama diskusi berlangsung masing-masing orang tidak saja memperhatikan pendapatnya sendiri namun ia juga mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh peserta FGD lainnya.

FGD dilakukan terhadap 8 orang peserta program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang ditempatkan di delapan sekolah yang berbeda. Pemilihan peserta FGD didasarkan pada kondisi wilayah yang berbeda sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap berkaitan dengan aspek yang digali dalam pelaksanaan FGD. Adapun aspek yang digali dalam pelaksanaan FGD sebagaimana matriks kerangka evaluasi yang ada pada bab II, yaitu :

- Aspek Input : kesesuaian sekolah sasaran, kesesuaian program studi peserta dengan kebutuhan guru produktif di sekolah.
- Aspek Proses : sosialisasi program, proses rekrutmen yang dilakukan oleh perguruan tinggi pelaksana, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK, jangka waktu pelaksanaan program serta pendanaan yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi.
- Aspek Produk : yaitu berkaitan hasil yang telah dilakukan oleh peserta baik dalam kegiatan *teaching* maupun *non-teaching*.

Tempat pelaksanaan FGD dilakukan di Ruang Seminar, Kampus Universitas Negeri Surakarta dan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Adapun peserta yang terlibat dalam FGD adalah sebagai berikut :

1. Nama : Andhitya Setia Candra
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Sawit, Kab. Boyolali
2. Nama : Mardiyanto
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Kismantoro, Kab. Wonogiri
3. Nama : Widoretno
Jurusan : Pendidikan Teknik Bangunan
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Kemusu, Kab. Boyolali
4. Nama : Titis Setyawan
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Karangdadap, Kab. Pekalongan
5. Nama : Latif Rowi
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta

Lokasi Sekolah : SMK Negeri 2 Demak, Kab. Demak

6. Nama : Ari Tri Hatmanto

Jurusan : Pendidikan Teknik Bangunan

Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta

Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Pringsurat

7. Nama : Thoriq Abdullah

Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin

Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta

Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Jumo, Kab. Temanggung

8. Nama : Agus Susilo

Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin

Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta

Lokasi Sekolah : SMK Negeri 2 Marabahan, Kalimantan Selatan.

3.5.2 Pengumpulan Data Skunder

Pengumpulan data skunder dilakukan melalui studi pustaka dan analisa dokumen, berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan, laporan yang diberikan oleh pihak Institusi pelaksana, data dan buku-buku yang berkaitan dengan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan serta browsing internet.

3.6. Teknik Analisa Data

Metode analisis data digunakan untuk mengolah data yang telah terkumpul dalam suatu penelitian untuk memperoleh hasil sesuai dengan apa yang dicapai dalam penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan “data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru serta kesalahan apa yang harus diperbaiki. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokan jawaban-jawaban dari responden dalam kategori tertentu. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Analisa data di dalam penelitian kualitatif ini di dasarkan pada metode evaluasi program dengan model CIPP, yaitu :

- Tahap deskripsi, pada tahap ini dilakukan deskripsi dilihat dari aspek konteks, input, proses dan produk berdasarkan hasil pengumpulan data primer dan data skunder yang telah diperoleh
- Tahap reduksi, yaitu dengan meghilangkan data-data yang tidak diperlukan
- Tahap analisis yang mendalam, dimana dilakukan analisa terhadap hasil penelitian, membandingkan dengan kerangka teori yang ada serta matriks kerangka evaluasi pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang ada di bab dua.
- Tahap penarikan kesimpulan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan, dalam pemberian rekomendasi harus sejalan dengan maksud tujuan penelitian yang dilakukan dan kondisi dari yang diteliti atau realitas yang ada pada sasaran penelitian.

3.7. Keterbatasan Penelitian

Di dalam penelitian ini sudah berusaha dilakukan dengan maksimal dengan menggunakan tinjauan literatur dan metode penelitian ilmiah namun pada kenyataannya masih ada saja sejumlah kekurangan yang menjadi bagian dari keterbatasan penelitian yaitu masalah waktu dan birokrasi sehingga tidak semua informan bisa digali dan dilakukan wawancara ,termasuk dalam pemilihan peserta FGD dimana tidak semua peserta bisa terwakili, namun demikian informasi yang diperoleh dalam penelitian ini sudah cukup mewakili sehingga diharapkan sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian dalam tesis ini.

3.8. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dipaparkan apa yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan topik penelitian yang sejenis, memahami posisi permasalahan yang diteliti di antara khasanah penelitian yang sudah dilakukan, dan sekaligus untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.

3.8.1. Strategi Pendampingan Sarjana Pendamping Purna Waktu dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afrinaldi pada tahun 1997 membahas tentang pelaksanaan pendampingan oleh para sarjana dalam memberdayakan masyarakat marginal. Data yang digunakan oleh peneliti bersumberkan dari hasil dialog secara mendalam dengan para responden dengan memakai guide quisioner, disamping itu menggunakan data skunder berupa hasil evaluasi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa ternyata strategi pendampingan yang dilaksanakan dalam program IDT belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terkait dengan kapasitas pendamping itu sendiri yang tidak dipersiapkan dengan cukup terutama berkaitan tentang metode dan strategi pendampingan, walaupun sudah dilakukan pelatihan dan pembekalan terhadap para pendamping sebelum mereka diterjunkan tapi dalam kenyataannya pelatihan dan pembekalan yang diberikan lebih banyak kepada pembentukan sikap mental dan materi manajemen usaha, yang menurut para pendamping tidak banyak berguna bagi pendamping di lapangan dan bukan tentang teknik, metode dan strategi pendampingan.

Namun demikian, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku strategi ini, bahwa program pendampingan ini memiliki prospek yang cukup baik untuk ditindaklanjuti. Bahkan menurut para konseptor hanya dengan melalui pendekatan strategi inilah bisa dibangun kekuatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan itu bisa diwujudkan.

1.8.2. Implementasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berbasis *lesson study* untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi (studi kasus di SMA Negeri 1 Purwosari)

Sebagaimana konsep pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengambil konsep pelaksanaan PPL yang dilaksanakan oleh LPTK, dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafa'atul Udhmah pada tahun 2011 ini menjelaskan pengalaman belajar secara teoritis dan praktis yang dilaksanakan secara terprogram,

terpadu, dan terbimbing melalui kegiatan pendampingan di sekolah atau lembaga yang sesuai dengan bidang keahliannya. PPL ini mempersiapkan mahasiswa calon guru untuk menjadi guru profesional. Seorang calon guru tentunya akan sangat sulit menguasai berbagai kompetensi untuk meningkatkan keprofesionalan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keefektifan PPL harus ada inovasi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, lesson study dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan keefektifan PPL serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan keterlaksanaan implementasi PPL berbasis lesson study serta implikasinya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Purwosari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi keterlaksanaan kegiatan plan, do, dan see dalam lesson study, angket lesson study untuk peserta didik, lembar observasi kemampuan membelajarkan siswa, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan lesson study, dan lembar penilaian hasil belajar siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan implementasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berbasis lesson study meningkat. Rata-rata keterlaksanaan lesson study adalah 78,6%. Implementasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berbasis lesson study juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dari segi proses yang diperoleh dari kemampuan membelajarkan siswa oleh guru model dan segi hasil yang diperoleh dari hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan membelajarkan oleh tiap guru model meningkat dari siklus pertama hingga siklus keempat. Hasil belajar siswa ranah kognitif pun meningkat pada tiap kelas dari lesson study pertama ke lesson study kedua. Hasil belajar ranah afektif berada pada kategori baik pada tiap lesson study, sedangkan hasil belajar ranah psikomotor meningkat dari lesson study pertama dan kedua ke lesson study ketiga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran ringkas obyek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan informasi dan fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, wawancara, *focus group discussion* maupun kajian terhadap literature, laporan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4.1. Gambaran Obyek Penelitian

Strategi dan Rencana Kerja Direktorat Pembinaan SMK bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan, melalui pendidikan formal yaitu SMK. Program pendidikan menengah kejuruan ini didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Secara garis besar tujuan Direktorat Pembinaan SMK terdiri atas tiga tujuan strategis, yaitu :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih merata, bermutu, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan beasiswa kepada anak yang kurang beruntung tetapi berprestasi, juga akan dilakukan untuk mendukung perluasan.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Direktorat Pembinaan SMK juga akan melakukan peningkatan jumlah SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Perluasan partisipasi masyarakat akan didorong lebih luas dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan. Mengingat pendidikan menengah kejuruan belum menjadi program wajib belajar, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan akan diupayakan, baik dalam rangka perluasan maupun peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, kemampuan dan kemauan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sangat strategis untuk memberikan citra kelembagaan yang positif, yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelola. Masyarakat juga diharapkan untuk proaktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran penyelenggaraan pendidikan.

Spektrum keahlian SMK merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang studi/program studi/kompetensi keahlian pada SMK. Di dalam spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan memuat bidang studi keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian dan deskripsi setiap kompetensi keahlian. Didalam spektrum keahlian SMK yang terbaru berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus tahun 2008 program pendidikan pada SMK dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Studi Keahlian

Adalah kelompok atau rumpun keahlian pada SMK yang terdiri atas :

- a. Teknologi dan rekayasa
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. Kesehatan
- d. Seni, Kerajinan, dan Pariwisata
- e. Agribisnis dan Agroteknologi dan
- f. Bisnis dan Manajemen

2. Program Studi Keahlian

Adalah jurusan dalam suatu bidang studi keahlian. Pada spektrum sebelumnya disebut bidang keahlian.

3. Kompetensi Keahlian

Adalah spesialisasi dalam suatu program keahlian studi keahlian atau pada spektrum sebelumnya disebut Program keahlian.

Program pendampingan penyelenggaraan pendidikan yang digulirkan oleh Direktorat Pembinaan SMK telah dimulai sejak tahun 2008, dan pelaksanaan program tersebut dirasakan sangat bermanfaat oleh SMK. Bantuan pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah program perbantuan yang dilakukan oleh Lembaga/Institusi Pendidikan yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk memberikan bimbingan dan layanan dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) SMK, peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan networking. Program ini bekerjasama dengan 10 institusi pelaksana salah satunya adalah Universitas Sebelas Maret, universitas ini berdiri 11 Maret 1976. Dasar hukum pendirian universitas ini adalah Keppres Nomor 10 tahun 1976. Saat itu namanya adalah Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, atau disingkat UNS, dan merupakan hasil integrasi dari IKIP Negeri Surakarta, Akademi Administrasi Negara (AAN) Surakarta, Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Negeri Surakarta, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (FK-PTPN), dan Universitas Gabungan Surakarta (UGS).

4.2. Pembahasan Aspek Konteks

Aspek context mencakup masalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan serta relevansi program dengan pihak-pihak (*stakeholders*) yang terlibat di dalam pelaksanaan program. Pada aspek konteks ini akan dilihat sejauh mana relevansi antara tujuan program pendampingan dengan tiga komponen yang terlibat dalam program pendampingan yaitu Direktorat Pembinaan SMK selaku pembuat kebijakan, perguruan tinggi pelaksana, dan sekolah menengah kejuruan selaku penerima program.

Tujuan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan adalah untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMK agar dapat berjalan dengan baik dengan cara menyediakan guru produktif yang mengajar sesuai dengan jurusannya, untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap peserta selama program pendampingan SMK ini adalah : Menyusun

perangkat persiapan pembelajaran, melaksanakan praktik mengajar terbimbing dan mandiri sesuai dengan program keahlian yang ada di SMK, melaksanakan penataan sistem administrasi sekolah, melakukan pembenahan dan penataan perpustakaan, melaksanakan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler sekolah serta melakukan kegiatan lain yang masih berhubungan dengan aktivitas di sekolah.

Tiga pilar tujuan Direktorat Pembinaan SMK terdiri atas tiga tujuan strategis diantaranya pada tujuan strategis I yaitu : Perluasan dan pemerataan akses dengan tetap memperhatikan mutu berupa : Meningkatkan daya tampung SMK dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan, mengusulkan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru kejuruan, pemerataan dan perluasan akses.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB) , bantuan pembangunan laboratorium, bantuan pembangunan ruang perpustakaan, buku pelajaran, buku nonteks pelajaran/bacaan lainnya dan sarana belajar. Sejalan dengan itu, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih merata, bermutu. Kemudian Suhadi,S.Pd, M.T, selaku Kepala Seksi Evaluasi Program, Direktorat Pembinaan SMK menyatakan :

“ yang melatar belakangi digulirkannya program ini adalah realita yang ada di lapangan dimana banyak sekolah baru yang kita bangun belum memiliki guru produktif walaupun ada mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. “

“saya kira program ini sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan kementerian, kebijakan pokok kementerian pendidikan nasional kan salah satunya menyebutkan yaitu untuk mewujudkan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. “

Dari penjelasan pihak Direktorat Pembinaan SMK dapat diketahui bahwa program pendampingan bertujuan untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru produktif dimana hal ini sejalan dengan tujuan Direktorat Pembinaan SMK dalam rangka pemenuhan jumlah dan mutu guru di Sekolah Menengah Kejuruan kemudian dari sisi kualitas dan kuantitas

tenaga pengajar juga masih menjadi permasalahan umum pendidikan nasional (Propenas 2000-2004) yaitu :

- Rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, baik wilayah, antar tingkat pendapatan penduduk, maupun antar gender;
- Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, antara lain karena kurikulum yang tidak terkait dengan kebutuhan lapangan kerja, rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan
- Lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan, baik di lembaga formal maupun masyarakat.

Berdasarkan studi literatur pada buku data dan informasi Universitas Sebelas Maret (2009) disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yaitu dibidang pengabdian masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tepat guna, meningkatkan kerjasama perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan industri kecil daerah/nasional serta meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat, sehingga dalam hal ini ada relevansi antara tujuan program pendampingan dengan tujuan dari perguruan tinggi pelaksana program pendampingan. Kemudian Drs. AG Thamrin, M.Pd, M.Si selaku koordinator pelaksana di UNS menyebutkan bahwa adanya relevansi yang jelas antara tujuan program pendampingan dengan tujuan perguruan tinggi yang tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi :

“ya, saya kira program ini sejalan dengan misi dan visi yang diemban oleh Universitas Sebelas Maret, relevansi juga sangat jelas antara tujuan program pendampingan SMK dengan tujuan perguruan tinggi yang bisa dilihat dari Tri Darma Perguruan Tinggi terutama yang berkaitan dengan meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat dan pihak Universitas Sebelas Maret juga sudah aktif dalam program-program peningkatan mutu sekolah diantaranya program wajar 9 tahun, penyusunan kurikulum sekolah dan lain-lain”

Kemudian untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung, dilakukan kunjungan ke sekolah yang menjadi sasaran program untuk melakukan wawancara dan pengamatan, ke-4 sekolah yang dikunjungi yaitu : Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sawit Boyolali, Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kemusu Boyolali, Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sukoharjo, Jawa Tengah dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Miri, Sragen, Jawa Tengah. Di sekolah tersebut dilakukan pengamatan langsung serta wawancara dengan Kepala Sekolah. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sawit :

“ya..saya kira program ini sejalan dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dari sekolah kami, tujuan dari sekolah kan antara lain menjadikan tamatan yang professional dibidangnya dan produktif yang mampu beradaptasi dengan teknologi kemudian juga pengen menjadikan tamatan yang mempunyai kecakapan hidup (life skill) yang mampu berwirausaha, nah..untuk mewujudkan itu semua kan tentu dibutuhkan guru-guru yang cukup dari segi jumlah serta kompeten dibidangnya.”

Kemudian Kepala Sekolah SMKN 3 memperkuat adanya relevansi dengan pernyataannya sebagai berikut :

“ada..ada relevansinya, kan untuk mewujudkan lulusan yang kompeten tentu perlu ditunjang dengan guru yang cukup dan kompeten terlebih di pendidikan kejuruan yang perlu sekali adalah guru produktifnya.”

Berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung terhadap sekolah yang lain diperoleh informasi bahwa tujuan dan misi sekolah yang ada antara lain : melaksanakan kegiatan pembelajaran secara aktif, efektif, dan kreatif dalam suasana kondusif untuk meningkatkan kemampuan akademis siswa, membekali siswa dengan keterampilan yang memadai sesuai dengan program keahlian yang ada, mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif yang mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha/ dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki serta bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan rangkuman dari misi serta tujuan diatas menunjukkan adanya relevansi antara tujuan program pendampingan dengan tujuan yang ada disekolah

dimana tujuan dan misi yang ada disekolah tersebut akan bisa tercapai jika di sekolah tersedia guru produktif yang mencukupi dan kompeten yang mengajar sesuai dengan program studi yang dimilikinya, sehingga hal ini menunjukkan adanya relevansi antara tujuan program pendampingan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak sekolah.

Dari pengamatan dan hasil wawancara yang dijelaskan diatas secara umum dapat dikatakan bahwa dilihat dari aspek konteks menunjukkan adanya relevansi antara tujuan program pendampingan dengan tujuan yang ada di Direktorat Pembinaan SMK, Perguruan Tinggi maupun di Sekolah Menengah Kejuruan sehingga dilihat dari aspek konteks telah terpenuhi dan sesuai dengan indikator keberhasilan program yang ada pada pada bab II (tabel 2.1).

4.3. Pembahasan Aspek Input

Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia, manajemen dan strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Aspek Input memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan suatu program, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan bahwa aspek input meliputi panduan pelaksanaan/KAK, organisasi/manajemen di perguruan tinggi pelaksana, kriteria peserta pendampingan dan sekolah sasaran, yang semua komponen tersebut ikut berpengaruh terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu evaluasi input pada penelitian ini akan terfokus pada komponen-komponen tersebut.

4.3.1. Panduan Pelaksanaan/KAK

Salah satu komponen input (masukan) dalam pelaksanaan program pendampingan adalah panduan pelaksanaan. Panduan pelaksanaan dibuat sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan agar *stakeholders* memiliki pemahaman yang sama terhadap program yang dijalankan. Panduan pelaksanaan ada 2 jenis yaitu yang dibuat oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK sebagai pedoman bagi perguruan tinggi pelaksana serta panduan pelaksanaan yang dibuat oleh pihak Universitas Sebelas Maret sebagai pedoman bagi peserta pendampingan dan sekolah yang didampingi. Mengacu kepada indikator kinerja program pada komponen ini yang

akan menjadi focus penelitian adalah ketersediaan panduan pelaksanaan, yang isinya lengkap sesuai dengan kebutuhan serta dapat dipahami. Berdasarkan studi dokumen dan wawancara kepada Tim pelaksana di Direktorat Pembinaan SMK bahwa dalam pelaksanaan program pendampingan ini telah dibuat panduan pelaksanaan program pendampingan serta Kerangka Acuan Kerja, kedua dokumen ini merupakan dokumen yang selalu dibuat oleh pihak Direktorat di dalam pelaksanaan suatu program sebagaimana dinyatakan oleh Suhadi,S.Pd, M.T, selaku pejabat di Direktorat Pembinaan SMK :

“ ya, setiap program yang kita gulirkan pasti kita buat Panduan pelaksanaan dan Kerangka Acuan Kerjanya sebagai panduan selama pelaksanaan program serta sebagai sarana sosialisasi dengan pihak-pihak terkait agar memiliki pemahaman yang sama. Itu kita buat di awal tahun. “

Berdasarkan studi dokumen diketahui bahwa panduan pelaksanaan program yang dibuat oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK terdiri dari enam bab, bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dasar hukum, sasaran, hasil yang diharapkan, nilai bantuan, karakteristik program bantuan serta jadwal kegiatan. Bab II Organisasi dan Tanggungjawab yang terdiri dari organisasi, tugas dan tanggungjawab dari Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, Institusi Pelaksana dan Tim Pelaksana. Bab III berisi persyaratan, mekanisme pengajuan proposal dan penyaluran dana. Bab IV berisi ketentuan penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana. Bab V berisi Pelaporan yang menjelaskan tentang jenis laporan yang harus dibuat oleh institusi pelaksana yaitu laporan pendahuluan (*inception report*), laporan kemajuan (*progress report*) dan laporan akhir (*final report*) berupa laporan pelaksanaan program secara lengkap, foto dokumentasi serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Bab VI berisi penutup yang menjelaskan harapan agar program bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi *stakeholders* yang terlibat. Adapun kerangka acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan SMK terdiri dari bagian pertama latar belakang yang berisi latar belakang digulirkannya program, bagian kedua dasar hukum dan kebijakan yang berisi dasar hukum pelaksanaan program berupa peraturan perundangan, bagian ketiga tujuan program yang berisi tujuan dilaksanakannya program, bagian keempat

hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program, bagian kelima berisi sasaran program yaitu 10 institusi pelaksana, bagian keenam berisi ruang lingkup kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian hasil pekerjaan, bagian ketujuh berisi jadwal pelaksanaan program, bagian kedelapan berisi persyaratan peserta yang akan mengikuti program, bagian kesembilan berisi pendanaan, bagian kesepuluh berisi jadwal pelaksanaan kegiatan serta bagian kesebelas penutup. Kemudian berkaitan dengan SK Tim pelaksana program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan berdasarkan studi dokumen yang ada dokumen tersebut terdiri dari ketua dan wakil ketua serta 2 orang anggota yang ditandatangani oleh Kasubdit Program, Direktorat Pembinaan SMK.

Hasil wawancara dengan Drs. AG Thamrin selaku koordinator dari Universitas Sebelas Maret menyatakan bahwa Panlak dan KAK yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan SMK cukup lengkap dan mudah dipahami sebagaimana pernyataan berikut :

“Penjelasan yang diberikan oleh pihak Direktorat saya rasa cukup lengkap dan jelas, sudah tertuang dalam panduan pelaksanaan maupun KAK yang ada “

“Pada saat dilakukan bimbingan teknis juga disampaikan ruang lingkup program yang harus dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi pelaksana”

Sebagai media sosialisasi dengan pihak sekolah sasaran pihak institusi juga membuat buku panduan pelaksanaan yang dibawa oleh peserta untuk diberikan ke sekolah yang akan didampingi, berdasarkan studi dokumen yang dilakukan bahwa buku panduan yang dibuat oleh Universitas Sebelas Maret selaku institusi pelaksana yaitu terdiri dari lembar identitas peserta, kata pengantar, Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dasar hukum dan kebijakan, sasaran serta hasil yang diharapkan, Bab II Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari langkah-langkah kegiatan, program yang dilaksanakan oleh peserta, jadwal pelaksanaan kegiatan, daftar peserta, lokasi SMK sasaran dan dosen pembimbing lapangan, Bab III Pelaporan dan Penilaian dan bab IV Penutup. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan dari hasil wawancara dengan informan buku panduan yang dibuat oleh pihak perguruan tinggi pelaksana cukup lengkap namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak sekolah yang menjadi sasaran :

“ya ada, tapi akan lebih baik kalo diberikan ke pihak sekolah jauh-jauh hari sebelum peserta datang ke sekolah sehingga pihak sekolah sudah bisa mempersiapkan tugas dan program yang nantinya diberikan ke peserta”

“ kalo boleh usul perlu juga dicantumkan kontak person yang bisa dihubungi sehingga ketika ada permasalahan dengan peserta misalnya kinerja peserta kurang bagus pihak sekolah bisa menyampaikan ke pihak perguruan tinggi untuk memberikan teguran “

Dari studi dokumen terhadap KAK Direktorat Pembinaan SMK ada beberapa bagian yang belum lengkap seperti rincian outline laporan baik itu laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir sehingga hal ini mengakibatkan laporan yang disusun oleh pihak perguruan tinggi berbeda-beda dan terkadang tidak menyentuh terhadap esensi kegiatan yang harus disampaikan oleh pihak perguruan tinggi pelaksana, kemudian juga rencana anggaran biaya tidak disampaikan secara detail namun hanya bersifat global yaitu untuk persiapan, koordinasi, pelaksanaan dan pelaporan, tidak dirinci kegiatan-kegiatan apa yang harus dilaksanakan serta berapa besar anggaran biaya yang diperlukan hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda di tingkat institusi pelaksana. Berdasarkan peraturan menteri nomor PM.12/HK.001/MKP/2007 tentang pedoman penyusunan Kerangka Acuan Kerja di pasal 9 disebutkan bahwa dalam merumuskan dan menyusun KAK harus berdasarkan pada asas pencapaian kinerja yang baik, yang meliputi : konsistensi keselarasan dan proporsionalitas, kejelasan rumusan dan tujuan serta ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran yang strategis, berorientasi pada pencapaian visi, misi serta manfaat yang diperoleh, obyektifitas dalam pengukuran kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan, jujur obyektif transparan dan akurat, dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, ketepatan dalam mengestimasi target kinerja serta efisien, efektif dan terarah yang mencerminkan tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi/unit kerja. Kemudian dalam pasal 10 disebutkan bahwa di dalam KAK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan, masukan, keluaran, hasil, tempat pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, persyaratan teknis dan anggaran, kemudian dalam

penyusunan KAK tersebut wajib dilampirkan Rencana Anggaran Biaya, Matrik Indikator Kerja (MIK) dan Matrik Proses Kegiatan (MPK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari KAK.

Pihak Institusi pelaksana dalam hal ini pihak Universitas Sebelas Maret juga membuat panduan pelaksanaan kegiatan yang diantaranya diberikan ke pihak sekolah yang menjadi sasaran, namun berdasarkan studi dokumen bahwa panduan pelaksanaan yang dibuat tidak memuat dengan jelas kewajiban-kewajiban apa yang dimiliki oleh peserta serta hak apa yang diterima oleh peserta sehingga hal ini terkadang menimbulkan kebingungan di pihak sekolah di dalam memberikan tugas-tugas kepada peserta serta kewajiban apa yang harus diberikan pihak sekolah kepada peserta.

Berdasarkan analisa dokumen, hasil *focus group discussion dan wawancara dengan* informan berkaitan dengan buku panduan pelaksanaan/KAK yang dibuat oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK dan buku panduan yang dibuat oleh pihak perguruan tinggi pelaksana secara umum dapat dikatakan bahwa aspek input untuk panlak/KAK dan buku panduan dalam pelaksanaan program bantuan pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan telah cukup memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. (Bab II tabel 2.1) namun ada beberapa hal yang masih perlu dilengkapi sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

4.3.2. Manajemen dan Sumberdaya Perguruan Tinggi Pelaksana

Pada aspek input untuk manajemen dan sumberdaya perguruan tinggi fokus penelitian diarahkan pada adanya tim pelaksana, adanya pembagian tugas, terakreditasinya perguruan tinggi pelaksana, adanya program pengalaman praktek lapangan (PPL), memiliki program studi sesuai dengan program keahlian yang dibutuhkan di sekolah menengah kejuruan, adanya sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam rangka melaksanakan program pendampingan. Berdasarkan studi dokumen yang ada pelaksanaan program pendampingan yang dilaksanakan oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta dibawah koordinasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS. Berdasarkan laporan awal (*inception report*) yang disampaikan oleh pihak

UNS dengan nomor 2415/H27.1.2/PP/2010 bulan Juli 2010 dengan susunan cukup lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran.

Dari susunan pelaksana yang ada menunjukkan adanya tim pelaksana tugas yang cukup lengkap namun dari sisi pembagian tugas tidak disebutkan secara rinci hanya global saja seperti apa cakupan tugas dan tanggung jawab pengarah, ketua pelaksana, bendahara, sekretaris dan lain-lain sehingga ke depan perlu diperinci tugas dan tanggung jawabnya agar lebih jelas sehingga akan lebih memudahkan suatu organisasi dalam melaksanakan tujuannya.

Kemudian untuk mengetahui akreditasi dari Universitas Sebelas Maret dilakukan studi dokumen dimana dari studi dokumen yang ada menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan rincian sebagai berikut : di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari 19 program studi 11 program studi telah terakreditasi B dan sisanya terakreditasi A, kemudian di Fakultas Ekonomi dari 3 program studi yaitu ekonomi pembangunan, manajemen dan akuntansi semuanya terakreditasi A. Fakultas Pertanian dari 6 Program Studi yang ada semuanya terakreditasi B serta Fakultas Teknik dari 6 Program Studi yang ada 3 terakreditasi B, 2 terakreditasi A dan satu program studi belum terakreditasi karena merupakan program studi baru yaitu perencanaan wilayah dan kota. Akreditasi merupakan penilaian terhadap perguruan tinggi yang dilakukan untuk mengetahui mutu perguruan tinggi per-program studi yang ada, dimana pelaksana dari akreditasi adalah Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebagai Institusi pelaksana program dipersyaratkan merupakan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi hal ini penting mengingat tujuan dari akreditasi :

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan

dari badan atau instansi yang lain. Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. (Buku I Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Depdiknas-2007)

Indikator kinerja selanjutnya adalah adanya program Pengalaman Praktek Lapangan (PPL) atau yang sejenis di perguruan tinggi pelaksana. Sebagaimana telah diterangkan di bab II bahwa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan media bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan dasar profesi yang diaplikasikan dalam bentuk praktik mengajar dan kegiatan edukasional lainnya di lembaga sekolah. Berdasarkan studi dokumen dan wawancara didapatkan informasi bahwa di UNS memiliki program PPL yang dilakukan 2 kali dalam setahun yakni pada semester ganjil dan semester genap. Adanya program PPL di perguruan tinggi pelaksana merupakan hal yang penting sebab Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan di dalam pelaksanaannya mengadopsi program tersebut sehingga diharapkan perguruan tinggi tersebut sudah memiliki pengalaman serta peserta yang terlibat memang telah memiliki kualifikasi untuk mengikuti program pendampingan. Dari studi dokumen yang ada ditemukan bahwa ternyata dari institusi pelaksana yang ada tidak semuanya memiliki program PPL sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi Direktorat Pembinaan SMK selaku pihak yang menggulirkan program agar lebih jelas dan teliti dalam menentukan institusi pelaksana sebab sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa program ini dijalankan dengan mengadopsi program PPL yang ada di institusi pelaksana sehingga jika di institusi pelaksana sendiri tidak memiliki program PPL hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan program karena pihak institusi tersebut belum memiliki pengalaman di dalam melaksanakan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Indikator kinerja selanjutnya adalah adanya program studi di Universitas Sebelas Maret yang sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan guru produktif sesuai dengan program keahlian yang ada di SMK. Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola dan studi dokumen bahwa secara umum ada kesesuaian antara program

studi yang dimiliki oleh UNS dengan kebutuhan guru produktif di SMK yang didampingi hanya saja untuk program keahlian pariwisata yang ada di SMK tidak bisa dipenuhi oleh UNS hal ini dikarenakan tidak adanya program studi pariwisata di UNS sehingga dicarikan solusi agar bisa dipenuhi, yaitu dengan melakukan *outsourcing* dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi tersebut. Kemudian untuk jurusan pertanian karena pesertanya berasal dari ilmu murni dan bukan dari kependidikan maka pada saat pembekalan telah dilakukan tambahan materi pedagogik dan pengelolaan sekolah oleh pihak UNS sehingga diharapkan peserta tersebut memiliki bekal untuk mengajar di sekolah serta memiliki kompetensi di dalam pengelolaan sekolah secara umum, hal ini sebagaimana pernyataan Drs. AG. Thamrin, M.Pd, M.Si dari Universitas Sebelas Maret-Surakarta :

“untuk ketersediaan program studi di Universitas Sebelas Maret secara umum terpenuhi semua kecuali untuk jurusan pariwisata, jadi ada 2 sekolah di daerah nanggulan yang membuka program pariwisata. Jadi untuk solusinya kita melakukan outsourcing dengan perguruan tinggi lain tapi kita tidak ada kerjasama secara khusus dengan perguruan tinggi tersebut, jadi kedua peserta tersebut dibawah koordinasi pihak Universitas Sebelas Maret. Kemudian untuk jurusan pertanian kita ambilkan dari ilmu murni nantinya untuk metode mengajar kita perkuat pada saat pembekalan.”

Berdasarkan buku “UNS dalam Angka” yang diterbitkan oleh bagian sistem informasi UNS Desember 2009, di UNS ada 9 fakultas dengan 53 program studi, sedangkan di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan terdapat 19 program studi. Adapaun spektrum keahlian di sekolah menengah kejuruan yang terbaru berdasarkan SK Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tersusun dari 6 bidang keahlian, 40 program studi keahlian dan 121 kompetensi keahlian yang selengkapnya dapat dilihat di lampiran. Kesesuaian antara program studi peserta dengan program keahlian yang dibutuhkan di sekolah merupakan hal yang mutlak sebab diantara karakteristik proses pembelajaran di SMK adalah guru produktif yang mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya, namun data dilapangan menunjukkan bahwa masih ada peserta yang di

tempatkan di sekolah yang tidak sesuai dengan program keahliannya. Jika dikelompokkan kondisi program studi peserta dengan dengan program keahlian yang dibutuhkan disekolah ada 3 keadaan :

- Sesuai, dimana peserta mengajar sesuai dengan program studinya, misal peserta dengan program studi ekonomi akuntansi di tempatkan di sekolah yang membutuhkan guru produktif akuntansi
- Kurang sesuai, dimana peserta mengajar tidak sesuai dengan program studi yang dimiliki namun masih dalam satu kelompok keahlian atau satu rumpun keilmuan, misal dari pendidikan teknik elektro diminta mengajar di sekolah yang membutuhkan guru teknik komputer jaringan (TKJ)
- Tidak Sesuai, dimana peserta mengajar tidak sesuai dengan program studi yang dimiliki dengan kebutuhan guru produktif di sekolah yang menjadi sasaran, misal ada peserta dari teknik bangunan ditempatkan di sekolah yang membuka program keahlian teknik elektro.

Ketidaksesuaian program studi peserta dengan program keahlian yang dibutuhkan oleh sekolah disebabkan oleh 2 hal : program studi di institusi tersebut ada namun tidak ada peserta yang mendaftar, maka yang perlu diperbaiki adalah dalam sosialisasi yang perlu di optimalkan kembali, sebab yang kedua adalah karena institusi tersebut tidak memiliki program studi yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga hal ini menjadi masukan bagi pihak Direktorat Pembinaan SMK untuk lebih selektif dalam memilih institusi pelaksana dimana insitutisi yang terpilih memang yang memiliki kapasitas yang cukup untuk menyediakan SDM yang sesuai dengan program keahlian yang dibutuhkan di sekolah. Selanjutnya menurut Mahdiansyah (Puslitjaknov,Balitbang-Kemdiknas, 2007) bahwa data Balitbang Depdiknas hingga tahun 2004/2005 masih banyak guru SMK yang belum berijazah S1/D IV (22,15%) dan bila ditinjau dari kesesuaian antara program studi pendidikan yang dimiliki dengan bidang studi yang diajarkan sebesar 43,15% tidak sesuai sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi Direktorat Pembinaan SMK.

Indikator kinerja selanjutnya adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki oleh pihak UNS untuk melaksanakan program pendampingan.

Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut digunakan metode pengamatan langsung dan wawancara. Berikut pernyataan Bapak Drs. AG Thamrin, M.Pd, M.Si :

“..kemudian dari sisi sarana prasarana secara umum memadai ada internet, ada web program pendampingan, ada juga group pendampingan di facebook.”

Dari pengamatan langsung dilapangan diperoleh hasil bahwa sarana prasarana telah tersedia walaupun memang dalam penggunaannya tidak dikhususkan untuk program pendampingan karena memang dari anggaran yang ada tidak terdapat biaya untuk pengadaan sarana prasarana. Ruang sekretariat yang digunakan menggunakan ruang Tata Usaha di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan fasilitas yang cukup memadai dengan adanya ruang tamu, ruang sekretariat yang dilengkapi meja, kursi, komputer yang terkoneksi internet, printer, mesin foto copy dan juga telepon. Ruangan juga dilengkapi dengan AC sehingga memungkinkan untuk bekerja dengan lebih nyaman sebagaimana informasi dari Bapak Senen selaku bendahara Program di Universitas Sebelas Maret :

“untuk masalah SDM saya kira tidak ada masalah sebab saya sebagai bendahara program sudah terbiasa berpengalaman dalam mengelola keuangan karena memang sehari-hari saya sebagai bendahara di jurusan FKIP UNS ini.”

“kalo untuk sarana prasarana walaupun tidak ada tempat secara khusus saya kira cukup lengkap ya..ruangan cukup luas dan ber-AC, ada peralatan komputer dan printer yang cukup, ada mesin fax dan mesin foto copy, ada juga koneksi internet, jadi saya kira tidak ada masalah.”

Dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program sudah dapat dipenuhi dan memadai dimana ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu komponen penting agar pelaksanaan program bisa tercapai. Ketersediaan dan kesiapan sarana-prasarana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program oleh karena itu dalam penyediannya harus sesuai dengan prinsip kecukupan, relevansi dan daya guna. Untuk kondisi di Universitas Sebelas Maret sudah mencukup tapi berdasarkan pengamatan dilapangan di institusi lain

masih kurang terutama tidak adanya koneksi internet dimana dewasa ini hal tersebut merupakan hal yang harus ada.

Kemudian indikator keberhasilan program selanjutnya yang berkaitan sumberdaya adalah adanya sumberdaya manusia yang memadai yang dilihat dari pengalaman dalam pengelolaan program PPL dan kualifikasi pendidikan untuk staf ahli dan dosen pembimbing minimal S2. Berdasarkan studi dokumen diperoleh data bahwa sampai dengan desember 2010 di FKIP UNS memiliki 418 dosen yang dijabarkan berdasarkan jabatan fungsional sebagai berikut :

Jumlah dosen	Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
418	19	108	81	190	20

Kemudian jika dijabarkan berdasarkan ijazah tertinggi adalah sebagai berikut :

Jumlah Dosen	S1	S2	S3
418	62	311	45

Kemudian dari 62 yang masih S1, 56 diantaranya sedang menempuh jenjang S2 di dalam negeri, sedangkan dari 311 yang masih S2, 77 orang sedang menempuh program S3 di dalam negeri dan 11 orang sedang menempuh program S3 di luar negeri. Dari 418 dosen yang ada di FKIP dosen yang terlibat langsung dalam program pendampingan baik sebagai staf ahli maupun sebagai dosen pembimbing semuanya sudah memiliki pengalaman mengelola program PPL dan berjenjang pendidikan minimal S2. SDM yang ada di Institusi pelaksana sudah mencukupi dimana mereka terlibat langsung sebagai team pelaksana, sebagai narasumber pada saat pembekalan serta sebagai petugas supervisor yang meninjau ke sekolah.

Kemudian indikator keberhasilan program selanjutnya adalah berkaitan adanya tim pelaksana di Perguruan tinggi dalam hal ini di Universitas Sebelas Maret

serta adanya mekanisme dan pembagian tugas. Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan berupa laporan awal (*inception report*) dari pihak Universitas Sebelas Maret dengan nomor No: 2415/H27.1.2/PP/2010 menjelaskan susunan dari team pelaksana program dari mulai penanggung jawab yaitu Dekan FKIP, wakil penanggung jawab 1 sampai 3 yaitu pembantu dekan 1 sampai 3, kemudian ketua pelaksana/koordinator, sekretaris, bendahara serta seksi-seksi yang ada. Dari sisi susunan tim pelaksana menunjukkan tidak adanya pembagian tugas serta tidak dijabarkan lebih lanjut sehingga lebih jelas tugas dan tanggung jawabnya dalam tim.

Menurut Agus Sarijanto (2007) dalam suatu organisasi yang menjadi dasar adalah adanya pembagian kekuasaan (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*), kemudian agar dalam melaksanakan kegiatannya bisa berjalan dengan baik harus ada pembagian tugas dimana pembagian tugas ini berfungsi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan, pembagian tugas akan menghasilkan deskripsi tugas atau *job description*, nah dalam susunan tim pelaksana dari Universitas Sebelas Maret tidak menunjukkan adanya *job description* tersebut. Dari penjelasan dan uraian diatas secara umum dari sisi organisasi/manajemen sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan pada bab II tabel 2.1 walaupun dalam beberapa hal masih ada yang perlu diperbaiki.

4.3.3. Peserta Program

Komponen program untuk aspek input selanjutnya adalah berkaitan dengan peserta program yang meliputi status sebagai mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 110 SKS, telah lulus mata kuliah *microteaching* kemudian program studi yang dimiliki oleh peserta sesuai dengan program keahlian yang dibutuhkan di SMK yang didampingi. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan analisa dokumen laporan pelaksanaan yang diberikan pihak UNS serta melakukan wawancara langsung ke pihak perguruan tinggi, peserta maupun ke pihak sekolah. Berkaitan dengan kriteria peserta hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dra. Katiah, M.Pd selaku koordinator program di Universitas Pendidikan Indonesia :

“Peserta yang terlibat adalah merupakan fresh graduate, kemudian mahasiswa yang sudah menempuh 110 SKS baik yang sudah melakukan PPL atau belum. Bagi yang

sudah melakukan PPL maka bisa untuk memperbaiki nilai PPL-nya sedangkan bagi yang belum program ini sebagai pengganti dari program PPL.”

Kemudian juga disampaikan oleh DR. Adi Syahputra, M.Si selaku koordinator program di Universitas Negeri Jakarta :

”Pola rekrutmen peserta program pendampingan bersifat umum sehingga mahasiswa yang mendaftar untuk kegiatan ini berasal dari kependidikan dan non-kependidikan.”

”Kriteria peserta adalah mahasiswa UNJ yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Mahasiswa semester tujuh atau lebih, dengan SKS minimal 110 dan sudah melaksanakan program PPL, mengajukan permohonan tertulis yang disertai alasan yang menjadi motivasi ikut dalam kegiatan ini, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang hamil atau baru melahirkan dan atau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan program pendampingan, berkelakuan baik, mau menandatangani perjanjian dengan LPM UNJ”

”Selain mahasiswa aktif peserta program pendampingan lainnya adalah mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dan mahasiswa yang baru diwisuda atau Fresh-graduate.”

Berdasarkan analisa dokumen diperoleh data bahwa dari 45 peserta ada 2 peserta yang tidak sesuai antara program studi yang dimiliki dengan program keahlian yang dibutuhkan di sekolah, yaitu :

Program Studi Peserta	Program Keahlian yang dibutuhkan Sekolah	Nama Sekolah
Pendidikan Teknik Bangunan	Teknik Komputer dan Jaringan	SMKN 1 Kismantoro, Wonogiri
Pendidikan Teknik Bangunan	Teknik Komputer dan Jaringan	SMKN 1 Bantumandi, Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Kemudian dari 4 sekolah yang dikunjungi yaitu : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sawit Boyolali, Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kemusu Boyolali, Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sukoharjo, Jawa Tengah dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Miri, Sragen, Jawa Tengah semuanya sesuai antara program studi peserta dengan kebutuhan program keahlian di sekolah.

Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Drs. Marimin selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sawit :

“saya rasa ya sesuaiilah..karena kan peserta dari UNS ini dua-duanya dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin.” Mas Gama Satria dari Teknik Mekanik Otomotif dan Mas Wahid juga dari Teknik Mekanik Otomotif.”

Kemudian juga sebagaimana pernyataan dari Bapak Drs. Budi Santoso, MM selaku kepala sekolah di SMK Negeri 1 Miri, Sragen :

“ya cukup sesuai karena kedua peserta berasal dari jurusan pendidikan teknik mesin. Di sekolah ini kan membuka 3 program keahlian : Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Listrik Penggunaan. “

Kemudian dari hasil *focus group discussion* dengan 8 peserta berkaitan dengan kesesuaian program studi peserta dengan kebutuhan guru produktif di sekolah secara umum sudah sesuai, walaupun ada yang tidak sama persis program studinya tapi masih satu rumpun jurusan sebagaimana pernyataan salah satu peserta yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Kemusu:

“jurusan yang saya dampingi di sekolah tidak satu program studi tapi masih dalam satu rumpun, saya dari jurusan mesin produksi namun jurusan yang ada di sekolah teknik mesin otomotif.”

Disamping harus memiliki kesesuaian antara program studi yang dimiliki dengan program keahlian yang diajarkan di SMK seorang guru kejuruan juga harus memiliki kompetensi lain yang harus dipenuhi. Sebab berdasarkan laporan dari kepala sekolah ada peserta yang kurang memiliki kemampuan untuk mengajar sehingga keberadaan peserta di sekolah kurang optimal.

Berdasarkan permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru disebutkan bahwa seorang guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik D-IV atau Sarjana (S1) dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dalam Permendiknas tersebut juga dijelaskan bahwa seorang guru di SMK harus memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik dimana seorang guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kompetensi kerpribadian dimana seorang guru mampu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia, kemudian kompetensi sosial dimana seorang guru bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif dan kompetensi profesional dimana seorang guru menguasai materi, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Dari temuan dilapangan berdasarkan laporan pihak sekolah menunjukkan bahwa ternyata masih ada peserta yang masih mengambil SKS sehingga hal ini mengganggu pelaksanaan program di sekolah sasaran sebab peserta terkadang harus meminta ijin ke sekolah untuk mengikuti kuliah di kampus sehingga keberadaan peserta di SMK tidak optimal, kemudian juga ada peserta yang tidak kompeten dalam mengajar di kelas sehingga hal ini menjadi masukan bagi institusi pelaksana agar lebih ketat di dalam melakukan seleksi sehingga memang peserta yang kompeten dan profesional yang mengikuti program baik dari sisi kesesuaian program studi maupun kemampuan mengajar. Selanjutnya Mahdiansyah dalam Parkay dan Stanford (1992) menyebutkan pandangan bagaimana proses menuju guru profesional :



Universitas Indonesia

Gambar 4.1 : Proses Pembentukan Guru Profesional

Agar kegiatan KBM dapat terlaksana dengan efektif dan efisien yang bermuara pada penciptaan lulusan yang bermutu keberadaan guru yang kompeten mempunyai peran yang sangat menentukan dan merupakan kunci keberhasilan sehingga hal ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai penghasil guru termasuk dalam program pendampingan yang dijalankan agar bisa selektif dalam memilih peserta sehingga benar-benar memiliki kompetensi. Menurut Mulyasa (2002) dalam I Wayan Bukatiasa (Juni,2009) bahwa dalam pencapaian mutu pendidikan, faktor kesiapan guru sangat menentukan, sebab guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan pendidikan, menurut Zamroni (2000) bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sasaran sentral yang harus dibenahi adalah guru.

Kemudian berkaitan dengan indikator kesediaan peserta untuk ditempatkan di sekolah yang akan di tetapkan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan studi dokumen yang ada dilakukan oleh pihak Universitas Sebelas Maret pada saat dilakukan wawancara rekrutmen peserta dimana setiap peserta diminta untuk menandatangani form kesediaan untuk ditempatkan di sekolah yang nantinya akan ditetapkan serta bersedia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dari studi dokumen terhadap form kesediaan yang ada terlihat belum mengikat sehingga masih ada peluang untuk mangkir dari tugas, sebaiknya pihak Universitas Negeri Sebelas Maret bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh pihak Universitas Pendidikan Indonesia dimana dilakukan kontrak dengan jelas antara pihak institusi dengan peserta disertai hak dan kewajiban yang jelas serta dibubuhi materai dimana disebutkan bahwa jika peserta tidak melaksanakan tugas dengan baik atau mangkir sebelum waktunya selesai maka peserta wajib mengembalikan seluruh pembiayaan yang diberikan.

4.3.4. Sekolah sasaran

Sebagaimana tujuan dari program ini adalah untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar bidang

produktif, sehingga kriteria sekolah yang didampingi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam indikator kinerja program yaitu : merupakan sekolah negeri, merupakan sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik bidang produktif serta merupakan unit sekolah baru (USB) tahun 2005 dan setelahnya. Untuk memperoleh informasi dan data berkaitan dengan hal tersebut dilakukan wawancara dengan pihak Direktorat Pembinaan SMK, pihak sekolah serta melakukan studi dokumen terhadap laporan akhir (*final report*) peserta pendampingan dan laporan awal (*inception report*) yang disampaikan oleh pihak Universitas Sebelas Maret. Berikut pernyataan Bapak Suhadi,S.Pd, MT selaku pejabat dan penanggung jawab program di Direktorat Pembinaan SMK :

“ Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran ini adalah sekolah yang merupakan unit sekolah baru dimana sekolah tersebut dibangun dengan biaya dari kita yang bersumber dari dana APBN dan sharing dari daerah. Sebenarnya pada saat MOU sudah disebutkan bahwa kewajiban pemenuhan guru produktif di sekolah merupakan kewajiban dari pemerintah daerah sesuai dengan aturan di era otonomi daerah, tapi memang pada pelaksanaannya dilapangan banyak sekolah yang sudah kita bangun ketersediaan guru produktif di sekolah-sekolah tersebut masing kurang bahkan terkadang tidak ada sehingga dengan program ini kita coba membuat terobosan untuk mengatasi ketidakterediaan atau kekurangan guru-guru produktif di SMK.

“Jadi memang sekolah yang menjadi sasaran program ini adalah sekolah-sekolah yang merupakan unit sekolah baru yang diprioritaskan dibangun tahun 2005 keatas.”

Berdasarkan studi dokumen yang ada terdapat 32 sekolah yang didampingi oleh pihak Universitas Sebelas Maret yang tersebar di 23 kabupaten/kota dan berada di 3 provinsi yaitu Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Kalimantan Selatan. Dari ke-32 sekolah tersebut semuanya merupakan sekolah negeri, kemudian dari sisi tahun berdirinya semuanya merupakan sekolah unit sekolah baru (USB) yang berdiri tahun 2005 dan setelahnya. Hanya sekolah yang berada di Kalimantan Selatan yang telah berdiri pada tahun 2004 namun demikian sekolah tersebut masih membutuhkan guru

produktif. Berikut penjelasan dari beberapa kepala sekolah yang berhasil di wawancara :

“Sekolah ini didirikan tahun 2007 dengan sharing dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga ya..tergolong masih baru.”

“jadi di SMK ini ada 3 program keahlian yang dibuka Teknik Kendaraan ringan (TKR), Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Farmasi. Kemudian total guru PNS yang ada 34 orang tapi dari sisi ketersediaan guru produktif memang masih kurang, contohnya saja untuk program keahlian Teknik Kendaraan Ringan kita kan ada 12 rombongan belajar sedangkan guru produktif yang ada hanya 4 orang.”

(Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sawit)

“Sekolah ini didirikan pada tahun 2005, kemudian ada 3 Bidang Keahlian yang dibuka : teknik Mesin dengan program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif trus teknik Perkayuan, Program Keahlian : Teknik Konstruksi Kayu dan bisnis manajemen program keahliannya: penjualan. Dari 3 program keahlian ini yang paling dibutuhkan adalah untuk teknik mesin sebab kami total memiliki 9 rombongan belajar, adapun untuk 2 program keahlian yang lain sudah cukup malah untuk program keahlian teknik perkayuan kita ngak ada peminatnya.” (Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kemusu)

Unit sekolah baru (USB) merupakan sekolah yang baru dibangun dengan dana pembangunan berasal dari APBN sedangkan penyediaan lahan berasal dari pemerintah daerah, dimana kondisi sekolah baik dari segi sarana-prasarana serta jumlah tenaga pendidik yang masih minim. Dalam penentuan sekolah yang didamping diatasi pada USB yang dibangun pada tahun 2005 dan setelahnya hal ini dikarenakan sekolah-sekolah tersebut yang memang masih sangat membutuhkan bantuan termasuk untuk keterpenuhan tenaga pendidik sesuai program keahlian yang dibuka. Berdasarkan klasifikasi kondisi SMK di wilayah Indonesia Direktorat Pembinaan SMK membagi sekolah menjadi beberapa kategori yaitu :

- Unit Sekolah Baru (USB),

Merupakan sekolah yang baru dibangun dengan kondisi sarana prasaranan maupun jumlah tenaga pendidik yang masih minim

- Standar Pelayanan Minimal,
Merupakan USB yang sudah memenuhi 8 standar pendidikan nasional
- Sekolah Standar Nasional (SSN),
Merupakan sekolah yang sudah memenuhi standar nasional
- Rintisan Sekolah berstandar Nasional (RSBI),
Merupakan sekolah standar nasional yang sudah mempersiapkan diri menuju sekolah berstandar Internasional
- Sekolah berstandar Internasional (SBI),
Merupakan sekolah dengan mutu tertinggi yang sudah memenuhi kriteria sekolah berstandar Internasional yang ditentukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional.

Didalam menentukan sekolah serta program keahlian yang dibuka pihak Direktorat Pembinaan SMK mengacu kepada kondisi data pokok SMK yang ada dimana data pokok ini merupakan program yang dilakukan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK untuk mendata kondisi SMK baik negeri maupun swasta diseluruh Indonesia termasuk kondisi tenaga pendidik yang ada. Data pokok yang menampilkan kondisi sekolah SMK diseluruh Indonesia bisa diakses di website www.datapokok.ditpsmk.net, permasalahan yang terjadi adalah pada sinkronisasi data dimana pada realisasinya banyak terjadi ketidaksesuaian antara datapokok SMK dengan data yang ada dilapangan dimana hal ini terjadi karena cepatnya perubahan data yang dilapangan dan belum terdata di datapokok SMK terutama berkaitan dengan kondisi jumlah siswa dan kondisi kebutuhan tenaga pendidik. Melihat kondisi ini kedepan sebaiknya harus ada *crosscheck* data ke sekolah yang akan didampingi dan memastikan kebenaran data yang ada sehingga tidak terjadi lagi ketidaksesuaian data baik data sekolah maupun data program keahlian yang dibutuhkan. Ketidaksesuaian data antara data yang ada di pihak Direktorat Pembinaan SMK dengan data dilapangan bisa diatasi dengan memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi pelaksana untuk melakukan observasi awal terhadap sekolah-sekolah yang akan menjadi sekolah sasaran sehingga sebelum sekolah tersebut ditetapkan perguruan tinggi akan melakukan observasi terlebih dahulu sehingga data

yang ada benar-benar sesuai, sebagaimana dinyatakan oleh Dra. Katiah, M.Pd selaku koordinator dari Universitas Pendidikan Indonesia :

“...untuk anggaran pada persiapan kita ingin disitu ada pos dana untuk observasi awal terutama untuk lokasi-lokasi yang baru.”

Secara umum pada komponen SMK sasaran telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pada indikator keberhasilan program namun ke depan harus lebih ditingkatkan lagi berkaitan dengan kesesuaian data di pihak Direktorat Pembinaan SMK dengan data yang ada di sekolah sehingga keberadaan peserta pendampingan di sekolah yang didampingi bisa lebih optimal karena adanya kesesuaian kebutuhan tenaga pendidik bidang produktif di sekolah dengan program studi yang dimiliki oleh peserta.

4.4. Aspek Proses

Mengacu kepada indikator kinerja program yang ada pada bab II, aspek proses mencakup sosialisasi, seleksi dan penetapan, pembekalan, supervisi, waktu pelaksanaan program, pemanfaatan dana, pelaporan. Hasil dari penelitian dan pembahasan akan diuraikan sebagai berikut :

4.4.1. Sosialisasi Program

Pada komponen sosialisasi ini yang menjadi indikator keberhasilan program adalah proses sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK selaku pembuat kebijakan program serta sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Sekolah, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi pelaksana dalam hal ini Universitas Sebelas Maret Surakarta kepada calon peserta. Berdasarkan studi dokumen didapatkan data bahwa Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2010 telah melaksanakan sosialisasi program pada awal tahun anggaran yakni pada awal bulan maret dengan melaksanakan rapat koordinasi program tingkat nasional dengan mengundang perwakilan dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dimana pada kegiatan tersebut dipaparkan program-program yang akan dijalankan oleh Direktorat Pembinaan SMK termasuk

didalamnya program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Kemudian dari kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan rapat koordinasi tingkat provinsi yang diadakan oleh masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suhadi, S.Pd, MT :

“Semua program-program yang kita gulirkan kita sosialisasikan pada saat Rapat koordinasi yang mengundang baik dengan dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, kemudian juga semua program yang ada di Direktorat pembinaan SMK dibuatkan panduan pelaksanaannya dari mulai mekanisme pengajuan sampai dengan pelaporannya untuk kemudian di upload di website resmi direktorat yang ada di www.ditpsmk.net sehingga semua pihak yang -ingin mengetahui program yang akan dijalankan oleh direktorat pembinaan SMK bisa mengaksesnya dengan mudah. “

“Kemudian khusus program ini kita juga membuat surat informasi ke Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang kompeten untuk bisa berpartisipasi dalam program ini agar mereka bisa mengajukan proposal dengan melampirkan profil dari Perguruan Tinggi tersebut.”

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan serta wawancara ke sekolah diperoleh data bahwa tidak semua dinas pendidikan khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota maupun sekolah yang didampingi mengetahui adanya program pendampingan, kemudian ketika dilakukan wawancara dengan peserta apakah pihak dinas maupun sekolah sudah mengetahui adanya program pendampingan hampir semua menyatakan belum mengetahui, pihak dinas pendidikan kabupaten/kota dan sekolah yang didampingi baru mengetahui adanya program pendampingan setelah peserta memberikan surat pengantar dari Direktorat Pembinaan SMK dan surat tugas dari perguruan tinggi. Berikut pernyataan dari dua orang peserta :

“ya kalo bisa pemberitahuan kepada sekolah baru yang ditempati peserta pendampingan diharapkan lebih komunikatif sebelum peserta sampai di sekolah bersangkutan agar mereka lebih mudah dalam penerimaan kepada kami.”

(Ari Tri Hatmoko, Peserta di SMK Negeri 1 Pringsurat)

“sosialisasi ke pihak sekolah yang didampingi mohon bisa lebih baik sebelum peserta tiba di sana sebab kepala sekolah yang saya temui justru belum mengetahui program ini dan baru mengetahui setelah saya tiba di lokasi.”

(Thariq Abdullah, Peserta di SMK Negeri 1 Jumo)

Dari kejadian diatas perlunya sosialisasi yang lebih khusus yang dilakukan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK baik kepada Dinas Pendidikan kab/kota maupun ke sekolah yakni dengan memberikan surat informasi resmi kepada pihak dinas pendidikan kab/kota terkait dan kepada sekolah yang didampingi sebab selama ini surat pengantar yang berasal dari pihak direktorat Pembinaan SMK baik yang ditujukan ke dinas pendidikan kab/kota maupun yang ditujukan ke sekolah hanya dibawa oleh peserta pada saat datang ke lokasi mestinya sudah diinformasikan sebelum peserta datang ke lokasi sekolah sehingga pihak sekolah sudah siap menerima dan kejadian penolakan oleh sekolah bisa dihindari. Di era otonomi daerah dimana sekolah menjadi milik pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota maka semestinya pihak pemerintah daerah ikut berperan aktif dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih program pendampingan ini bertujuan untuk membantu kekurangan guru produktif di daerahnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengatur tugas pemerintah kabupaten/kota yaitu antara lain :

- Mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan dan standar nasional pendidikan dengan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

Selanjutnya menurut Suwandi (2002) dalam buku Manajemen berbasis sekolah di otonomi daerah (Depdiknas,2011) menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi daerah, diantaranya :

“Pemerintah pusat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ditungkan dalam peraturan perundangan dan bersifat mengikat kedua belah pihak, namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan pusat dan daerah.”

Sehingga dalam program ini hendaknya pemerintah daerah ikut berperan aktif misalnya dengan menginformasikan sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru baik jenis program keahliannya maupun jumlah kebutuhan guru serta jika perlu pemerintah daerah ikut memberikan sharing pembiayaan misalnya dalam penyediaan kost atau tempat tinggal untuk peserta.

Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret dilakukan untuk menjangkau mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program pendampingan, mekanisme yang dilakukan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh koordinator program Bapak Drs. A G.Thamrin,M.Pd :

“Kemudian untuk sosialisasi dalam proses rekrutmen peserta melalui pemberitahuan secara resmi lewat surat ke semua program studi terkait, kemudian juga via online.

Kemudian DR. Adi Syahputra,M.Si dari Universitas Negeri Jakarta menjelaskan :

”untuk sosialisasi program pendampingan di UNJ dilakukan dengan pemasangan spanduk dan pengiriman surat pemberitahuan yang berisi tentang pembukaan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pendampingan SMK, utamanya ke Dekan Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas MIPA.”

Kemudian ketika dilakukan wawancara dengan peserta darimana ia mengetahui program pendampingan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Saya mengetahui adanya program ini dari dosen , kalo untuk rekrutmen nya diminta mengumpulkan berkas dan wawancara”

“tahu dari temen-temen dan juga dari web pendampingan”. Untuk rkrutmen nya dengan pemberkasan dan seleksi secara tertulis”

“Saya tahu dari kampus di jurusan pendidikan teknik mesin, kalo untuk rekrutmennya ya dengan mengajukan lamaran, seleksi trus penempatan”

“saya tahu dari situs www.pendampingansmk.uns.fkip.ac.id, kemudian kalo untuk rekrutmennya dengan seleksi hasil studi yang telah ditempuh dengan menunjukkan transkrip nilai dan wawancara.”

Universitas Sebelas Maret disamping melakukan sosialisasi dengan membuat surat edaran kepada fakultas-fakultas lain juga membuat web khusus dan juga memasang iklan di media massa. Sosialisasi adalah merupakan hal yang penting dimana dengan sosialisasi yang maksimal maka diharapkan pihak-pihak yang terlibat bisa mengetahui serta memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu program. Sosialisasi yaang dilakukan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Universitas Sebelas Maret telah memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan akan tetapi untuk mencapai hasil maksimal perlu adanya sosialisasi dan pemberitahuan secara khusus oleh Direktorat Pembinaan SMK kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dimana terdapat sekolah yang didampingi serta kepada sekolah itu sendiri. Untuk dapat menjangring peserta secara optimal sehingga diperoleh peserta yang kompeten dan profesional hendaknya sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara : memasang spanduk di kampus, melalui pemberitaan surat resmi ke berbagai fakultas, melalui media massa, melalui internet, secara pendekatan informal, serta pembuatan leaflet yang dipasang di tempat strategis sehingga diharapkan bisa diketahui oleh calon peserta.

4.4.2. Seleksi dan Penetapan

Seleksi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK kepada calon Institusi pelaksana dilakukan dengan melihat kepada kinerja yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah melaksanakan pada tahun sebelumnya dengan

melihat kepada kompetensi, kapasitas dan kinerja, antara lain dilihat dari keterpenuhan sasaran, kesesuaian laporan baik dari isi dan waktu, penggunaan dana serta pemaparan pada saat laporan akhir. Kemudian pihak Direktorat Pembinaan SMK membuat team evaluasi yang terdiri dari kordinator dan anggota, dimana team inilah yang akan melakukan evaluasi secara menyeluruh kemudian melaporkan hasilnya kepada Direktur Pembinaan SMK. Hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Suhadi,S.Pd, MT dari pihak Direktorat Pembinaan SMK :

“Semua program-program yang kita gulirkan kita sosialisasikan pada saat Rapat koodinasi yang mengundang baik dengan dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, kemudian juga semua program yang ada di Direktorat pembinaan SMK dibuatkan panduan pelaksanaannya dari mulai mekanisme pengajuan sampai dengan pelaporannya untuk kemudian di upload di website resmi direktorat yang ada di www.ditpsmk.net sehingga semua pihak yang -ingin mengetahui program yang akan dijalankan oleh direktorat pembinaan SMK bisa mengaksesnya dengan mudah, kemudian khusus program ini kita juga membuat surat informasi ke Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang kita anggap kompeten untuk bisa berpartisipasi dalam program ini agar mereka bisa mengajukan proposal dengan melampirkan profil dari Perguruan Tinggi tersebut.”

“Bagi perguruan tinggi yang berminat mengikuti program ini maka mereka diminta untuk mengajukan proposal ke pihak direktorat untuk kemudian kita lakukan penilaian, adapun perguruan tinggi yang telah melaksanakan program ini pada tahun sebelumnya akan kita evaluasi kinerjanya, kemudian perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi akan ditetapkan dengan SK Direktur Pembinaan SMK.”

Dari studi dokumen diperoleh data adanya tim seleksi dengan nomor 483/C5.2/KP/2010 tanggal 19 Februari 2010 dengan susunan team terdiri dari ketua, wakil ketua dan 2 orang anggota, adapun instrumen yang digunakan meliputi penilaian terhadap kompetensi, kapasitas dan kinerja yang mengacu pada kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, hasil supervisi dan pemaparan akhir, kemudian untuk penetapan insititusi pelaksana dengan nomor 387/C5.2/Kep/KU/2010 dan surat penetapan sekolah yang didampingi dengan nomor 388a/C5.2/Kep/KU/2010

dimana data sekolah yang di dampingi berasal dari datapokok SMK, informasi langsung dari pihak sekolah serta informasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Berikut penegasan dari Bapak Suhadi,S.Pd, MT dari Direktorat Pembinaan SMK :

“ya, jadi untuk penetapan sekolah yang menjadi sasaran program ini kita tetapkan setelah penetapan perguruan tinggi pelaksana. Sekolah-sekolah yang kita dampingi mengacu kepada datapokok SMK. Jadi di kita ada program pendataan sekolah dimana kita mendata sekolah-sekolah kejuruan di seluruh Indonesia baik itu dari sisi jumlah siswa, kondisi pendidik dan tenaga kependidikan dan juga sarana dan prasarana sekolah. Datapokok sekolah ini kita lakukan dan kita update datanya setiap tahun sehingga dari program tersebut kita tahu sekolah-sekolah yang memang masih kekurangan guru produktif.”

“Setelah kita tahu sekolah-sekolah sasaran kemudian kita buat zona sesuai dengan Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan program ini misalnya dari Universitas Negeri Medan kita minta mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam walaupun memang ada beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Pulau Jawa kita minta untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ada di luar Pulau Jawa seperti dari Universitas Pendidikan Indonesia disamping mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat juga kita minta untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu.”

Dari Surat penetapan yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan SMK maka pihak perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai pelaksana melakukan sosialisasi dan seleksi peserta serta penetapan sebagaimana terdapat pada laporan awal dari Universitas Sebelas Maret dengan nomor 2415/H27.1.2/PP/2010. Dari seleksi dan mekanismenya baik yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK maupun yang dilakukan oleh pihak Universitas Sebelas Maret telah memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan pada bab II yakni adanya team seleksi, instrumen serta mekanismenya namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain berkaitan dengan penetapan lokasi SMK dimana terdapat SMK yang tidak sesuai dengan data awal sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian input kemudian juga berkaitan dengan instrumen serta team seleksi dari pihak Universitas Sebelas Maret dimana

tidak ada instrumen yang tertulis hanya wawancara saja serta team seleksi yang tidak disertai dengan SK penetapan dari pejabat terkait dalam hal ini dari Dekan FKIP UNS, kemudian dari data dilapangan ditemukan bahwa ada peserta yang menurut pihak sekolah kurang kompeten di dalam mengajar sehingga dari temuan tersebut perlu diperbaiki di dalam proses seleksi peserta dimana tidak hanya wawancara saja tapi juga tes tertulis serta praktek mengajar dimana proses seleksi tersebut hendaknya mengacu kepada kompetensi guru yang dipersyaratkan oleh kementerian pendidikan nasional yaitu peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 dimana seorang guru harus memiliki 4 kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Dengan proses seleksi yang lengkap tersebut diharapkan bisa mendapatkan peserta yang memang kompeten dan bisa memberikan manfaat optimal bagi sekolah yang didampingi.

4.4.3. Pembekalan

Komponen berikutnya berkaitan dengan aspek proses adalah kegiatan pembekalan yang dilakukan oleh pihak Universitas Sebelas Maret, dimana pada komponen ini indikator kinerja yang dilihat adalah pihak pelaksana dalam hal ini perguruan tinggi melaksanakan pembekalan dan materi yang disampaikan sudah mencakup kebijakan Direktorat Pembinaan SMK serta materi manajemen sekolah. Berdasarkan studi dokumen berupa laporan yang ada kegiatan pembekalan dilaksanakan oleh pihak Universitas Sebelas Maret dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

No	Jam	Materi	Pembicara
1.	12.00 – 13.00	Registrasi & Makan Siang	Panitia
	13.00 – 14.30	Menjadi Guru Sejati	Prof. Dr. M.Furqon Hidayatullah, M.Pd. Dekan FKIP UNS
	14.30 – 16.00	Kebijakan Depdiknas Tentang Program	Ir. Moh. Abduh, M.Sc. Subdit Program Dit PSMK

		Pendampingan SMK	
	16.00 – 16.15	Ishoma	
	16.15 – 17.30	Kegiatan Teaching & Non Teaching	Drs. J. Soekardjo, M.Si. Ka. UPPL FKIP UNS
2.	09.00 – 12.00	Pembekalan Bidang Studi	Prodi terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 16.00	Penguasaan Teknologi Informasi	Tim ICT FKIP
3.	09.00 – 09.30	Registrasi	Panitia
	09.30 – 11.00	Pendidikan Kejuruan	Drs. Suwachid, M.Pd., M.T.
	11.00 – 12.30	Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan di SMK	Drs. AG. Tamrin, M.Pd, M.Si Ketua Program Pendampingan SMK
	12.30 – 13.30	Ishoma	
	13.30 - selesai	Penyelesaian Administrasi Keberangkatan	Panitia

Drs. AG Thamrin, M.Pd menyatakan :

“Pembekalan yang dilakukan saya kira cukup memadai, untuk yang ilmu murni memang kita perkuat dalam hal teori mengajar, kita juga ada materi khusus tentang IT sehingga pada saat dilapangan peserta kita sudah mempunyai kemampuan yang cukup terutama untuk masalah jaringan komputer.”

Kemudian Dra. Katiah, M.Pd dari Universitas Pendidikan Indonesia :

“Jadi diklat pembekalan diadakan sebelum peserta diterjunkan ke lokasi, pembekalan dilakukan dengan pola selama tiga hari. Pembekalan ini intinya berkaitan dengan kebijakan, kemudian cakupan program serta memberikan penguatan-penguatan sikap dan mental mahasiswa di lapangan , kita juga menyampaikan program teknik-teknik pembelajaran, kita juga menyampaikan

tentang kurikulum dan spektrum di SMK. Adapun narasumber berasal dari direktorat SMK, dari UPI dan dari peserta sebelumnya yang sudah berhasil.”

“Untuk peserta yang berasal dari non-kependidikan memang waktu yang ada saya kira belum cukup.”

Kegiatan pembekalan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi pelaksana kepada peserta sebelum diterjunkan ke sekolah sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini peserta sudah memiliki bekal yang cukup berkaitan dengan substansi program maupun manajemen sekolah. Secara keseluruhan kegiatan pembekalan sudah dilaksanakan dan memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan pada bab II namun ada beberapa hal yang menjadi catatan diantaranya berkaitan dengan terbatasnya narasumber dari pihak Direktorat Pembinaan SMK sehingga ketika ada beberapa perguruan tinggi pelaksana yang mengadakan pembekalan pada saat yang bersamaan maka hal ini akan menyulitkan pihak Direktorat Pembinaan SMK untuk mengirimkan narasumber yang kompeten, kemudian dari sisi materi juga lebih diperdalam khususnya bagi peserta yang program studinya tidak sama persis melainkan hanya serumpun dengan program keahlian yang ada di sekolah misalnya peserta dengan program studi biologi sementara program keahlian yang didampingi di sekolah adalah bidang pertanian dan juga dari peserta yang berasal dari non-kependidikan perlu diperkuat lagi dalam hal metode mengajar di sekolah kemudian juga dalam hal penguasaan teknologi informasi sebab peserta ini selama di sekolah sudah berposisi sebagai guru sekolah menengah kejuruan seperti guru pada umumnya terlebih. Berdasarkan buku tenaga pendidik dan kependidikan kejuruan (Depdiknas, 2006) menyebutkan kekhususan guru kejuruan, yaitu :

1. Harus memahami dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya/nilai-nilai yang berlaku di dunia usaha dan dunia industri
2. Memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tuntutan penyelenggaraan CBT (*competency based training*)
3. Bersedia untuk terus mengembangkan kompetensinya mengikuti kemajuan iptek
4. Mampu beradaptasi dengan konsep belajar sepanjang waktu, misal guru-guru produktif bidang pertanian kadangkala harus melakukan pengamatan selama 24

jam untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman dan reproduksi binatang seperti ikan, serangga dan sebagainya.

Dari karakteristik guru kejuruan yang disebutkan diatas hendaknya materi-materi yang diberikan oleh pihak institusi pelaksana kepada peserta benar-benar mencukupi sebagai bekal bagi peserta untuk terjun ke sekolah, disamping itu narasumber yang terlibat hendaknya memang orang yang pakar dibidangnya. Perlu juga diundang guru atau kepala sekolah kejuruan yang sudah berpengalaman mengajar dan mengelola sekolah kejuruan untuk memberikan informasi dan pengalamannya selama menjadi guru dan mengelola sekolah kejuruan.

4.4.4. Supervisi

Tujuan Supervisi adalah untuk memantau pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan di lapangan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya kemudian juga mengambil solusi dan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Berdasarkan studi dokumen yang ada pihak Universitas Sebelas Maret membagi lokasi SMK yang akan di supervisi menjadi 9 zona sehingga ada 9 orang petugas supervisi yang terlibat, kemudian setiap petugas supervisi juga dilengkapi dengan : buku panduan supervisor yang berisi antara lain mekanisme dan lokasi sekolah yang akan disupervisi, kemudian juga dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh dekan, serta lembar penilaian supervisi yang merupakan instrumen yang digunakan oleh supervisor untuk menilai kinerja dari peserta selama berada di sekolah. Lembar penilaian ini terdiri dari aspek : teaching, non-teaching serta faktor pendukung. Dari dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK untuk pelaksanaan supervisi dialokasikan dana untuk 10 titik sekolah sebagai sampling jadi tidak semua sekolah dilakukan supervisi mengingat keterbatasan dana yang ada.

Berkaitan dengan pelaksanaan supervisi ini Drs. AG Thamrin, M.Pd menjelaskan :

“ Kalo dipikir untuk pendanaan supervisi sebenarnya tidak cukup, idealnya memang fifty-fifty, artinya dari 45 peserta ya separohnya lah..., tapi kita bisa siasati dimana

satu orang supervisor melakukan kunjungan ke beberapa sekolah karena memang pihak sekolah ingin sekolahnya dikunjungi.”

Kemudian DR. Adi Syahputra, M.Si menjelaskan mekanisme supervisi yang dilakukan di Universitas Negeri Jakarta :

“Supervisi dilakukan secara sampling, untuk masing-masing wilayah diambil 3 titik/sekolah. Sampling terpilih dari tahun ke tahun diusahakan tidak sama. Supervisi selain dilakukan oleh pihak LPM juga dilakukan oleh dosen pembimbing dan pihak Direktorat SMK.”

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan supervisi ini juga dilakukan penggalian informasi dengan 3 orang dosen dari Universitas Sebelas Maret yang diberi tugas sebagai supervisor, diperoleh informasi sebagai berikut :

Berkaitan dengan dana yang diberikan untuk melakukan supervisi :

“Dana untuk supervisi hanya cukup untuk beberapa tempat saja sehingga kadangkala ada beberapa tempat yang tidak dikunjungi.”

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan supervisi :

“saya kira sih tidak ada kendala hanya saja untuk melakukan supervisi yang cukup banyak ke lokasi disiasati dengan mengumpulkan peserta ke satu lokasi.”

Pada saat dilakukan supervisi setiap peserta program pendampingan juga diharuskan menyampaikan laporan kepada petugas supervisor dimana laporan tersebut nantinya akan dikompilasi oleh pihak perguruan tinggi pelaksana sebagai laporan kemajuan (*progress report*) yang harus disampaikan ke pihak Direktorat Pembinaan SMK.

Berdasarkan studi dokumen didapatkan informasi bahwa untuk mengatasi lokasi-lokasi yang tidak dapat dilakukan supervisi pihak Universitas Sebelas Maret mengembangkan pelaporan online sehingga bagi peserta yang lokasinya tidak bisa dilakukan supervisi bisa menyampaikan laporan dengan mengirimkan data dan foto-foto dokumentasi ke pihak Universitas, untuk selengkapnya berkaitan dengan panduan pelaporan via online ini dicantumkan dibagian lampiran. Mekanisme

pelaporan via online ini cukup efektif untuk mengatasi kendala lokasi-lokasi yang tidak bisa terjangkau selama pelaksanaan supervisi dan ini yang membedakan Universitas Sebelas Maret dengan perguruan tinggi yang lain dimana hanya Universitas Sebelas Maret yang mengembangkan model pelaporan seperti ini dan tentunya ke depan bisa dikembangkan oleh perguruan tinggi lain sebagai solusi adanya sekolah yang tidak bisa disupervisi dikarenakan keterbatasan dana yang dialokasikan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK. Untuk lebih mengoptimalkan supervisi yang ada pihak Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu institusi pelaksana membarikan masukan kepada Direktorat Pembinaan SMK agar paling tidak bisa mengalokasikan dana untuk supervisi setengah dari jumlah sekolah sasaran. Agar pelaksanaan supervisi di lapangan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah hendaknya seorang supervisor juga bisa memberikan semacam workshop kepada guru-guru yang ada di sekolah, kemudian pihak sekolah juga memberikan masukan agar mereka diberikan wewenang untuk memberikan penilaian kepada peserta tidak hanya berasal dari hasil supervisi sehingga penilaian yang diberikan bisa lebih obyektif.

Kemudian tugas seorang supervisor seharusnya memiliki tugas yang hampir sama dengan tugas dosen pembimbing yaitu mengadakan komunikasi dengan peserta pendampingan, mencatat perkembangan peserta, mengadakan pertemuan, dan melakukan observasi ke sekolah-sekolah yang didampingi, kemudian pada saat dilapangan hendaknya seorang supervisor melakukan :

5. Membimbing pembuatan rencana pembelajaran
6. Membimbing metode-metode dan teknik pembelajaran
7. Meninjau pelaksanaan program pendampingan di sekolah
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pendampingan (memberikan penilaian kepada peserta)

Jika tugas-tugas diatas dilaksanakan dengan baik kegiatan supervisi diharapkan bisa memberikan manfaat yang optimal selama berada di sekolah yang dikunjungi.

4.4.5. Waktu Pelaksanaan

Aspek selanjutnya adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Indikator keberhasilan program berkaitan dengan waktu adalah waktu pelaksanaan yang sesuai dengan tahun pelajaran di sekolah dan tahun akademik di perguruan tinggi serta berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan yang sesuai dengan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Waktu yang selama ini dilaksanakan dalam program pendampingan ini adalah 1 bulan digunakan untuk persiapan di perguruan tinggi pelaksana seperti untuk sosialisasi, proses rekrutmen peserta serta pembekalan dan waktu selama 5 bulan penuh bagi peserta berada di sekolah mulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus. Berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan Suhadi,S.Pd, MT selaku pejabat di Direktorat Pembinaan SMK menjelaskan :

“Berkaitan dengan waktu pelaksanaan program kita desain selama 5 bulan penuh di sekolah hal ini mengingat banyak peserta masih berstatus mahasiswa sehingga mereka tidak terlalu lama meninggalkan kampus.”

“Kemudian untuk waktu mulai memang sangat tergantung dari pengesahan DIPA yang ada karena kan bersumber dari dana APBN.”

Berkaitan dengan jangka waktu dan periode waktu yang dilaksanakan selama ini Drs. A.G Thamrin, M.Pd selaku koordinator dari perguruan tinggi menjelaskan :

“ Waktu yang paling cocok sebenarnya adalah di awal semester itu waktu yang paling match, berarti bulan Agustus, kemudian juga di awal Februari. Dan untuk disekolah juga pas karena mereka sedang di awal tahun ajaran, kalau yang selama ini dilaksanakan kan berada ditengah pelajaran.”

Jadi dari sisi periode waktu dimana dimulai pada bulan April memang dirasa kurang ideal sebab berada di tengah tahun ajaran dan tidak dimulai pada awal tahun pelajaran, hal ini juga ditegaskan lagi oleh DR. Adi Syahputra dari Universitas Negeri Jakarta :

“Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program perlunya dilakukan sinkronisasi antara kalender sekolah, kalender akademik perguruan tinggi dan system anggaran Kemendiknas. Karena sekolah yang menjadi fokus dalam program ini, maka sebaiknya yang menjadi acuan adalah kalender sekolah. Jika memungkinkan pelaksanaan program pendampingan yaitu: dari januari s/d Juni dan dari juli s/d Desember.”

Dengan adanya periode waktu yang tidak sesuai dengan kalender akademik di perguruan tinggi juga menyebabkan perguruan tinggi kesulitan untuk menjangkau peserta dari kalangan mahasiswa dimana idealnya adalah pada saat mahasiswa belum diterjunkan untuk program PPL kemudian bagi *fresh graduate* adalah setelah pelaksanaan wisuda sehingga mereka masih berada di lingkungan kampus dan belum bekerja di tempat lain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dra. Katiah, M.Pd dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung :

“Idealnya memang sesuai kalender akademik, dari sisi UPI itu kan february-juni itu satu semester sehingga kita juga tidak kesulitan mencari peserta untuk yang masih mahasiswa, kalo untuk yang fresh graduate ya setelah mereka wisuda.”

Kemudian dari sisi periode waktu selama 5 bulan Dra. Katiah, M.Pd menjelaskan lebih lanjut :

“Untuk masalah waktu..memang yang dibutuhkan dilapangan 5 bulan terasa tidak cukup paling tidak satu semester malah ada sekolah yang mengusulkan selama satu tahun tapi hal ini akan menjadi kendala bagi yang masih berstatus mahasiswa.”

Jadi dari periode waktu yang selama ini dilaksanakan akan lebih baik jika dilaksanakan selama 2 periode yaitu 2 X 5 bulan tidak hanya 5 bulan, kemudian berkaitan dengan kekhawatiran bahwa yang masih berstatus mahasiswa akan terlalu lama meninggalkan sekolah hal ini bisa diatasi dengan melakukan pergantian peserta dimana peserta pada periode pertama ditarik ke kampus dan digantikan mahasiswa lain pada periode kedua.

Dalam hal periode waktu ini dari pihak sekolah yang didampingi juga menilai kurang optimal dan meminta untuk dimulai pada awal tahun ajaran di sekolah :

“kalau dari sisi waktu menurut kami kurang ideal karena kedua peserta ini kan datang pada saat kegiatan sekolah sudah berjalan, ya kalau bisa pas saat awal tahun

pelajaran sehingga kami bisa membuat program untuk mereka di awal tahun pelajaran sekolah.”

“ya, sebaiknya sekitar bulan juli atau agustus lah..sehingga kita juga bisa memberikan beban kerja ke mereka seperti guru-guru yang lain.”

Dari studi dokumen berkaitan dengan tahun ajaran di sekolah menengah kejuruan secara umum diperoleh data sebagai berikut :

1	Juli	libur semester, PSB dan Hari pertama Sekolah (MOS)
2	Agustus	Bulan efektif belajar Bulan efektif belajar, sebagian libur awal puasa dan hari
3	September	raya
4	Oktober	Bulan efektif belajar
5	Nopember	Bulan efektif belajar Bulan efektif belajar,sebagian ujian semsster dan libur
6	Desember	semster
7	Januari	Bulan efektif belajar
8	Februari	Bulan efektif belajar
9	Maret	Bulan efektif belajar, Uji kompetensi untuk kelas XII
10	April	Bulan efektif belajar, ujian nasional dan ujian sekolah
11	Mei	Bulan efektif belajar Bulan efektif belajar, Uji kompetensi/Mid Semester/semester
12	Juni	Bulan efektif belajar, libur semester

Dari uraian diatas bisa dijelaskan bahwa untuk bisa mengoptimalkan waktu pelaksanaan program perlu adanya sinkronisasi antara pihak Direktorat Pembinaan SMK, Perguruan tinggi pelaksana dan Sekolah sasaran sehingga kebermanfaatan peserta di sekolah akan bisa optimal. Waktu yang ideal bagi perguruan tinggi adalah sekitar bulan juli dan februari dimana pada bulan tersebut pihak institusi bisa mendapatkan peserta yg kompeten dimana para mahasiswa tingkat akhir belum diterjunkan dalam program PPL, sedangkan pihak sekolah meminta peserta sudah berada di sekolah pada awal tahun ajaran baru atau awal semester sehingga pihak sekolah bisa menyusun jadwal guru untuk mengajar disekolahnya sejak awal sebelum pelajaran dimulai.

4.4.6. Pendanaan

Indikator keberhasilan program pada komponen pendanaan meliputi tersalurkannya dana dari Direktorat Pembinaan SMK ke rekening perguruan tinggi dengan tepat waktu, teralokasikan dan tercukupinya dana dari perguruan tinggi untuk biaya operasional peserta selama di lokasi sekolah serta kesesuaian penggunaan dana oleh pihak perguruan tinggi dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati dengan pihak Direktorat Pembinaan SMK.

Berkaitan dengan proses pencairan dana dari pihak Direktorat Pembinaan SMK ke rekening Universitas Bapak Senen selaku bendahara program di Universitas Sebelas Maret menjelaskan :

“cuman yang terkadang menjadi kendala adalah lamanya proses pencairan dana dari Jakarta ke rekening di universitas, padahal peserta sudah harus diberangkatkan ,untuk mengatasinya biasanya untuk biaya pembekalan kita talangi terlebih dahulu memakai uang dari universitas karena kan untuk pembekalan tidak membutuhkan dana yang besar.”

Dari telaah dokumen yang ada diketahui bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari KPPN wilayah III Jakarta tanggal 26 April 2010 ke Rekening pihak Universitas Sebelas Maret yaitu :

Nama Bank : BNI

Cabang : Sebelas Maret Surakarta

No. Rekening : 0122705399

Atas Nama : Rektor Universitas Sebelas Maret

Lamanya proses pencairan dana memang disebabkan prosedur yang harus ditempuh, berdasarkan panduan keuangan dari pihak Direktorat Pembinaan SMK bahwa dana bantuan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan) ke Rekening institusi (bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui prosedur penyaluran sebagai berikut:

- a. Segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi oleh penerima bantuan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diteruskan ke Biro Keuangan;

- b. Biro Keuangan berdasarkan usulan SPP dari Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta III;
- c. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan usulan SPM dari Biro Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Bank Penyalur Bantuan;
- d. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta III, BRI mentransfer dana bantuan ke rekening bank penerima.

Dari telaah terhadap dokumen diketahui bahwa Direktorat Pembinaan SMK mengalokasikan Rp. 350 juta dana ke setiap institusi pelaksana kemudian pihak Universitas Sebelas Maret Surakarta menyusun anggaran penggunaan dana di dalam proposal, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 4.1 Anggaran Biaya

No.	Komponen Pembiayaan	Jumlah
1.	Pengelolaan program	Rp 16.800.000
2.	Persiapan Program	Rp 17.300.000
3.	Pelaksanaan Program	Rp 305.000.000
4.	Evaluasi dan Pelaporan Program	Rp 10.900.000
Jumlah		Rp 350.000.000

Adapun rincian pembiayaan untuk pengelolaan program meliputi biaya komunikasi, korespondensi, koordinasi pengelola. Pembiayaan untuk persiapan program meliputi seleksi mahasiswa calon peserta serta pelaksanaan pembekalan. Pembiayaan untuk pelaksanaan program meliputi pembiayaan untuk supervisi dan akomodasi peserta yang meliputi komponen pembiayaan sebagai berikut :

- *Living cost*
- Biaya transportasi dari Perguruan Tinggi ke lokasi sekolah (Pulang-Pergi)
- Biaya transport lokal untuk lokasi-lokasi tertentu

- Biaya asuransi
- Biaya bahan

Adapun pembiayaan untuk evaluasi dan pelaporan program meliputi evaluasi program, seminar hasil serta pelaporan yang meliputi *inception report*, *progress report* dan *final report*.

Untuk penggunaan dana sesuai kesepakatan dalam petunjuk pelaksanaan yang ada yaitu berdasarkan prosentase alokasi anggaran yang dibagi ke dalam 4 bagian dengan rincian sebagai berikut :

8.15%	Persiapan
6.71%	Pembekalan
84.15%	Pelaksanaan
0.99%	Pelaporan

Dalam pelaksanaannya prosentase tersebut disesuaikan dengan penggunaan dilapangan sesuai *at cost* yang ada.

Indikator selanjutnya adalah teralokasikannya dan tercukupinya dana untuk peserta. Untuk pembiayaan peserta berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak UNS adalah sebagai berikut :

- *Living cost* : untuk peserta dalam Jawa Rp. 800 ribu dan peserta luar Jawa Rp. 1,2 Juta
- Biaya transportasi dari kampus ke lokasi sekolah-Pulang-Pergi untuk dalam Jawa Rp. 200 ribu dan luar Jawa dengan menggunakan pesawat dan perjalanan darat menuju lokasi sebesar Rp. 500 ribu
- Biaya Asuransi untuk tiap peserta sebesar Rp. 100 ribu
- Biaya bahan sebesar Rp. 600 ribu

Dari komponen pembiayaan serta besaran dana yang diperoleh peserta program pendampingan berikut hasil *focus group discussion* dengan peserta :

“karena saya tidak kost jadi ya cukup tapi kalo kost sendiri ya mungkin ngak cukup.” (Peserta di SMK N 1 Kemusu)

“kalo pengalaman saya ya kalo Rp. 800 ribu kalo buat hidup ya sebenarnya pas-pasan, kebetulan kan dari pihak sekolah tidak memberikan fasilitas apapun jadi kan kita kost, jadi mengeluarkan biaya Rp. 200 ribu sebab kan bulanan terus untuk makan sekali makan Rp. 8 ribu lah ..jadi ya cuman cukup untuk makan sama bayar kost aja, kalo untuk transport sehari-hari saya rasa kurang (Peserta di SMK N 1 Jumo, Temanggung)

“kalo saya relatif cukup irit karena saya disediakan fasilitas oleh sekolah ada penginapan, ada alat untuk memasak tapi kalo teman saya yang di tempat lain tidak dapat fasilitas dari sekolah, biaya hidup di Kalimantan Selatan cukup tinggi, harga 1 gelas teh manis Rp. 3.500, soto lamongan Rp. 15.000, ayam penyet Rp. 25.000, 1 mangkok bakso Rp. 12.500 (Peserta di SMK N 2 Marabahan, Kalimantan Selatan)

Dasar yang digunakan untuk penentuan besaran *living cost* peserta adalah upah minimum provinsi yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2 UMP di beberapa Propinsi di Wilayah Indonesia

No	Provinsi	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
1	Jawa Tengah	575,000	660,000
2	Yogyakarta	700,000	745,695
3	Kalimantan Selatan	930,000	1,024,500

Sumber: Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Desember 2010

Dari studi dokumen dan *focus group discussion* dengan peserta kondisi selama di sekolah berbeda-beda, dimana rinciannya adalah sebagai berikut :

- Dibantu dicarikan tempat kost oleh pihak sekolah tetapi dengan membayar sendiri
- Dicarikan kost sekaligus biaya kost dibayar pihak sekolah
- Tinggal di asrama sekolah dengan gratis
- Tinggal di rumah kepala sekolah atau guru
- Biaya kost ditanggung pihak sekolah plus dapat honor dari pihak sekolah sesuai dengan jam mengajar dan kegiatan lain di sekolah misal panitia pengawas ujian

Berdasarkan wawancara dengan peserta diketahui bahwa jika peserta kost sendiri dan tidak dibantu oleh pihak sekolah maka dana yang diberikan oleh pihak

Perguruan Tinggi sangat minim dan pas-pasan. Dalam hal komponen pembiayaan hendaknya menjadi catatan ke depan agar ada ketegasan dari pihak Direktorat Pembinaan SMK dan pihak Perguruan Tinggi pelaksana apakah dana yang ada sudah mencakup biaya untuk tempat tinggal atau tidak kemudian apakah sekolah sasaran berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi peserta atau tidak sebab dari telaah terhadap surat pengantar yang dibuat oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK tidak ada ketentuan agar pihak sekolah memberikan tempat tinggal bagi peserta namun hanya menyebutkan agar pihak sekolah membantu sesuai kemampuan, kemudian jika ke depan ada ketentuan agar pihak sekolah sasaran diwajibkan menyediakan tempat tinggal bagi peserta apakah hal ini tidak memberatkan bagi sekolah sebab sekolah yang menjadi sasaran merupakan sekolah yang masih baru dan minim dari sarana-prasarana dan juga keuangan yang terbatas. Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa dalam hal pembiayaan perlu adanya peran dari pemerintah kabupaten/kota agar program ini bisa berjalan dengan baik dimana dalam hal tempat tinggal bisa ditanggung oleh pemerintah kabupaten kota melalui APBD sehingga tidak memberatkan pihak sekolah yang memang sebagian besar masih merupakan sekolah baru.

Kemudian dari sisi penggunaan dana berdasarkan telaah terhadap laporan keuangan yang ada sudah cukup lengkap dimana setiap pengeluaran sudah tercatat, bukti penyetoran pajak maupun bukti penggunaan untuk pengelolaan program, persiapan program, pelaksanaan program dan pelaporan program, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa sesuai aturan keuangan yang ada bahwa setiap pengeluaran diatas 1 juta harus dibubuhi materai dan tanda tangan pejabat yang berwenang namun berdasarkan studi dokumen terhadap laporan keuangan pihak Universitas Sebelas Maret hal ini belum dilakukan. Dengan demikian indikator keberhasilan program yang berkaitan dengan komponen pendanaan sudah dapat terpenuhi namun ada catatan khusus berkaitan dengan ketercukupan dana *living cost* untuk peserta serta kelengkapan laporan keuangan.

4.4.7. Pelaporan

Pada prinsipnya laporan pelaksanaan program yang dibuat oleh institusi harus dapat menyajikan data dan memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program Pendampingan SMK sampai hasil pekerjaan dinyatakan selesai. Jenis laporan yang dibuat terdiri dari: Laporan Pendahuluan (*Inception report*) yang mencakup program kerja, penyusunan waktu/jadual, personal yang terlibat, lokasi pendampingan, materi, tata cara (metode) pelaksanaan pekerjaan yang digunakan dan target yang akan dicapai selama pelaksanaan pendampingan kemudian laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*), yang menggambarkan kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan. Kemajuan pekerjaan haruslah meliputi semua komponen kinerja yang telah dicapai, laporan ini harus dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dimulainya kegiatan atau setelah dilaksanakan supervisi dan terakhir yaitu laporan akhir (*final report*), merupakan laporan komprehensif yang terdiri dari laporan seluruh kegiatan dilampiri dengan bukti hasil pelaksanaan pekerjaan, foto-foto dokumentasi kegiatan peserta di sekolah dan bukti penggunaan dana. Berkaitan dengan 3 jenis laporan yang diharuskan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK ini pihak perguruan tinggi pelaksana mengatakan :

“Untuk proses pelaporan kita setuju ada 3 jenis pelaporan yaitu laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir. Jadi 3 jenis laporan tersebut harus dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan program jadi kalo hanya laporan akhir saja saya kira tidak cukup karena waktunya panjang.” (Dra. Katiah, M.Pd- UPI Bandung)

Dalam hal waktu penyampaian laporan Bapak Suhadi, S.Pd, MT dari Direktorat Pembinaan SMK menjelaskan :

“berkaitan dengan penyampaian laporan ini memang banyak dari perguruan tinggi pelaksana yang tidak sesuai terutama pada saat penyampaian laporan kemajuan, biasanya mereka menyampaikan ke kita bareng dengan penyampaian laporan akhir. jadi mereka menyampaikan laporan pada saat mengikuti kegiatan pemaparan akhir di direktorat.”

Penyampaian laporan kemajuan memang menjadi kendala bagi perguruan tinggi pelaksana dikarenakan laporan dari peserta program juga terlambat terutama untuk

sekolah yang jauh dan tidak bisa dilakukan supervisi ke lokasi sekolah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Dra.Katiah, M.Pd dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung :

“kendala dalam penyampaian laporan adalah bagi sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dan tidak disupervisi sehingga agak menyulitkan dalam penyampaian laporan.”

Adapun di Universitas Sebelas Maret diatasi dengan penyampaian laporan secara online sebagaimana dijelaskan oleh Drs. A.G. Thamrin,M.Pd :

“Untuk mekanisme pelaporan kita siasati melalui web dimana peserta mengirimkan datanya secara online kemudian tinggal kita kompilasi.”

Berikut adalah kutipan laporan salah satu peserta yang disampaikan secara Online yang berada di SMK N 1 Puring, Kabupaten Kebumen :

“Alhamduliillahirrobbil Alamin, kehadiran kami di SMK N 1 Puring ini disambut dengan baik. Terima kasih kepada bapak Budi Jatmiko S.Pd,M.Pd selaku kepala SMK N 1 Puring yang telah menerima kedatangan kami dengan baik.

Mohon maaf saya baru bisa memberikan kabar hari ini, dikarenakan kondisi daerah kami yang berada di daerah yang jauh dari keramaian, untuk ke warnet saya harus menempuh jarak sekitar 25 km, dan tidak terdapat angkutan umum. Saya harus meminjam sepeda motor Bapak kos.”

Untuk panduan laporan secara online bisa dilihat pada bagian lampiran.

Pihak Direktorat selaku pembuat kebijakan perlu membuat outline laporan yang jelas sebab berdasarkan telaah dokumen yang ada antara satu institusi dengan institusi yang lain berbeda-beda, ada yang tipis sehingga hanya sedikit informasi yang tersampaikan, ada juga yang tebal tapi banyak hal yang tidak diperlukan dan justru informasi-informasi yang memang diperlukan tidak tersampaikan dalam laporan tersebut seperti :

- Kondisi kebutuhan guru produktif yang ada di tiap-tiap sekolah baik jenis program keahliannya maupun jumlah yang dibutuhkan
- Biaya hidup yang diperlukan di tiap-tiap wilayah
- Kondisi sarana dan prasaranan di sekolah

- Keberterimaan warga sekolah selama peserta berada di sekolah
- Fasilitas apa saja yang diberikan oleh sekolah kepada peserta
- Kondisi geografis sekolah serta route menuju sekolah

Data-data tersebut sangat penting untuk dirangkum dan disampaikan dalam laporan akhir sebagai data real untuk perbaikan pelaksanaan program di tahun selanjutnya.

4.5. Aspek Produk

Evaluasi produk adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Berdasarkan indikator keberhasilan program yang ada pada bab II, aspek *product* mencakup aspek *teaching* dan *non-teaching*. Pada saat peserta sampai di sekolah yang didampingi mereka akan melakukan observasi awal. Observasi ini meliputi observasi *teaching* dan *non-teaching*. Observasi *teaching* meliputi empat bidang, yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, sarana-prasarana, dan bidang humas. Selain itu dilakukan juga observasi *non-teaching* yang meliputi observasi lingkungan sekolah, perpustakaan, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), kantin sekolah, Bimbingan Konseling (BK), dan kegiatan ekstrakurikuler serta organisasi siswa yang ada di SMK. Observasi administrasi sekolah meliputi beberapa bidang, yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana-prasarana, bidang humas, dan bidang administrasi Tata Usaha (TU) sekolah. Observasi ini dilakukan dengan cara mengambil data di SMK melalui kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang menangani bidang-bidang tersebut dan melalui pegawai TU SMK. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengambilan data berupa berkas atau dokumen yang tersedia di SMK.

4.5.1. Aspek Teaching

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab IV bahwa tujuan dilaksanakannya program pendampingan SMK diantaranya adalah membantu keberlangsungan proses pembelajaran pada SMK yang masih kekurangan tenaga pengajar, khususnya mata pelajaran kelompok produktif. Indikator kinerja program pada *teaching* yaitu adanya guru produktif yang mengajar sesuai dengan program keahlian di sekolah,

terbantunya proses KBM di sekolah, adanya Perangkat Pembelajaran untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah.

Berkaitan dengan aspek teaching di sekolah yang didampingi berikut adalah hasil yang disampaikan oleh peserta dari hasil *focus group discussion* :

“yang saya lakukan selama di sekolah antara lain dalam kegiatan belajar mengajar : penyusunan RPP dan silabus yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru, penataan perpustakaan dengan dibuatkan nomer untuk buku-buku baru diberi catalog, buku-buku dipisah sesuai dengan temanya tapi kendalanya memang tempat yang belum mencukup. Di bidang ekstrakurikuler kegiatannya yaitu pramuka, kegiatan olahraga dan PMR (palang merah remaja).” (Mardiyanto, SMK Negeri 1 Kismantoro)

“dengan membantu mengajar di kelas, membantu administrasi sekolah serta penataan perpustakaan, untuk perpustakaan..sekarang di sekolah SMK N 1 Kemusu lebih tertata rapi dan ditambah dengan adanya buku-buku baru.” (Widoretno, SMK Negeri 1 Kemusu)

“saya mengajar selama 12 jam dalam seminggu kemudian juga program ekstrakurikuler dengan software AUTOCAD.” (Titis Setyawan, SMK Negeri 1 Karangdadap)

“tugas saya menggantikan mengajar di kelas untuk guru yang berhalangan hadir, kemudian membantu tugas non-teaching seperti persiapan ujian, penambahan beberapa literature buku di perpustakaan, saya juga membuat poster K3 di bengkel sekolah.” (Latif Rowi, SMK Negeri 2 Demak)

“saya melakukan tugas mengajar mata diklat yang gurunya kurang trus juga ketika gurunya berhalangan hadir, kemudian memback-up program-program yang dilaksanakan di sekolah dengan dipandu oleh guru yang bertanggung jawab, mengembangkan program ekstrakurikuler serta membantu penataan admisnistrasi sekolah dan perpustakaan.” (Ari Tri Hatmanto, SMK Negeri 1 Pringsurat)

“membantu proses KBM di sekolah dan juga praktikum, membenahan bengkel praktek sepeda motor, kemudian untuk administrasi sekolah dengan pengisian buku induk pada bagian tata usaha, untuk ekstrakurikuler yaitu membantu kegiatan pramuka.” (Thoriq Abdullah, SMK Negeri 1 Jumo)

“membantu kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan penataan perpustakaan.” (Agus Susilo, SMK Negeri 2 Marabahan, Kalimantan Selatan)

Untuk membantu proses kegiatan belajar –mengajar dengan baik harus disiapkan perangkat pembelajaran dengan baik. Jadi para peserta pendampingan membantu dan mengobservasi perangkat kurikulum yang digunakan di SMK, satuan pembelajaran, sistem penilaian, pengaturan jadwal pembelajaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di SMK sebagaimana pernyataan salah satu peserta :

“yang saya lakukan selama di sekolah antara lain dalam kegiatan belajar mengajar : penyusunan RPP dan silabus yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru.....” (Mardiyanto, SMK Negeri 1 Kismantoro)

“saya mengajar selama 12 jam dalam seminggu” (Titis Setyawan, SMK Negeri 1 Karangdadap)

Berdasarkan studi dokumen yang ada menyebutkan bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah yang didampingi adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, namun pada kenyataannya belum dilakukan dengan benar karena banyak guru yang kurang paham dan masih memerlukan banyak bimbingan mengenai sistem kurikulum tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya guru yang belum dapat membuat satuan pembelajaran dengan patokan KTSP. [Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan \(KTSP\)](#) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat:

- kerangka dasar dan struktur kurikulum,
- beban belajar,
- kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan
- kalender pendidikan.

SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Memang di beberapa sekolah telah banyak yang melaksanakan dengan baik dalam pembuatan satuan pembelajaran, namun tidak semua mempraktekkannya. Jadi satuan pembelajaran tersebut hanya dibuat ketika ada supervisi oleh pengawas yang datang memantau. Hal ini dinilai kurang baik mengingat fungsi satuan pembelajaran adalah sebagai patokan guru dalam memberikan materi pembelajaran. Dengan adanya program pendampingan ini sebagian besar SMK sekarang sudah memahami kurikulum KTSP dan langsung diaplikasikan dengan penyusunan satuan pembelajaran. Hasilnya dapat di lihat bahwa saat ini setiap SMK telah memiliki silabus dan RPP untuk setiap mata diklat yang diajarkan. Hal ini berkat inisiatif dari para peserta pendampingan yang diberikan kepada pihak sekolah.

Sistem penilaian di SMK dibagi dalam tiga jenis mata pelajaran, yaitu mata pelajaran adaptif, normatif, dan produktif. Sistem penilaian pada ketiga bidang tersebut seharusnya tidak sama, namun pada kenyataannya guru di SMK tidak dibedakan pada sistem penilaian dan hanya menggunakan patokan penilaian secara umum. Penilaian pada mata diklat jurusan produktif pada dasarnya menggunakan tes uji kompetensi untuk mengukur ketuntasan belajar siswa pada setiap kompetensi yang diberikan guru, namun di beberapa SMK belum diadakan sistem penilaian tersebut karena adanya keterbatasan sarana prasarana serta tenaga pendidik.

Berikut adalah petikan wawancara salah satu peserta pendampingan SMK di Jawa Tengah : *“dalam kegiatan pendampingan SMK ini saya juga melakukan pendekatan dengan siswa atau taruna-taruni pada saat istirahat. Secara garis besar para Taruna/Taruni belum memiliki gambaran yang cukup tentang kompetensi yang diajarkan di SMK ini, terlebih mereka juga belum mengerti jika sudah lulus nanti bekerja dimana. Hal ini yang sering saya kemukakan kepada kepala sekolah dan Guru Produktif agar bisa memberikan gambaran awal mengenai kompetensi siswa dan lulusan SMK ini. Belum adanya sarana ataupun alat-alat praktek di SMK ini membuat kegiatan pembelajaran tidak seimbang mengingat tujuan keberadaan sekolah ini adalah meluluskan Taruna/i yang siap kerja. Padahal sampai progres report ini dibuat belum pernah diadakan praktek. (Laporan Progress Report-UNS-2010)*

Dari studi dokumen terhadap laporan akhir yang dibuat oleh peserta bahwa untuk pengaturan jadwal pembelajaran di sekolah dinilai masih kurang sesuai karena adanya perubahan pada mata diklat yang diberikan pada siswa, terutama pada jurusan peternakan dan keteknikan. Selain itu sedikitnya alokasi waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah menyebabkan alokasi waktu yang diberikan untuk mata diklat produktif dalam satu minggu sangat terbatas, yaitu dua belas jam. Hal ini menyebabkan jam tersebut digunakan guru untuk mengejar materi sehingga kegiatan praktek banyak dilakukan diluar jam pelajaran atau tidak pernah dilakukan praktek dengan alasan alokasi waktu tidak ada. Kemudian berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SMK berdasarkan studi dokumen yang ada umumnya bersifat *“Teacher Center”* atau terpusat pada guru, dimana siswa hanya belajar secara

teoritis tanpa pernah mempraktekkannya sehingga banyak siswa yang kurang paham akan materi yang dipelajari. Kegiatan belajar mengajar oleh guru hanya diampu dengan menggunakan media buku seadanya dengan alasan keterbatasan dana sekolah dan sulitnya memperoleh modul pelajaran khusus untuk mata pelajaran di SMK. Adanya keterbatasan tenaga pendidik di daerah menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi guru dengan mata diklat yang diampu sehingga banyak guru yang mengampu mata diklat yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Sebagian guru SMK dalam mengajar sering tidak mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) karena guru hanya mengacu pada silabus saja sehingga materi yang diberikan dalam setiap pertemuan cenderung kurang tertata baik. Banyak guru yang membuat RPP jika akan ada supervisi yang meneliti kelengkapan administrasi guru. Untuk lebih bisa mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta selama berada di sekolah hendaknya biaya bahan yang diberikan oleh pihak institusi bisa digunakan untuk pengadaan buku sebagai media pembelajaran, serta DVD yang berisi e-book buku kejuruan yang berjumlah 100 lebih judul buku bisa di cetak atau di print secukupnya sehingga hal ini bisa membantu proses pembelajaran di SMK yang di dampingi. Para peserta juga harus memahami karakteristik pembelajaran di SMK yang berbeda dengan sekolah umum, dimana pendidikan kejuruan dirancang agar para lulusannya siap kerja dan berwirausaha sehingga kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan dunia usaha-dunia industri sehingga seorang tenaga pengajar harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relatif dinamis dan terus berkembang. Berdasarkan wawancara dan studi dokumen yang ada terhadap laporan akhir peserta menunjukkan bahwa semua peserta telah membantu proses KBM di sekolah walaupun dengan jumlah jam belajar yang berbeda-beda dan telah memenuhi indikator keberhasilan program yang ditetapkan pada bab II.

4.5.2. Aspek Non-Teaching

Pada aspek *non-teaching* sesuai dengan indikator keberhasilan program yang telah ditetapkan pada bab II berkaitan dengan administrasi sekolah, penataan perpustakaan, penataan lingkungan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain diluar aspek *teaching*. Dari studi dokumen yang ada administrasi di SMK yang didampingi sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup baik karena sebagian pendataannya sudah dilakukan dengan menggunakan unit komputer. Namun karena tidak adanya tenaga yang kompeten untuk bisa bekerja dengan komputer maka pemanfaatannya belum optimal dan komputer yang ada justru banyak yang belum terpakai sehingga mudah rusak. Selain itu keberadaan listrik yang sering mati juga menjadi alasan penyusunan data akhirnya dilakukan secara manual. Keberadaan peserta pendampingan di sekolah ikut membantu dalam pengoperasian komputer serta memberikan kursus singkat kepada staf tata usaha di sekolah dan juga membantu penataan administrasi sekolah sehingga tertata dengan baik sebagaimana pernyataan salah satu peserta :

“selama di sekolah saya membantu proses belajar-mengajar juga membantu : administrasi sekolah, penataan perpustakaan, pengelolaan lingkungan kemudian juga siswa menjadi lebih jelas apa yang telah saya berikan untuk materi produktif.”
(*Andhitya Setia Candra, SMK Negeri 1 Sawit*)

Untuk penataan perpustakaan para peserta ikut membantu menata buku yang ada, memberi nomor dan lain-lain sebagaimana pernyataan dari salah satu peserta :

“.....penataan perpustakaan dengan dibuatkan nomer untuk buku-buku baru diberi catalog, buku-buku dipisah sesuai dengan temanya tapi kendalanya memang tempat yang belum mencukupi...” (*Mardiyanto, SMK Negeri 1Kismantoro*)

Dari studi dokumen yang dilakukan diketahui bahwa ruang perpustakaan SMK umumnya sudah tersedia, namun buku yang tersedia sangat minim. Bahkan ada pula buku yang ada diperpustakaan tidak mencerminkan referensi pembelajaran. Misalnya, ada perpustakaan yang referensinya hanya majalah atau koran-koran yang sudah terpotong dan terbitan lama itu saja jumlahnya sedikit. Selain itu fasilitas yang tersedia juga kurang sehingga perpustakaan di SMK kurang terurus dan hanya digunakan untuk nongkrong siswa yang malas mengikuti pelajaran. Pihak sekolah

sebenarnya berusaha melakukan perbaikan, namun mengalami kendala dalam pendanaannya. Dengan bantuan peserta pendampingan dan kerjasama dengan pihak sekolah, beberapa sekolah menyepakati untuk pengadaan buku-buku referensi dipergustakaan. Adapun judul dan jenis buku ditugaskan kepada peserta pendampingan untuk membantu mencarikan, dan akhirnya meskipun belum 100%, namun sebagian besar SMK sasaran saat ini sudah memiliki perpustakaan dengan isinya walaupun masih minim dengan sarana yang belum memadai.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang terjadi, dimana disatu pihak pemerintah dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 mengisyaratkan bahwa setiap satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar namun disisi lain perpustakaan sekolah nampaknya belum mendapatkan perhatian yang serius dari dunia pendidikan, bahkan pihak sekolah terkadang memposisikan keberadaan perpustakaan sekolah hanya sebagai pelengkap saja, hal ini dapat diketahui misalnya dari anggaran untuk perpustakaan sekolah yang masih kecil. Menurut Pawit M dalam I Made Gelgel (Juni,2009) keberadaan perpustakaan merupakan hal yang penting sebagai salah satu sumber belajar yang memungkinkan para tenaga pendidik dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan. Keberadaan perpustakaan di sekolah kejuruan menjadi sangat penting mengingat di dunia kejuruan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang secara dinamis sehingga para tenaga pendidik dan siswa dituntut untuk bisa mengikutinya.

Dari aspek lingkungan sekolah secara umum lokasi sekolah merupakan terletak jauh dari kota. Sehingga hal ini menyebabkan akses menuju sekolah tidak bisa dicapai dengan mudah. Hingga saat ini perawatan terhadap lingkungan SMK dinilai kurang baik karena banyak SMK masih sering dilanda banjir ketika musim hujan tanpa ada tindakan penanggulangan berarti dari pihak sekolah. Lingkungan sekolah masih terlihat kurang tertata di beberapa bagian. Setiap hari siswa hanya membersihkan ruang kelas saja sehingga kebersihan lingkungan sekitar SMK cenderung kurang diperhatikan. Masukan dari peserta pendampingan mengenai perbaikan lingkungan sekolah cenderung kurang diterima dengan alasan keterbatasan

dana dan faktor alam dimana SMK sering dilanda banjir sehingga pihak sekolah cenderung kurang peduli pada lingkungan sekolah yang kurang terawat.

Tugas yang dilakukan oleh para peserta berkaitan dengan penataan lingkungan sekolah adalah memberikan mengusulkan mengenai program pemilahan sampah sehingga sampah yang dipilah dapat diolah menjadi pupuk melalui kegiatan praktek siswa, kerja bakti dengan memberdayakan siswa untuk membersihkan sekolah melalui gerakan jum'at bersih, hingga saat ini yang sudah terlaksana adalah penataan ruang guru sehingga ruangan terlihat lebih rapi sehingga guru dapat bekerja dengan lebih nyaman. Sedangkan program pemilahan sampah yang diusulkan sedang dalam proses perencanaan karena alasan keterbatasan dana, sarana prasarana dan tenaga.

Berkaitan dengan Kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa hingga saat kedatangan peserta pendampingan tidak pernah ada karena keterbatasan tenaga guru sehingga tidak ada pembimbing. Guru SMK merasa sudah banyak menghabiskan waktunya dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya sehingga hanya sebagian guru yang peduli terhadap kegiatan organisasi siswa. Oleh karena itu para pendamping membantu pihak SMK dalam merintis pembentukan Organisasi siswa, yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS. Program pembentukan organisasi siswa ini diharapkan dapat menjadi awal atau tonggak bagi kegiatan siswa lainnya seperti pramuka, PMR, dan lain-lain. Yang menunjukkan bahwa sebelum ada program pendampingan SMK, kegiatan ekstrakurikuler hampir tidak ada. Kalaupun ada masih sangat sedikit dan bersifat sporadis dan tidak terbimbing. Untuk kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMK mayoritas sudah ada. Namun karena adanya keterbatasan dan sarana prasarana sehingga UKS di SMK belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan ada beberapa SMK yang fungsi UKS di alihkan dan dijadikan ruang kantor pribadi oleh beberapa guru SMK. Apabila ada siswa yang sakit maka langsung disarankan untuk pulang atau berobat ke puskesmas. Adapun manfaat yang dirasakan oleh peserta selama mengikuti program pendampingan antara lain adalah:

- pengalaman dan pengembangan diri mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat.

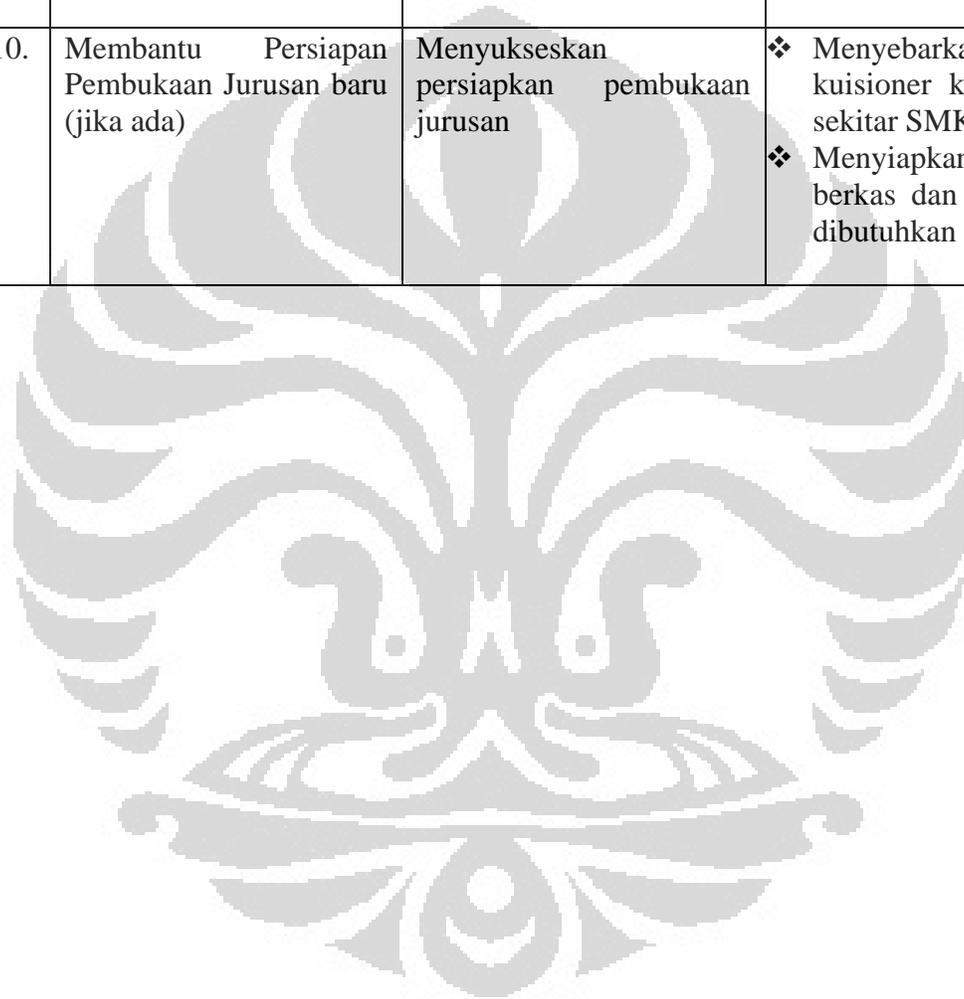
- dapat merasakan betapa jauhnya kesenjangan pendidikan yang ada di Jawa dengan di luar pulau Jawa.
- memunculkan rasa cinta tanah air, karena dapat berinteraksi dengan siswa, guru dan masyarakat yang berasal dari berbagai suku, ras, dan agama.

Kemudian hasil lengkap pelaksanaan program pendampingan yang dilakukan oleh peserta selama di sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Rangkuman Hasil Kerja Peserta di Sekolah

NO	PROGRAM	TUJUAN	KEGIATAN
1.	Observasi Sekolah	Mengetahui kondisi sekolah	❖ Pengarahan dari Kepala Sekolah ❖ Observasi
2.	Penyusunan Program Kerja	Sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pendampingan	Menyusun program kerja
3.	Membantu Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Mensukseskan program KBM sekolah	❖ Membuat RPP ❖ Menjadi Team Teaching ❖ Mengajar dikelas ❖ Membantu pelaksanaan praktikum
4.	Membantu pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan	Mensukseskan program kerja yang disusun oleh koordinator perpustakaan	❖ Penataan Buku ❖ Administrasi perpustakaan ❖ Merawat dan mengembangkan koleksi perpustakaan
5.	Membantu Pelaksanaan Piket KBM	Membantu kelancaran KBM	❖ Menjadi petugas piket
6.	Kegiatan Jum'at Bersih	Menjaga kebersihan sekolah dan menumbuhkan budaya hidup bersih di sekolah	❖ Mengkoordinir siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih ❖ Ikut membantu dalam kegiatan jum'at bersih
7.	Kegiatan Ekstrakurikuler a. Sepak bola b. Internet c. Pramuka	Suksesnya program kerja yang ditentukan oleh koordinator kegiatan ekstrakurikuler khususnya	❖ Ikut terjun dalam kegiatan ekstrakurikuler

	d. PMR	Sepak Bola, Internet, Pramuka dan PMR	
8.	Membantu Pelaksanaan Ujian Semester	Mensukseskan pelaksanaan ujian semester	❖ Menjadi pengawas dalam pelaksana ujian akhir semester
9.	Membantu Classmetting	Mensukseskan kegiatan Classmetting yang diadakan sekolah	❖ Menyusun jenis dan jadwal pertandingan ❖ Menjadi juri dalam kegiatan
10.	Membantu Persiapan Pembukaan Jurusan baru (jika ada)	Menyukseskan persiapan pembukaan jurusan	❖ Menyebarkan kuisioner ke SMP di sekitar SMK ❖ Menyiapkan berkas-berkas dan data yang dibutuhkan



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan secara umum sudah cukup baik namun masih perlu diperbaiki dalam beberapa aspek agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi sekolah kejuruan yang menjadi sasaran. Program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan menjadi salah satu solusi di dalam pemenuhan guru produktif di sekolah kejuruan di era otonomi daerah dimana kewenangan dalam hal pengangkatan dan pendistribusian guru adalah menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua peserta program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan selama berada di sekolah terlibat dalam kegiatan *teaching* dengan jumlah jam mengajar yang berbeda-beda sesuai penugasan dari pihak sekolah dan kegiatan *non-teaching* yang beragam.

5.2 Rekomendasi

Mengacu kepada hasil penelitian terhadap evaluasi pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan baik oleh kalangan akademisi maupun kalangan praktisi program :

1. Kalangan Akademisi

Beberapa hal yang bisa direkomendasikan dari hasil penelitian ini untuk kalangan akademisi adalah :

- a. Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan suatu penelitian yang mengarah kepada evaluasi hasil yang lebih lengkap sehingga diharapkan dengan tindak lanjut penelitian dapat diketahui sejauh mana tujuan program dapat tercapai dan seberapa besar tingkat kepuasan sasaran program.
- b. Konsep dan rumusan dari program ini perlu mendapat kajian lebih lanjut dari para pakar pendidikan dan pemangku jabatan dalam mengatasi kendala

kekurangan guru di era otonomi daerah khususnya untuk guru produktif di sekolah kejuruan.

2. Kalangan Praktisi

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa rekomendasi untuk kalangan praktisi baik pembuat program yaitu Direktorat Pembinaan SMK, Pelaksana Program yaitu kalangan perguruan tinggi dan sekolah sebagai penerima program.

a. Rekomendasi untuk Direktorat Pembinaan SMK :

- Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik terhadap program yang digulirkan baik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun kepada sekolah sehingga diharapkan akan terjalin kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan program bisa lebih optimal.
- Dalam hal pembiayaan perlu adanya sharing daerah terutama dalam hal pembiayaan tempat tinggal disamping perlu adanya kenaikan biaya hidup bagi peserta terutama untuk daerah yang memang memiliki biaya hidup tinggi.
- Periode waktu pelaksanaan hendaknya melihat kepada tahun pelajaran di sekolah yaitu pada awal tahun ajaran atau pada awal semester sedangkan untuk perguruan tinggi idealnya dilakukan sebelum dilaksanakan program PPL dan setelah wisuda sehingga pihak perguruan tinggi relatif lebih mudah mencari peserta yang kompeten.

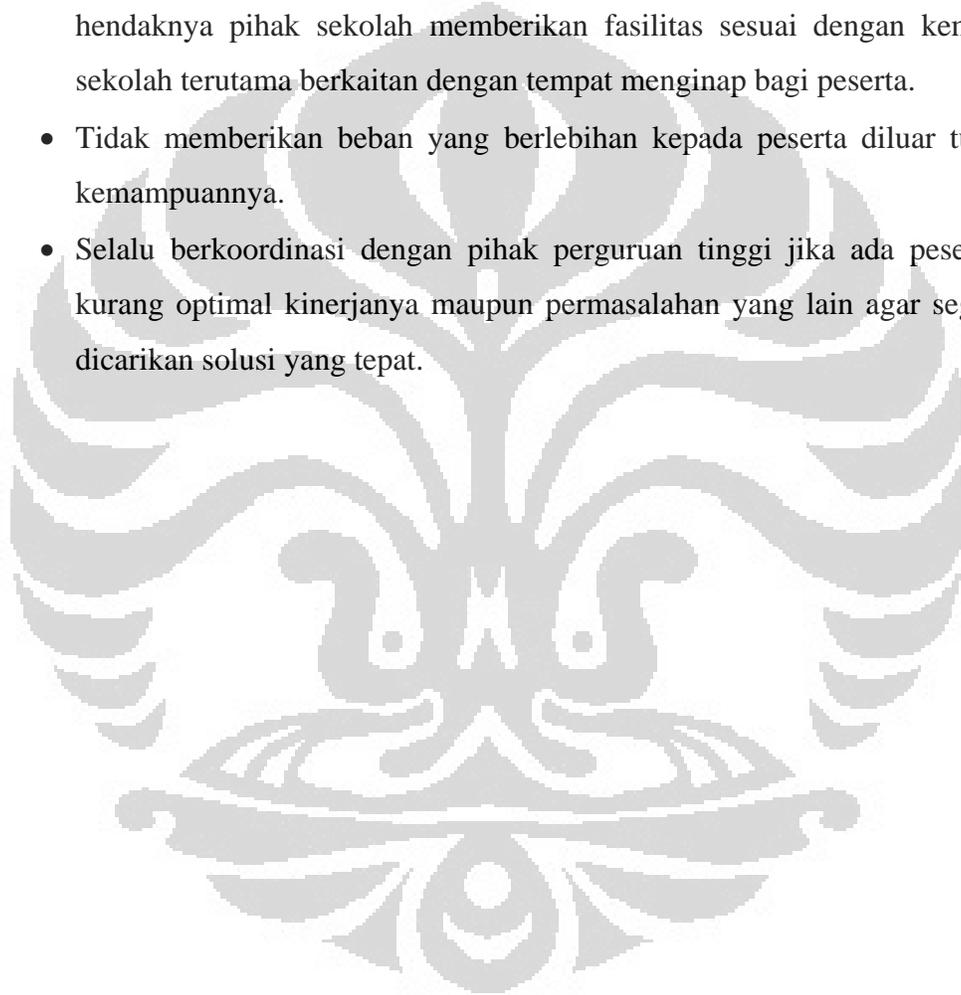
b. Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi Pelaksana :

- Sosialisasi yang dilakukan untuk menjaring peserta lebih maksimal sehingga bisa mendapatkan peserta yang kompeten dan memiliki program studi yang sesuai dengan program keahlian yang dibutuhkan di sekolah.
- Lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dan dengan sekolah sasaran berkaitan dengan kebutuhan guru produktif yang dibutuhkan.
- Materi pembekalan yang diberikan kepada peserta lebih ditingkatkan lagi baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga peserta yang diterjunkan ke sekolah memang sudah memiliki kompetensi yang cukup.

- Berkoordinasi dengan pihak Direktorat Pembinaan SMK berkaitan dengan alokasi dana yang diberikan terutama untuk alokasi dana *living cost* bagi peserta.
- Penyampaian laporan agar tepat waktu dan sesuai dengan outline yang telah disepakati.

c. Rekomendasi untuk SMK :

- Keberadaan peserta di sekolah adalah untuk membantu kegiatan sekolah maka hendaknya pihak sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan sekolah terutama berkaitan dengan tempat menginap bagi peserta.
- Tidak memberikan beban yang berlebihan kepada peserta diluar tugas dan kemampuannya.
- Selalu berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi jika ada peserta yang kurang optimal kinerjanya maupun permasalahan yang lain agar segera bisa dicarikan solusi yang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Adi, Isbandi Rukminto .(2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Edisi revisi Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Arikunto,Suharsimi & Jabar, Cipi S.A (2009). *Evaluasi Program Pendidikan:Pedoman teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara
- Basrowi dan Suwandi.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Biro PKLN Depdiknas. (2004). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2004-2009*. Jakarta: Biro PKLN Depdiknas.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama.
- Bungin, B.(2010). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan ke-4. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Buku Data dan Informasi 2009 Universitas Sebelas Maret*.(2009).Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Direktorat Pembinaan SMK (2006). *Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK*..Depdiknas, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan SMK (2009). *Kajian Literatur Monev*. Jakarta : Ditjen Pendidikan Dasar, Kemdiknas.
- Direktorat Pembinaan SMP. (2011).*Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Pada Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Ditjen Pendidikan Dasar, Kemdiknas.

- Djojonegoro, Wardiman, Prof., Dr.-Ing, (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT.Jayakarta Agung Offset
- Ife, Jim. (1995). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne Australia: Longman Australia Pty.Ltd.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: FISIP Departemen Administrasi Universitas Indonesia.
- Irwanto. (2006). *Focused Group Discussion (FGD) Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismawan, Bambang dan Pamuji, Otok.(1994). *LSM dan Program IDT*. Jakarta : PT. Penebar Swadaya.
- Kajian Strategi Ekspansi SMK menuju Rasio jumlah siswa SMK : SMA 67:33*. (2010).Direktorat Pembinaan SMK. Jakarta.
- Laporan Akhir Program Pendampingan SMK tahun 2009*.(2009).Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Laporan Akhir Program Pendampingan SMK tahun 2010*.(2010).Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Laporan Akhir Program Pendampingan SMK tahun 2010*.(2010).Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Laporan Akhir Program Pendampingan SMK tahun 2010*.(2010).Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Midgley, James. (1995). *Social Development : The Development Perspective in Social Welfare*. London : Sage Publications.
- Moleong, Lexy. J (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto dkk. (1994). *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media.

Musa, Subari. (2005). *Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Y-Pin Indonesia

OESP-UNDP. (1997). *Result-oriented Monitoring and Evaluation-A Handbook for Programme Managers*. New York: United Nation for Development Programme (UNDP).

Panduan Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan tahun 2010.(2010).Direktorat Pembinaan SMK. Jakarta.

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2005-2009.(2006).Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Depdiknas.

Prijono, Onny S. dan Pranarka. A.M.W.(1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Center For Strategic and International Studies (CSIS).

Rokhman, Fathur dkk .(2007). *Kajian kebutuhan Guru SMK menurut bidang keahlian yang dibuka*.Jakarta : Direktorat PSMK.

Studi Pasar Kerja Indonesia dan Sekitarnya untuk Lulusan SMK.(2010). Direktorat PSMK-Jakarta.

Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Stufflebeam L, Daniel cs (1991). *Evaluation Models, viewpoint on Educational and Human Services Evaluation* : Kluwer-Nijhoff Publishing- Boston.

Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Monitoring & Evaluation : Some Tools, Methods & Approaches. (2004).Washington D.C : World Bank

Jurnal, Makalah dan lain-lain

- Abdulraihan.(2007). Efektifitas, Efisiensi dan Produktivitas Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. <http://abdulraihan.wordpress.com>
- Arijanto, Agus.(2007). *Pengantar Bisnis*. Jakarta :Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB.
- Bukatiasa, I Wayan. (2009). Makalah : *Efektivitas Implementasi Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Tabanan Bali*
- Djamal, Chamsiah, Junaidi, Arifin, Mudatsir, Arif, Sulfiana, Endang dan Martuti Dwi Anik. (1994). *Panduan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)
- Hadiyanto.(1999). *Program Pengalaman Lapangan(PPL) Kependidikan di Michigan State University*. Bulletin Universitas Negeri Padang No.04 Tahun XXII Desember 1999
- Mahdiansyah.(2007). *Kajian Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Mengajar Guru*. Puslitjaknov, Balitbang, Kemdiknas.
- Panduan FGD: Empowering Citizens To Combat The Resource Curse (Memberdayakan Masyarakat Untuk Melawan Kutukan Sumberdaya)*.(November,2009).Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
- KekuranganGuruSMK.22September2010.<<http://www.penapendidikan.com/indonesia-kekurangan-10000-guru-smk.html>>
- UNICEF. (1991). *Evaluation-A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation-Making a Difference? Evaluation Office*.
- Makalah: Analisis dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. 22 September 2010.<<http://tenagadikmenjur.itgo.com/pkt/butuh/anligu.htm>>.
- Maknun, Johar.(2008).*Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Universitas Pendidikan Indonesia-Bandung.
- Miarso, Yusufhadi .(2008). *Peningkatan Kualifikasi Guru Dalam Perspektif Teknologi Pendidikan*. Universitas Negeri Semarang.
- Nasir, Moh. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Panduan Praktik Pengalaman Lapangan Universitas DR.Soetomo Surabaya.(2005).
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo,Surabaya.

*Pedoman Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Tahun Akademik
2008/2009.*(2008). UPT PPL Universitas Borneo, Tarakan.

Pedoman Program Pengenalan Lapangan.(2006).Universitas Negeri Jakarta.

Soal Pengangkatan Tenaga Kependidikan. 24 September
2010.<<http://els.bappenas.go.id/upload/other/Soal%20Pengangkatan.htm>>.

Tesis

Ariyanto, Gamar.(2001). *Pendampingan Sebagai Salah Satu Alternatif
Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pendampingan Masyarakat Suku
Nawaripi di Kabupaten Mimika,Propinsi Irian Jaya).* Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

Djarmiko, Ari Eko Wibowo.(2000). *Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program
Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Nelayan (P2K2PN) di Kota
Bandung.* Tesis Pasca Sarjana Studi Perencanaan Wilayah Kota.ITB

Evitriana, Eka.(2005). *Pendampingan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/P2KP (Studi kasus:Kelurahan
Empang Kec. Bogor Selatan Kota Bogor).*Tesis Program Pascasarjana Kajian
Pengembangan Perkotaan UI.

Kardeti, Denti.(2004).*Pendampingan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana
Tindak Komunitas(Community Action Plan).* Tesis Progam Pascasarjana
Ilmu Kesejahteraan Sosial UI.

Kusumo, Hendro.(2009). *Evaluasi Kinerja Sistem Pendataan Sekolah di Lingkungan
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.* Tesis Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

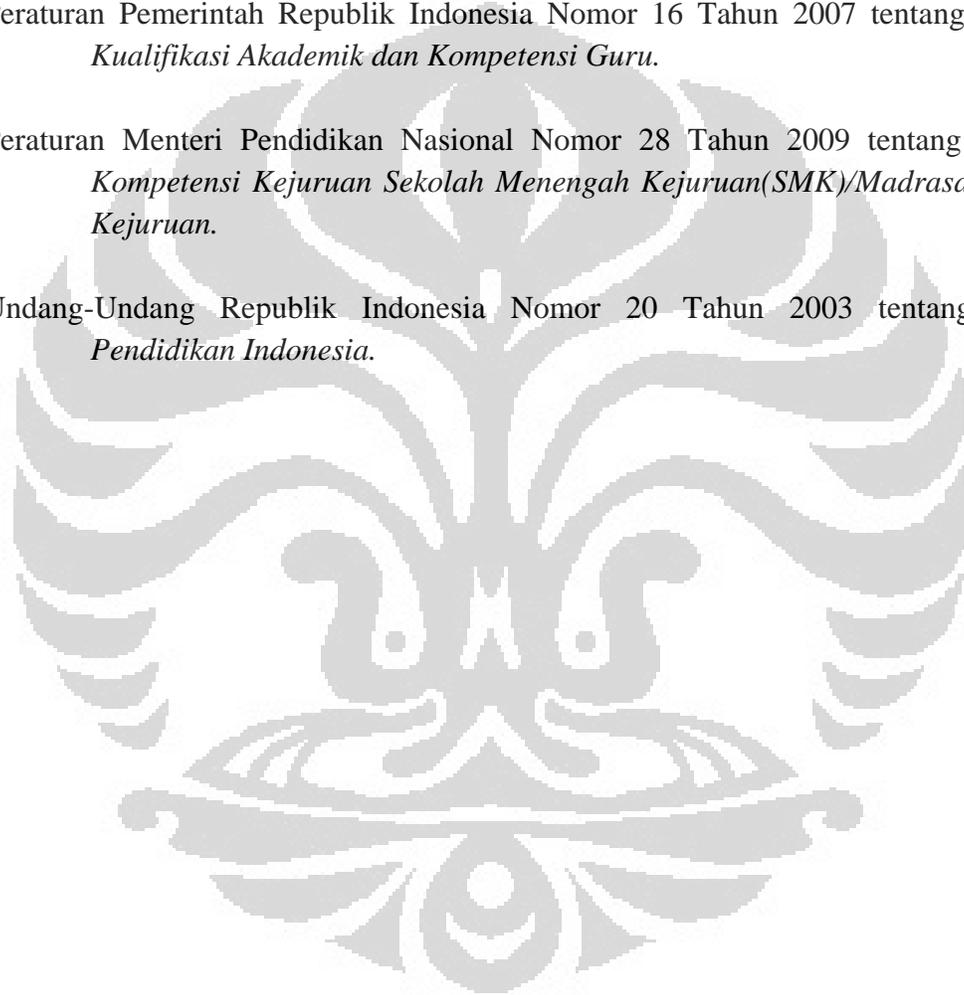
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2008 tentang *Koordinasi dan Pengendalian Program*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.

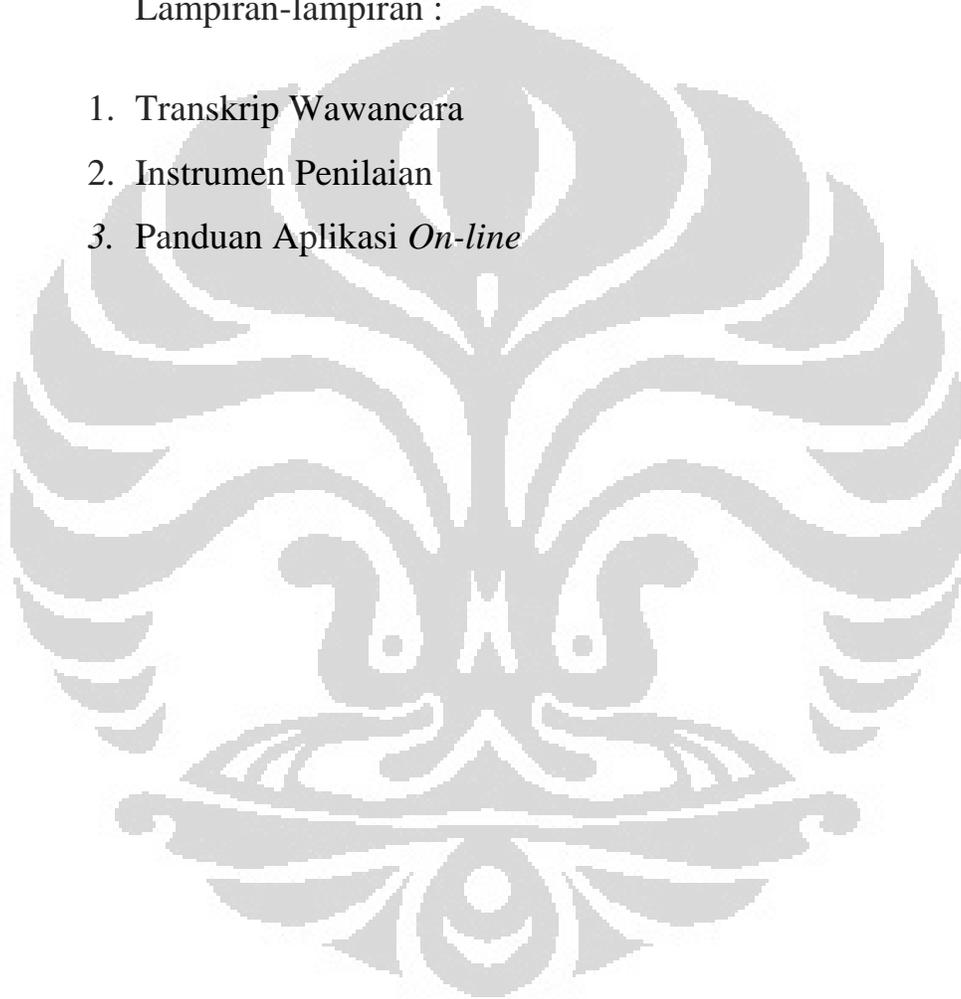
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Indonesia*.



Lampiran-lampiran :

1. Transkrip Wawancara
2. Instrumen Penilaian
3. Panduan Aplikasi *On-line*



PEDOMAN WAWANCARA

- A. Penanggung Jawab Program di Direktorat Pembinaan SMK
- B. Koordinator Program di Perguruan Tinggi
- C. Dosen Pembimbing Lapangan
- D. Bendahara Program di Perguruan Tinggi
- E. Peserta Program Pendampingan
- F. Kepala Sekolah
- G. Guru Pamong di SMK

TOPIK WAWANCARA :

- A. Penanggung Jawab Program di Direktorat Pembinaan SMK :

1. Latar belakang dan relevansi Program
2. Ketersediaan Juklak dan Panduan Pelaksanaan
3. Organisasi dan Manajemen pelaksanaan Program
4. Kriteria Sekolah
5. Sosialisasi Program
6. Seleksi dan Penetapan Perguruan Tinggi Pelaksana Program
7. Seleksi dan Penetapan Lokasi Sekolah
8. Pelaporan oleh Perguruan Tinggi Pelaksana
9. Waktu Pelaksanaan Program
10. Pemanfaatan Dana

- B. Koordinator Program di Perguruan Tinggi :

1. Latar belakang dan relevansi Program
2. Ketersediaan Juklak dan Panduan Pelaksanaan
3. Organisasi dan Manajemen pelaksanaan Program
4. Kriteria Peserta
5. Sosialisasi Program
6. Seleksi dan Penetapan Peserta
7. Seleksi dan Penetapan Lokasi Sekolah
8. Pelaksanaan Pembekalan
9. Proses Keberangkatan
10. Pelaksanaan Supervisi
11. Pelaporan oleh Perguruan Tinggi Pelaksana
12. Waktu Pelaksanaan Program
13. Pemanfaatan Dana

- C. Dosen Pembimbing Lapangan :

1. Proses keberangkatan peserta ke Sekolah
2. Pelaksanaan Supervisi
3. Kompetensi Peserta

D. Bendahara Program di Perguruan Tinggi :

1. Pengelolaan Keuangan
2. Kondisi Sarana Prasarana Pendukung

E. Peserta Program Pendampingan SMK :

1. Pendanaan yang diberikan pihak Perguruan Tinggi
2. Kriteria Peserta yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
3. Sosialisasi
4. Materi Pembekalan
5. Proses keberangkatan ke lokasi Sekolah
6. Pelaporan hasil pelaksanaan program
7. Hasil yang dicapai selama berada di Sekolah

F. Kepala Sekolah :

1. Relevansi Program
2. Kondisi dan Kriteria Sekolah
3. Kesesuaian Jurusan Peserta
4. Kompetensi Peserta
5. Waktu Pelaksanaan Program
6. Hasil yang dicapai

G. Guru Pamong di Sekolah :

1. Kondisi dan Kriteria Sekolah
2. Kompetensi Peserta
3. Waktu Pelaksanaan Program
4. Hasil yang dicapai

HASIL WAWANCARA

A. Penanggung Jawab Program, Direktorat Pembinaan SMK

Identitas Informan

Nama : Suhadi, S.Pd, MT

Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Program, Direktorat Pembinaan SMK

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1. Latar belakang dan relevansi Program	“ yang melatar belakanginya digulirkannya program ini adalah realita yang ada di lapangan dimana banyak sekolah baru yang

	<p>kita bangun belum memiliki guru produktif walaupun ada mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. “</p> <p>“saya kira program ini sangat relevan dengan dengan apa yang menjadi tujuan kementerian, kebijakan pokok kementerian pendidikan nasional kan salah satunya menyebutkan yaitu untuk mewujudkan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. “</p>
Aspek Input	
2. Ketersediaan Juklak dan Panduan Pelaksanaan	<p>“ ya, setiap program yang kita gulirkan pasti kita buat Panduan pelaksanaan dan Kerangka Acuan Kerjanya yang hal tersebut sebagai panduan selama pelaksanaan program serta sebagai sarana sosialisasi dengan pihak-pihak terkait agar memiliki pemahaman yang sama. Itu kita buat di awal tahun. “</p>
3. Organisasi dan Manajemen pelaksanaan Program	<p>“ Semuanya sudah kita tuangkan baik dalam Panlak maupun kerangka acuan kerja, “</p> <p>“ setiap program yang ada akan dibuatkan team yang akan menangani program-program tersebut , tim tersebut terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan beberapa anggota</p>
4. Kriteria Sekolah	<p>“ Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran ini adalah sekolah yang merupakan unit sekolah baru dimana sekolah tersebut dibangun dengan biaya dari kita yang bersumber dari dana APBN dan sharing dari daerah. Sebenarnya pada saat MOU sudah disebutkan bahwa kewajiban pemenuhan guru produktif di sekolah merupakan kewajiban dari pemerintah daerah sesuai dengan aturan di era otonomi daerah, tapi memang pada pelaksanaannya dilapangan banyak sekolah yang sudah kita bangun ketersediaan guru produktif di sekolah-sekolah tersebut masing kurang bahkan terkadang tidak ada sehingga dengan program ini kita coba membuat terobosan untuk mengatasi ketidakterediaan atau kekurangan guru-guru produktif di SMK.</p> <p>“Jadi memang sekolah yang menjadi sasaran program ini adalah sekolah-sekolah yang merupakan unit sekolah baru yang diprioritaskan dibangun tahun 2005 keatas.”</p>

Aspek Proses	
5. Sosialisasi Program	<p>“Semua program-program yang kita gulirkan kita sosialisasikan pada saat Rapat koordinasi dengan mengundang baik dengan dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, kemudian juga semua program yang ada di Direktorat pembinaan SMK dibuatkan panduan pelaksanaannya dari mulai mekanisme pengajuan sampai dengan pelaporannya untuk kemudian di upload di website resmi direktorat yang ada di www.ditpsmk.net sehingga semua pihak yang ingin mengetahui program yang akan dijalankan oleh direktorat pembinaan SMK bisa mengaksesnya dengan mudah. “</p> <p>“Kemudian khusus program ini kita juga membuat surat informasi ke Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang kita anggap kompeten untuk bisa berpartisipasi dalam program ini agar mereka bisa mengajukan proposal dengan melampirkan profil dari Perguruan Tinggi tersebut.”</p>
6. Seleksi dan Penetapan Perguruan Tinggi	<p>“Bagi perguruan tinggi yang berminat mengikuti program ini mereka diminta untuk mengajukan proposal ke pihak direktorat untuk kemudian kita lakukan penilaian, adapun perguruan tinggi yang telah melaksanakan program ini pada tahun sebelumnya akan kita evaluasi kinerjanya, kemudian perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi akan ditetapkan dengan SK Direktur Pembinaan SMK.”</p>
7. Seleksi dan Penetapan Lokasi Sekolah	<p>“ya, jadi untuk penetapan sekolah yang menjadi sasaran program ini kita tetapkan setelah penetapan perguruan tinggi pelaksana. Sekolah-sekolah yang kita dampingi mengacu kepada datapokok SMK. Jadi kita ada program pendataan sekolah dimana kita mendata sekolah-sekolah kejuruan di seluruh Indonesia baik itu dari sisi jumlah siswa, kondisi pendidik dan tenaga kependidikan dan juga sarana dan prasarana sekolah. Datapokok sekolah ini kita lakukan dan kita update setiap tahun sehingga dari program tersebut kita tahu sekolah-sekolah yang memang masih kekurangan guru produktif.”</p>

	<p>“Setelah kita tahu sekolah-sekolah sasaran kemudian kita buat zona sesuai dengan Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan program ini misalnya dari Universitas Negeri Medan kita minta mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam walaupun memang ada beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Pulau Jawa kita minta untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ada di luar Pulau Jawa seperti dari Universitas Pendidikan Indonesia disamping mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat juga kita minta untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu.”</p>
<p>8. Pelaporan oleh Perguruan Tinggi Pelaksana</p>	<p>“ Sesuai dengan panduan pelaksanaan yang sudah kita buat, laporan yang kita minta kepada perguruan tinggi pelaksana ada 3 jenis : laporan awal (inception report), laporan kemajuan (progress report) dan laporan akhir (final report), semua laporan harus dibuat rangkap 2 dan dikirim ke kami.” Laporan-laporan tersebut kita minta kepada mereka sebagai alat control bagi kita sehingga ketika ditengah jalan ada yang kurang sesuai dapat segera kita lakukan evaluasi dan koordinasi dengan perguruan tinggi pelaksana.” “ya, untuk waktu penyampaian laporan kita sudah sampaikan kepada perguruan tinggi pelaksana dimana laporan awal harus disampaikan setelah dilaksanakan pembekalan kurang lebih 1 bulan setelah program dilaksanakan, kemudian untuk laporan perkembangan disampaikan setelah dilaksanakan supervise atau kurang lebih 3 bulan setelah program dilaksanakan, adapun untuk laporan akhir paling lambat harus disampaikan 1 bulan setelah program selesai.” “khusus untuk laporan akhir ada 3 jenis yaitu laporan pelaksanaan itu sendiri, kemudian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan foto dokumentasi pelaksanaan.”</p>

		<p>“berkaitan dengan penyampaian laporan ini memang banyak dari perguruan tinggi pelaksana yang tidak sesuai terutama pada saat penyampaian laporan kemajuan, biasanya mereka menyampaikan ke kita bareng dengan penyampaian laporan akhir pada saat kegiatan pemaparan akhir di direktorat.”</p>
9. Waktu Pelaksanaan Program		<p>“Berkaitan dengan waktu pelaksanaan program kita desain selama 5 bulan penuh di sekolah hal ini mengingat banyak peserta masih berstatus mahasiswa sehingga mereka tidak terlalu lama meninggalkan kampus.”</p> <p>“Kemudian untuk waktu mulaimemang sangat tergantung dari pengesahan DIPA yang ada karena kan bersumber dari dana APBN.”</p>
10. Pemanfaatan Dana		<p>“Semua dana yang diberikan ke pihak perguruan tinggi harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, dana tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh pihak penerima.”</p> <p>“ya, berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana sudah kita sampaikan ke mereka pada saat dilakukan bimbingan teknis.”</p>

HASIL WAWANCARA

B. Koordinator Program di Perguruan Tinggi

1. Nama : Drs. AG Thamrin, M.Pd, M.Si
PT : Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jabatan di Perguruan Tinggi : Kaprodi PTB-FKIP
Jabatan : Koordinator Program

2. Nama : Dra. Katiah, M.Pd
PT : Universitas Pendidikan Indonesia
Jabatan di Perguruan Tinggi : Kepala Unit di LPPM UPI
Jabatan : Koordinator Program

3. Nama : DR. Adi Syahputra, M.Si
 PT : Universitas Negeri Jakarta
 Jabatan di Perguruan Tinggi : Sekretaris LPM UNJ
 Jabatan : Koordinator Program

1. Nama Informan : Drs. A.G Thamrin
 Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret-Surakarta
 Jabatan di Perguruan Tinggi : Kaprodi PTB-FKIP
 Jabatan Program : Koordinator Program

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1. Latar belakang dan Relevansi Program	<p>“ya, saya kira program ini sejalan dengan misi dan visi yang diemban oleh Universitas Sebelas Maret , relevansi juga sangat jelas antara tujuan program pendampingan SMK dengan tujuan perguruan tinggi yang bisa dilihat dari Tri Darma Perguruan Tinggi terutama yang berkaitan dengan meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat dan pihak Universitas Sebelas Maret juga sudah aktif dalam program-program peningkatan mutu sekolah diantaranya program wajar 9 tahun, penyusunan kurikulum sekolah dan lain-lain”</p>
Aspek Input	
2. Panduan Pelaksanaan	<p>“Penjelasan yang diberikan oleh pihak Direktorat saya rasa cukup lengkap dan jelas, sudah tertuang dalam panduan pelaksanaan mapun KAK yang ada “ “Pada saat dilakukan bimbingan teknis juga disampaikan ruang lingkup program yang harus dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi pelaksana”</p>
3. Organisasi dan Manajemen	<p>Untuk ketersediaan program studi di Universitas Sebelas Maret secara umum terpenuhi semua kecuali untuk jurusan pariwisata, jadi ada 2 sekolah di daerah nanggulan yang membuka program pariwisata. Untuk solusinya kita melakukan <i>outsourcing</i> dengan perguruan tinggi lain tapi kita tidak ada kerjasama secara khusus dengan perguruan tinggi tersebut, jadi</p>

	<p>kedua peserta tersebut dibawah koordinasi pihak Universitas Sebelas Maret. Kemudian untuk jurusan pertanian kita ambilkan dari ilmu murni nantinya untuk metode mengajar kita perkuat pada saat pembekalan.”</p> <p>“..kemudian dari sisi sarana prasarana secara umum memadai ada internet, ada web program pendampingan, ada juga group pendampingan di facebook</p>
4. Kriteria Peserta	<p>“....Peserta yang terlibat adalah merupakan <i>fresh graduate</i>, kemudian mahasiswa yang sudah menempuh 110 SKS baik yang sudah melakukan PPL atau belum. Bagi yang sudah melakukan PPL maka bisa untuk memperbaiki nilai PPL-nya sedangkan bagi yang belum program ini sebagai pengganti dari program PPL.”</p>
Aspek Proses	
5. Sosialisasi	<p>“Untuk sosialisasi idealnya memang melibatkan dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama untuk lokasi-lokasi yang berada di luar Pulau Jawa.</p> <p>“Kemudian untuk sosialisasi dalam proses recruitmen peserta melalui pemberitahuan secara resmi lewat surat ke semua program studi terkait, kemudian juga via online.</p>
6. Seleksi dan Penetapan	<p>“ Untuk proses seleksi dilakukan melalui dua cara yaitu melalui seleksi administrasi dan melalui wawancara. Seleksi administrasi dilihat Indeks Prestasi kemudian dilakukan dengan wawancara.</p> <p>“Materi wawancara berupa kesanggupan untuk melakukan program pendampingan serta ruang lingkup yang harus dilakukan”.</p> <p>“Idealnya memang pada saat sosialisasi peserta sudah harus tahu lokasinya terlebih dahulu, sedangkan selama ini kan peserta baru tahu lokasinya setelah proses seleksi dan penetapan sehingga terkadang setelah tahu lokasi malah mundur padahal pada saat wawancara sudah kita wanti-wanti.”</p>
7. Pelaksanaan Pembekalan	<p>“Pembekalan yang dilakukan saya kira cukup memadai, untuk yang ilmu murni memang kita perkuat dalam hal teori mengajar, kita juga ada materi khusus tentang IT sehingga</p>

	pada saat dilapangan peserta kita sudah mempunyai kemampuan yang cukup terutama untuk masalah jaringan komputer.”
8. Proses Pemberangkatan	“Setiap peserta kita bekal surat pengantar dari pihak Direktorat Pembinaan SMK serta surat tugas dari Perguruan tinggi, khusus untuk peserta luar Jawa memang kita antar dan kita bekerjasama dengan Dinas Provinsi yang ada.”
9. Pelaksanaan Supervisi	“ Kalo dipikir untuk pendanaan supervisi sebenarnya tidak cukup, idealnya memang fifty-fifty, artinya dari 45 peserta ya separohnya lah..., tapi kita bisa siasati dimana satu orang supervisor melakukan kunjungan ke beberapa sekolah karena memang pihak sekolah ingin sekolahnya dikunjungi.”
10. Pelaporan oleh Perguruan Tinggi pelaksana	“Untuk mekanisme pelaporan kita siasati melalui web dimana peserta mengirimkan datanya secara online kemudian tinggal kita kompilasi.”
11. Waktu pelaksanaan program	“ Waktu yang paling cocok sebenarnya adalah di awal semester itu waktu yang paling match, berarti bulan Agustus, kemudian juga di awal Februari. Dan untuk disekolah juga pas karena mereka sedang di awal tahun ajaran, kalau yang selama ini dilaksanakan kan berada ditengah pelajaran.”
12. Penggunaan Dana	<p>“Standar yang kita gunakan kan sebenarnya memakai UMR, kalo boleh dikatakan sebenarnya ya sangat minim, kalo standar yang diberikan dari pihak direktorat kan menggunakan UMR tapi UMR sendiri sebenarnya tidak layak karena di Jawa Tengah sendiri masih digugat. Kita sudah cek sendiri dilapangan bahwa memang pendanaan yang diberikan masih kurang apalagi yang berada di luar Pulau Jawa”</p> <p>“ Untuk mekanisme pemberian dana kita berikan langsung selama 4 bulan, kemudian 1 bulan sisanya kita berikan di akhir kegiatan setelah peserta memberikan laporan akhir ke pihak Universitas.</p>
Aspek Product	
13. Hasil yang telah dilakukan oleh	“ Secara umum dengan adanya program ini sekolah-sekolah sangat terbantu dalam hal

Peserta di Sekolah	<p>ketersediaan guru produktif di Sekolah, walaupun dari laporan dilapangan memang masih belum mencukupi sebab selama ini kan setiap satu program keahlian kita berikan satu peserta..nah terkadang ada sekolah yang meminta dua peserta bahkan ada yang menuliskan surat permintaan khusus ke pak Direktur. Ada juga pihak dari dinas Kabupaten Banjarbaru di Kalimantan yang datang ke kita meminta secara khusus agar sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya diberikan program pendampingan ini.”</p> <p>“Kemudian juga di sekolah banyak peralatan yang belum terinstall maka oleh peserta kita pasang dan kita gunakan seperti handtractor, kemudian juga peralatan computer yang tidak terpakai maka kita coba optimalkan”.</p>
--------------------	---

2. Nama Informan : Dra. Katiah, M.Pd
Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Indonesai
Jabatan di Perguruan Tinggi : Kepala Unit di LPPM UPI
Jabatan Program : Koordinator Program

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1. Latar belakang dan Relevansi Program	<p>“Pada intinya program ini memang sangat sesuai dengan visi-misi UPI yah..apalagi kalo kita lihat dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Dan memang mahasiswa yang terlibat mereka ada kewajiban untuk praktek kerja lapangan atau PKL yang bertempat di SMK-SMK.</p> <p>“Pihak UPI bisa terlibat dalam program ini dimana sebelumnya ada sosialisasi dari Direktorat Pembinaan SMK kemudian kita tindaklanjuti dengan pengajuan proposal</p>
Aspek Input	
3. Panduan Pelaksanaan	<p>“Kita di UPI juga membuat buku panduan, panduan tersebut memang harus dibuat sebagai acuan bagi mahasiswa dan pihak mitra agar memiliki pemahaman yang sama</p>

	<p>sehingga tidak ada miss, di dalam buku panduan tersebut ada latar belakang, ada tujuan , ada targetan. Adapaun target dalam program ini ada 3 hal yaitu : penguatan manajemen sekolah, penguatan KBM produktif dan ekstrakurikuler sekolah, kemudian juga rambu-rambu penyusunan laporan oleh peserta.</p>
4. Organisasi dan Manajemen	<p>“ Dari personalia yang terlibat dari mulai rektor sebagai pengarah, kemudian ada Pembina yaitu dekan, kemudian ada penanggung jawab pelaksana yaitu ketua LPPM karena program ini dilaksanakan di LPPM, baru kemudian ada tim pelaksana dimana tim pelaksana ini di SK-kan oleh rector, jadi program ini memang program UPI sedang yang melaksanakan adalah LPPM.</p> <p>“Untuk sarana prasarana penunjang kita menggunakan ruangan yang digabung dengan ruangan pusat pengembangan KKN jadi tidak terpisah ada ruangan khusus.</p> <p>“Kemudian dari sisi ketersediaan SDM dalam batas-batas tertentu kita merasa mampu dan siap. Dari program keahlian yang ada yang belum ada di UPI adalah program keahlian pertanian, untuk menyiasatinya kita menggunakan mahasiswa dari biologi. Kemudian untuk pengolahan hasil pertanian kita menggunakan mahasiswa dari jurusan tata boga, walaupun memang dari sisi yang sangat pas memang belum pas tapi paling tidak hal itu bisa mengatasi.</p>
5. Kriteria Peserta	<p>“Peserta yang terlibat dalam program ini adalah <i>fresh graduate</i> dari UPI serta mahasiswa tingkat akhir yang memang tinggal menyusun skripsi sehingga mereka tidak tersibukan dengan kuliah dan mereka walaupun masih mahasiswa tetap bisa fokus melaksanakan tugas pendampingan di sekolah.”</p>
Aspek Proses	
6. Sosialisasi	<p>“Untuk proses sosialisasi kita menggunakan dua cara yaitu eksternal dan internal, yaitu</p>

	<p>melalui jejaring pusat-pusat mahasiswa, melalui sarana web, mengirimkan surat resmi ke setiap program studi kemudian juga kita membuat spanduk yang kita pasang, kemudian juga kita menitipkan pesan ke pejabat LPPM pada rapat-rapat rutin bulanan di UPI.”</p>
7. Seleksi dan Penetapan	<p>“Karena pendaftar melebihi kuota yang ada maka kita lakukan proses seleksi, proses ini melalui dua tahap yaitu seleksi administrasi dan psikotest, tapi psikotest yang sederhana. Seleksi administrasi dilihat dari rambu-rambu yang ditetapkan oleh pihak direktorat Pembinaan SMK, kemudian kita kolaborasi dengan melihat mahasiswa yang sudah menempuh PLP, kemudian juga kesesuaian program studi peserta, baru kemudian kita lakukan dengan wawancara dan psikotest. Pada intinya psikotest ini digunakan untuk melihat ketekunan dan kesungguhan peserta. “Setelah diseleksi dan diterima maka dibuatkan SK peserta yang ditandatangani oleh lembaga kemudian dilanjutkan dengan kontrak kerja.</p>
8. Pelaksanaan Pembekalan	<p>“Jadi diklat pembekalan diadakan sebelum peserta diterjunkan ke lokasi, pembekalan dilakukan dengan pola selama tiga hari. Pembekalan ini intinya berkaitan dengan kebijakan, kemudian cakupan program serta memberikan penguatan-penguatan sikap dan mental mahasiswa di lapangan , kita juga menyampaikan program teknik-teknik pembelajaran, kita juga menyampaikan tentang kurikulum dan spektrum di SMK. Adapun narasumber berasal dari direktorat SMK, dari UPI dan dari peserta sebelumnya yang cukup berhasil.” “Untuk peserta yang berasal dari non-kependidikan memang waktu yang ada saya kira belum cukup.”</p>
9. Proses Pemberangkatan	<p>“Kita kan punya dua wilayah untuk di Jawa Barat dan diluar Jawa. Untuk yang di Jawa relative tidak masalah, kemudian untuk di luar Jawa kita melibatkan dinas Provinsi yaitu di Bengkulu kemudian pihak Provinsi</p>

	menelpon kepala sekolah.”
10. Pelaksanaan Supervisi	“kalau dari pihak direktorat kan hanya dialokasikan untuk 10 titik sehingga yang lainnya kita hanya berkomunikasi dengan telpon dan juga internet.”
11. Pelaporan oleh Perguruan Tinggi pelaksana	<p>“Untuk proses pelaporan kita setuju ada 3 jenis pelaporan yaitu laporan awal, perkembangan dan laporan akhir. Jadi 3 jenis laporan tersebut harus dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan program jadi kalo hanya laporan akhir saja saya kira tidak cukup karena waktunya panjang.</p> <p>“kendala dalam penyampaian laporan adalah bagi sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dan tidak disupervisi sehingga agak menyulitkan dalam penyampaian laporan.”</p>
12. Waktu pelaksanaan program	<p>“Idealnya memang sesuai kalender akademik, dari sisi UPI itu kan february-juni itu satu semester sehingga kita juga tidak kesulitan mencari peserta untuk yang masih mahasiswa, kalo untuk yang fresh graduate ya setelah mereka wisuda.</p> <p>“Untuk masalah waktu..memang yang dibutuhkan dilapangan 5 bulan terasa tidak cukup paling tidak satu semester malah ada sekolah yang mengusulkan selama satu tahun tapi hal ini akan menjadi kendala bagi yang masih berstatus mahasiswa.”</p>
13. Penggunaan Dana	<p>“Untuk masalah pendanaan kalo bisa digabung dengan pihak UPI memang ideal karena di UPI kan ada dana CSR. Untuk penganggaran sekarang ada persiapan , pelaksanaan dan pelaporan. Untuk anggaran pada persiapan kita ingin disitu ada pos dana untuk observasi awal terutama untuk lokasi-lokasi yang baru.”</p> <p>“Untuk pendanaan yang diberikan kepeserta memang ada dua versi jadi kalau peserta yang dapat fasilitas dari sekolah seperti penginapan mereka bilang cukup tapi kalau tidak dapat dari sekolah mereka bilang kurang..jadi mereka bilang kalau untuk Jawa Barat ya sejuta lah...begitu. “</p>
Aspek Product	
14. Hasil yang telah dilakukan oleh	“Program ini sangat membantu dalam

Peserta di Sekolah	<p>memenuhi guru produktif di sekolah karena memang program ini diperuntukan bagi sekolah-sekolah baru yang guru produktifnya masih kurang atau tidak ada sama sekali.”</p> <p>“Mereka tidak hanya terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas tapi juga pembuatan RPP, kemudian membantu administrasi sekolah, penataan perpustakaan sekolah serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ini bisa dilihat pada laporan akhir yang kita buat.”</p>
--------------------	--

3. Nama Informan : DR. Adi Syahputra, M.Si
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta
 Jabatan di Perguruan Tinggi : Sekretaris LPM Universitas Negeri Jakarta
 Jabatan Program : Koordinator Program

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1.Latar belakang dan Relevansi Program	<p>Pada dasarnya semua civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma PT, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa. Oleh sebab itu mahasiswa secara aktif juga perlu dilibatkan dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Program Pendampingan SMK yang digagas Direktorat SMK merupakan wadah yang sesuai dengan semangat tridharma tersebut. Program tersebut selain dapat menjadi wahana pelaksanaan program pengabdian bagi mahasiswa, juga dapat menjadi medium yang efektif bagi pembentukan karakter mahasiswa dan pada sisi lain juga dapat menjadi bentuk komunikasi antara PT dengan <i>stakeholder</i>.”</p>
Aspek Input	
2. Panduan Pelaksanaan	<p>“LPM UNJ memiliki panduan pelaksanaan program pendampingan yang dibangun berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama antara Direktorat SMK dan PT mitra. Panduan tersebut ditujukan sebagai rambu-rambu yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat kegiatan program</p>

	<p>pendampingan LPM UNJ. Panduan tersebut berisi memuat latar belakang, tujuan program, hasil yang diharapkan, tugas pokok peserta program pendampingan selama berada di SMK sasaran sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan program pembelajaran (kurikuler dan ko-kurikuler) serta kegiatan administrasi dan penunjang pembelajaran lainnya dan pelaporan.”</p>
<p>3. Organisasi dan Manajemen</p>	<p>”Sesuai dengan lingkup kerjanya yang cukup besar, yang melibatkan kerjasama antar instansi, antar fakultas, jurusan dan program studi maka untuk pelaksanaan perlu pembentukan Tim Pengelola yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan program. Untuk kepentingan tersebut maka Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNJ menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tim Pengelola Program Pendampingan Sekolah Menengah Kejuruan Kerjasama Direktorat Pembinaan SMK.</p> <p>Personalia yang terlibat pada program pendampingan meliputi Rektor sebagai pelindung, PR (I, II, III dan IV) Dekan FT, Dekan FE dan Dekan FMIPA sebagai pengarah, Ketua LPM sebagai penanggung-jawab, Sekretaris LPM sebagai pelaksana, Koordinator KKN sebagai sekretaris dan Kabag TU LPM sebagai bendahara. Untuk kelancaran pelaksanaan program diangkat koordinator wilayah dan dosen pembimbing lapangan, serta seksi-seksi yang diperlukan.”</p>
<p>4. Kriteria Peserta</p>	<p>”Pola rekrutmen peserta program pendampingan bersifat umum sehingga mahasiswa yang mendaftar untuk kegiatan ini berasal dari kependidikan dan non-kependidikan. ”</p> <p>”Kriteria peserta adalah mahasiswa UNJ yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : Mahasiswa semester tujuh atau lebih, dengan SKS minimal 110 dan sudah melaksanakan program PPL, mengajukan permohonan</p>

	tertulis yang disertai alasan yang menjadi motivasi ikut dalam kegiatan ini, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang hamil atau baru melahirkan dan atau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan program pendampingan, berkelakuan baik, mau menandatangani perjanjian dengan LPM UNJ Selain mahasiswa aktif peserta program pendampingan lainnya adalah mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dan mahasiswa yang baru diwisuda atau <i>fresh-graduate</i> .”
Aspek Proses	
5. Sosialisasi	”untuk sosialisasi program pendampingan di UNJ dilakukan dengan pemasangan spanduk dan pengiriman surat pemberitahuan yang berisi tentang pembukaan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pendampingan SMK, utamanya ke Dekan Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas MIPA.”
6. Seleksi dan Penetapan	”Rekrutmen mahasiswa peserta program pendampingan diawali dengan pendaftaran. Untuk keperluan tersebut disediakan format yang harus diisi oleh mahasiswa calon peserta yang menyangkut tentang identitas dan keterangan lain dari mahasiswa yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, selanjutnya akan diwawancara untuk mengetahui motivasi yang bersangkutan.” “Setelah diseleksi dan diterima maka dibuatkan SK peserta yang ditandatangani oleh Ketua lembaga kemudian dilanjutkan dengan kontrak kerja.”
7. Pelaksanaan Pembekalan	Oleh karena tidak semua mahasiswa yang dilibatkan dalam Program pendampingan memiliki latar belakang kependidikan, maka untuk menyamakan starting point dilakukan kegiatan pembekalan dengan materi Kebijakan Program Pendampingan SMK, Penyusunan program Pendampingan SMK,

	<p>Administrasi Pendidikan, Perluasan akses dan peningkatan mutu SMK, Pendalaman Materi sesuai kompetensi, Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Media Pembelajaran, Standar Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Panduan Manajemen Sekolah Program Pendampingan SMK.”</p> <p>”Pembekalan terpusat yang dilaksanakan LPM dilakukan selama tiga hari. Setelah itu pembekalan dilanjutkan ditingkat fakultas untuk mengembangkan materi pembelajaran yang spesifik sesuai kompetensi.”</p>
8. Proses Pemberangkatan	<p>“Sebelum pemberangkatan LPM UNJ terlebih dulu mengadakan kontak dengan pihak sekolah untuk memberitahukan kedatangan peserta program pendampingan. Proses pemberangkatan diawali dengan pelepasan oleh rektor. Pemberangkatan peserta diurus oleh travel. Sedangkan waktu pemberangkatan dilakukan berdasarkan tujuan. Untuk wilayah Lampung dan Sumatera Selatan dilakukan pada sore/malam hari, agar peserta dapat mencapai lokasi pada siang hari. Sedangkan untuk wilayah Banten dilakukan pagi hari.”</p>
9. Pelaksanaan Supervisi	<p>“Supervisi dilakukan secara sampling, untuk masing-masing wilayah diambil 3 titik/sekolah. Sampling terpilih dari tahun ke tahun diusahakan tidak sama. Supervisi selain dilakukan oleh pihak LPM juga dilakukan oleh dosen pembimbing dan pihak Direktorat SMK.”</p>
10. Pelaporan oleh Perguruan Tinggi pelaksana	<p>”Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban institusi pelaksana terhadap Direktorat Pembinaan SMK. Secara formal adanya tiga bentuk laporan yang harus disampaikan merupakan bentuk yang sangat memadai.</p> <p>1. Laporan Pendahuluan(<i>Inception report</i>) mencakup program kerja, penyusunan waktu/jadwal, personal yang terlibat, materi, tata cara (metode) pelaksanaan pendampingan yang digunakan.</p>

	<p>2. Laporan Kemajuan Pekerjaan(<i>Progress report</i>), menggambarkan kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan.</p> <p>3. Laporan Akhir(<i>Final report</i>), memuat semua hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.”</p>
11. Waktu pelaksanaan program	<p>“Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program perlunya dilakukan sinkronisasi antara kalender sekolah, kalender akademik perguruan tinggi dan system anggaran Kemendiknas. Karena sekolah yang menjadi fokus dalam program ini, maka sebaiknya yang menjadi acuan adalah kalender sekolah. Jika memungkinkan pelaksanaan program pendampingan yaitu: dari januari s/d Juni dan dari juli s/d Desember.”</p>
12. Penggunaan Dana	<p>”Penggunaan dana <i>blockgrant</i> dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Penggunaan dana difokuskan untuk kegiatan penyediaan tenaga pendidik (mahasiswa) sesuai dengan program keahlian yang dibutuhkan oleh SMK sasaran mulai dari kegiatan persiapan, penyediaan materi ajar selama pelaksanaan program pendampingan, koordinasi, supervisi sampai dengan pelaporan. Semua rencana penggunaan dapat dilihat pada rincian anggaran belanja (RAB) yang telah disepakati oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK dan LPMK UNJ.</p> <p>“secara umum dana yang diberikan kepada peserta adalah 5 juta rupiah untuk akomodasi dan 120 ribu untuk asuransi, sedangkan untuk biaya perjalanan ditetapkan adcost. Penetapan ini dilakukan sebagai sebuah upaya subsidi silang. Sebab untuk wilayah yang terpencil biaya perjalanannya tidak dapat diperhitungkan secara tepat dan cenderung jauh lebih mahal.”</p>
Aspek Product	
13. Hasil yang telah dilakukan oleh Peserta di Sekolah	<p>“secara umum peserta program sangat membantu dalam pemenuhan guru produktif di sekolah. Hal ini semakin jelas manakala</p>

	<p>pada sekolah tersebut memang masih kekurangan atau belum memiliki guru produktif.”</p> <p>“Mereka tidak hanya terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas tapi juga pembuatan RPP, membantu administrasi sekolah, menata perpustakaan sekolah serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.”</p>
--	---

HASIL WAWANCARA

C. Dosen Pembimbing Lapangan Identitas Informan :

1. Nama : Yuyun Estriyanto, ST, MT
PT : UNS – Surakarta
Wilayah Kerja : Semarang, Jawa Tengah
 2. Nama : Ida Nugroho Saputro, ST, M.Eng
PT : UNS – Surakarta
Wilayah Kerja : Temanggung dan Banjarnegara
 3. Nama : Budi Haryanto, ST, MT
PT : UNS – Surakarta
Wilayah Kerja : Yogyakarta dan Magelang
-
1. Nama : Yuyun Estriyanto, ST, MT
Jabatan :Dosen UNS – Surakarta
Status : Supervisor wilayah : Semarang, Jawa Tengah

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Input	
1. Kesesuaian Program Studi Peserta	“ ya, program studi peserta sesuai dengan kebutuhan guru produktif yang ada di sekolah.”
Aspek Proses	
2. Pelaksanaan Supervisi -Apakah dana untuk supervisi mencukupi? -Apakah mekanisme supervisi sudah cukup baik? -Apakah ada kendala	-Dana untuk supervisi hanya cukup untuk beberapa tempat saja sehingga kadangkala ada beberapa tempat yang tidak dikunjungi.” -Masih kurang ideal, satu supervisor seharusnya satu tempat pendampingan - Saya kira sih tidak ada kendala hanya saja untuk

selama melakukan supervisi?	melakukan supervisi yang cukup banyak ke lokasi disiasati dengan mengumpulkan peserta ke satu lokasi
3. Kompetensi Peserta	“Peserta sudah cukup baik pedagogiknya dan kompetensinya sehingga ada beberapa peserta yang bisa diangkat jadi GTT di lokasi pendampingan.”
Aspek Product	
4. Hasil apa yang sudah dilakukan oleh peserta selama di Sekolah ?	“Secara umum KBM menjadi lebih baik, perpustakaan menjadi lebih tertata, ekstrakurikuler menjadi lebih baik lagi prestasinya.”

2. Nama : Ida Nugroho Saputro, ST, M.Eng
 Jabatan : Dosen UNS – Surakarta
 Status : Supervisor wilayah : Temanggung dan Banjarnegara, Jawa Tengah

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Input	
1. Kesesuaian Program Studi Peserta	“Program studi telah sesuai dengan program keahlian di SMK.”
Aspek Proses	
2. Pelaksanaan Supervisi -Apakah dana untuk supervisi mencukupi? -Apakah mekanisme supervisi sudah cukup baik? -Apakah ada kendala selama melakukan supervisi?	-Telah cukup untuk biaya transport, makan dan penginapan hanya perlu juga untuk diasuransikan.” “Mekanisme supervisi sudah cukup baik untuk memantau peserta di sekolah karena yang di interview di sekolah adalah pihak sekolah kemudian di cross check dengan peserta pendampingan.” “Kendala dalam supervisi adalah lokasi sekolah yang ditinjau jauh dari jalan raya sehingga diatasi dengan cara naik ojek/motor.”
3. Kompetensi Peserta	“Kemampuan peserta telah cukup baik karena sebelum diberangkatkan sudah diberikan pembekalan teaching dan non-teaching.”
Aspek Product	
4. Hasil apa yang sudah dilakukan oleh peserta selama di Sekolah ?	“Sekolah banyak mendapatkan hasil dengan tertatannya lingkungan sekolah , adanya RPP dan lain-lain.”

3. Nama : Budi Haryanto, ST, MT
 Jabatan : Dosen UNS – Surakarta
 Status : Supervisor wilayah : Magelang dan Yogyakarta

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Input	
1. Kesesuaian Program Studi Peserta	“ya program studi telah sesuai.”
Aspek Proses	
2. Pelaksanaan Supervisi -Apakah dana untuk supervisi mencukupi? -Apakah mekanisme supervisi sudah cukup baik? -Apakah ada kendala selama melakukan supervisi?	-ya sudah mencukup, perlu juga diasuransikan.” “Mekanisme supervisi sudah cukup baik untuk memantau peserta di sekolah.” “Kendalanya adalah medan yang berada di kaki pegunungan.”
3. Kompetensi Peserta	“Kemampuan peserta telah cukup baik dan kompeten mereka sebelum diberangkatkan sudah diberikan pembekalan.”
Aspek Product	
4. Hasil apa yang sudah dilakukan oleh peserta selama di Sekolah ?	“Peserta membantu administrasi, penataan perpustakaan, dan ekstrakurikuler lebih berjalan tertib dan ada peningkatan.”

HASIL WAWANCARA

D. Bendahara Program di Perguruan Tinggi Identitas Informan :

Nama : Senen
 Jabatan : Bendahara Program Pendampingan, UNS – Surakarta

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Input	
1. Bagaimana kondisi SDM dan sarana prasarana pendukung program ?	“untuk masalah SDM saya kira tidak ada masalah sebab saya sebagai bendahara program sudah terbiasa berpengalaman dalam mengelola keuangan karena memang sehari-hari saya sebagai bendahara di jurusan FKIP

	<p>UNS ini.” “kalo untuk sarana prasarana walopun tidak ada tempat secara khusus saya kira cukup lengkap ya..ruangan cukup luas dan ber-AC, ada peralatan computer dan printer yang cukup, ada mesin fax dan mesinfoto copy, ada juga koneksi internet, jadi saya kira tidak ada masalah.”</p>
Aspek Proses	
<p>2. Bagaimana pengelolaan keuangan pelaksanaan program ?</p>	<p>“penggunaan dana program pendampingan ini kita senantiasa mengacu kepada petunjuk pelaksanaan yang ada yang diberikan oleh pihak Direktorat pada saat bimbingan teknis dan juga peraturan-peraturan yang berlaku di universitas, kemudian untuk pemberian dana living cost peserta langsung kita berikan selama 4 bulan, 1 bulan sisanya kita berikan pada saat peserta sudah kembali ke kampus dan memberikan laporan akhirnya. “cuman yang terkadang menjadi kendala adalah lamanya proses pencairan dana dari Jakarta ke rekening di universitas, padahal peserta sudah harus diberangkatkan , untuk mengatasinya biasanya untuk biaya pembekalan kita talangi terlebih dahulu pakai uang dari universitas karena kan untuk pembekalan tidak membutuhkan dana yang besar.”</p>

HASIL “FOCUS GROUP DISCUSSION”

G. Peserta Program Pendampingan SMK
Tempat FGD : Ruang Seminar, Kampus UNS- Surakarta
Identitas Informan :

9. Nama : Andhitya Setia Candra

Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi SMK : Kab. Boyolali

10. Nama : Mardiyanto
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Kismantoro, Kab. Wonogiri

11. Nama : Widoretno
Jurusan : Pendidikan Teknik Bangunan
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Kemusu, Kab. Boyolali

12. Nama : Titis Setyawan
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Karangdadap, Kab. Pekalongan

13. Nama : Latif Rowi
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 2 Demak, Kab. Demak

14. Nama : Ari Tri Hatmanto
Jurusan : Pendidikan Teknik Bangunan
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Pringsurat

15. Nama : Thoriq Abdullah
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 1 Jumo, Kab. Temanggung

16. Nama : Agus Susilo
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : UNS – Surakarta
Lokasi Sekolah : SMK Negeri 2 Marabahan, Kalimantan Selatan

TOPIK FGD	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Input	
1. Kesesuaian Sekolah dan Program studi dengan kebutuhan guru produktif di	1. “kalo saya sesuai, saya dari Pendidikan Teknik Mesin.” 2. “ya sesuai.” 3. “jurusan yang saya dampingi di

sekolah	<p>sekolah tidak satu program studi tapi masih dalam satu rumpun, saya dari jurusan mesin produksi namun jurusan yang ada di sekolah teknik mesin otomotif.”</p> <p>7. “di SMK 1 Jumo Temanggung guru produktifnya sudah sudah cukup , saran saya ke pihak Direktorat Pembinaan SMK agar lebih jeli dan teliti dalam penunjukan sekolah sehingga SMK yang didampingi benar-benar sekolah yang membutuhkan guru.”</p>
Aspek Proses	
<p>2. Sosialisasi Program dan proses recruitment yang dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Saya mengetahui adanya program ini dari dosen , kalo untuk rekrutmen nya diminta mengumpulkan berkas dan wawancara” 2. “tahu dari temen-temen dan juga dari web pendampingan”. Untuk rekrutmen nya dengan pemberkasan dan seleksi secara tertulis” 3. “melihat IPK yang ada kemudian dengan wawancara” 4. “Saya tahu dari kampus di jurusan pendidikan teknik mesin, kalo untuk rekrutmennya ya dengan mengajukan lamaran, seleksi trus penempatan” 5. “saya tahu dari pengumuman panitia di kampus”. “ rekrutmennya dengan wawancara setelah dilakukan seleksi administrasi untuk melihat kesiapan dan kesanggupan dari peserta.” 6. “saya tahu dari situs www.pendampingansmk.uns.fkip.ac.id, kemudian kalo untuk rekrutmennya dengan seleksi hasil studi yang telah ditempuh dengan menunjukkan transkrip nilai dan wawancara.”
<p>3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Direktorat</p>	<p>6. “ya kalo bisa pemberitahuan kepada sekolah baru yang ditempati peserta pendampingan diharapkan lebih komunikatif sebelum peserta sampai di sekolah bersangkutan agar mereka lebih</p>

	<p>mudah dalam penerimaan kepada kami.”</p> <p>7. “sosialisasi ke pihak sekolah yang didampingi mohon bisa lebih baik sebelum peserta tiba di sana sebab kepala sekolah yang saya temui justru belum mengetahui program ini dan baru mengetahui setelah saya tiba di lokasi”</p>
<p>4. Jangka waktu pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan kegiatan belajar-mengajar yang ada di sekolah?</p>	<p>2. “kalo bisa dipaskan dengan awal semester mulai bulan juli, sehingga kalo 5 bulan ya juli, agustus, September, oktober, November disamakan aja dengan waktu PPL.”</p> <p>“jadi sampai sana malah lagi mid semester...”</p> <p>3. “waktu yang sekarang nggak efektif, akan lebih baik kalo waktunya diperpanjang selama 1 tahun.”</p>
<p>5. Apakah pendanaan yang diberikan pihak Perguruan Tinggi sudah mencukupi?</p>	<p>3. “karena saya tidak kost jadi ya cukup tapi kalo kost sendiri ya mungkin ngak cukup.”</p> <p>7. “kalo pengalaman saya ya..kalo Rp. 800 ribu kalo buat hidup ya sebenarnya pas-pasan, kebetulan kan dari pihak sekolah tidak memberikan fasilitas apapun jadi kan kita kost, jadi mengeluarkan biaya Rp. 200 ribu sebab kan bulanan trus untuk makan sekali makan Rp. 8 ribu lah ..jadi ya cuman cukup untuk makan sama bayar kost aja, kalo untuk transport sehari-hari saya rasa kurang</p> <p>8. “kalo saya relatif cukup irit karena sayadisediakan fasilitas oleh sekolah ada penginapan, ada alat untuk memasak tapi kalo teman saya yang di tempat lain tidak dapat fasilitas dari sekolah, biaya hidup di Kalimantan Selatan cukup tinggi, harga 1 gelas teh manis Rp. 3.500, soto lamongan Rp. 15.000, ayam penyet Rp. 25.000, 1 mangkok bakso Rp. 12.500</p>
Aspek Product	
<p>6. Hasil yang dicapai selama berada di Sekolah</p>	<p>1. “selama di sekolah saya membantu proses belajar-mengajar juga membantu : administrasi sekolah, penataan perpustakaan, pengelolaan lingkungan</p>

	<p>kemudian juga siswa menjadi lebih jelas apa yang telah saya berikan untuk materi produktif.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. “yang saya lakukan selama di sekolah antara lain dalam kegiatan belajar mengajar : penyusunan RPP dan silabus yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru, penataan perpustakaan dengan dibuatkan nomer untuk buku-buku baru diberi catalog, buku-buku dipisah sesuai dengan temanya tapi kendalanya memang tempat yang belum mencukup. Di bidang ekstrakurikuler kegiatannya yaitu pramuka, kegiatan olahraga dan PMR (palang merah remaja).” 3. “dengan membantu mengajar di kelas, membantu administrasi sekolah serta penataan perpustakaan, untuk perpustakaan..sekarang di sekolah SMK N 1 Kemusu lebih tertata rapi dan ditambah dengan adanya buku-buku baru.” 4. “saya mengajar selama 12 jam dalam seminggu kemudian juga program ekstrakurikuler dengan software AUTOCAD.” 5. “tugas saya menggantikan mengajar di kelas untuk guru yang berhalangan hadir, kemudian membantu tugas non-teaching seperti persiapan ujian, penambahan beberapa literature buku di perpustakaan, saya juga membuat poster K3 di bengkel sekolah.” 6. “saya melakukan tugas mengajar mata diklat yang gurunya kurang trus juga ketika gurunya berhalangan hadir, kemudian memback-up program-program yang dilaksanakan di sekolah dengan dipandu oleh guru yang bertanggung jawab, mengembangkan program ekstrakurikuler serta membantu penataan admisnistrasi sekolah dan perpustakaan.” 7. “membantu proses KBM di sekolah dan juga praktikum, pembenahan bengkel praktek sepeda motor, kemudian untuk administrasi sekolah dengan pengisian buku induk pada bagian tata usaha, untuk
--	---

	<p>ekstrakurikuler yaitu membantu kegiatan pramuka.”</p> <p>8. “membantu kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan penataan perpustakaan.”</p>
<p>7. Apakah dengan adanya program ini kebutuhan guru produktif sudah tercukupi ?</p>	<p>1. “ saya kira sudah, karena dengan adanya pendampingan, pihak sekolah merasa terbantu.”</p> <p>2. “untuk unit sekolah baru dengan adanya program pendampingan ini membantu kekurangan guru, tapi belum cukup untuk mengatasi kekurangan guru yang ada.” “kemudian untuk jam yang biasanya kosong karena jadwal mengajar guru yang bentrok dengan adanya program pendampingan ini menjadi berkurang jam kosongnya.”</p> <p>3. “ya peserta pendampingan dapat membantu praktek siswa di sekolah yang di damping”</p> <p>4. “cukup ya...bisa tercukupi.”</p> <p>5. “ya jika disekolah tersebut memang membutuhkan guru produktif maka program ini cukup membantu tapi kan program ini tidak dilakukan penuh selama di sekolah.”</p> <p>6. “ya, karena kan dapat memback-up ketika ada guru yang tidak mengajar.”</p> <p>7. “ sudah tercukup, karena tanpa adanya program ini kebutuhan guru sudah tercukupi sehingga peserta program pendampingan hanya membantu saja.”</p> <p>8. “sudah, karena dapat menutupi guru-guru yang sedang berhalangan hadir.”</p>

HASIL WAWANCARA

E. Kepala Sekolah

1. Nama Informan : Drs. Marimin
NIP. 19550603 198303 1 010
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sawit, Kab. Boyolali

2. Nama Informan : Drs. Jaka Jarwanta
NIP.195209291978031003
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kemusu, Kab. Boyolali
3. Nama Informan : Drs. H. Budi Santoso, MM
NIP.19571118 198403 1 003
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Miri, Kab. Sragen
4. Nama Informan : Drs. Sugiyarno, M.Pd
NIP.196106121988
Jabatan : Kepala Sekolah SMK N 3 Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
1. Nama Informan : Drs. Marimin
NIP. 19550603 198303 1 010
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sawit, Kab. Boyolali

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1. Relevansi Program pendampingan dengan visi-misi dan tujuan sekolah	“ya..saya kira program ini sejalan dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dari sekolah kami, tujuan dari sekolah kan antara lain menjadikan tamatan yang professional dibidangnya dan produktif yang mampu beradaptasi dengan teknologi kemudian juga pengen menjadikan tamatan yang mempunyai kecakapan hidup (life skill) yang mampu berwirausaha, nah..untuk mewujudkan itu semua kan tentu dibutuhkan guru-guru yang cukup dari segi jumlah serta kompeten dibidangnya.”
Aspek Input	
2. Ketersediaan Buku Panduan Program dari Perguruan Tinggi	“ya ada, tapi akan lebih baik kalo diberikan ke pihak sekolah jauh-jauh hari sebelum peserta datang ke sekolah sehingga pihak sekolah sudah bisa mempersiapkan tugas dan program yang nantinya diberikan ke peserta”
3. Apakah sekolah yang ada merupakan unit sekolah baru yang membutuhkan guru produktif ?	“Sekolah ini didirikan tahun 2007 dengan sharing dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga ya..tergolong masih baru.” “jadi di SMK ini ada 3 program keahlian yang dibuka Teknik Kendaraan ringan (TKR), Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Farmasi. Kemudian total guru PNS yang ada

	34 orang tapi dari sisi ketersediaan guru produktif memang masih kurang, contohnya saja untuk program keahlian Teknik Kendaraan Ringan kita kan ada 12 rombongan belajar sedangkan guru produktif yang ada hanya 4 orang.”
4. Apakah ada kesesuaian program studi peserta dengan kebutuhan guru produktif di sekolah?	“saya rasa ya sesuai..karena kan peserta dari UNS ini dua-duanya dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin.” Mas Gama Satria dari Teknik Mekanik Otomotif dan Mas Wahid juga dari Teknik Mekanik Otomotif.”
Aspek Proses	
5. Kompetensi peserta dalam membantu kegiatan sekolah	“ini saya terus terang saja ya..blak-blakan orang Jawa bilang...jadi mungkin karena rumahnya dekat jadi untuk Mas Wahid jarang masuk dan ngak meminta izin ke kami ..alasanya ngak masuk apa..juga kamikurang tahu karena kan kami tidak diberi informasinya, nah... ini juga perlu jadi perhatian juga untuk pihak UNS.” “Kalau untuk kemampuan mengajar nanti mungkin guru pamong yang lebih tahu tapi yang jelas ya..itu tadi karena mungkin rumahnya dekat jadi jarang masuk tanpa memberitahukan ke kami”
6. Apakah waktu Pelaksanaan program sudah sesuai dengan kalender akademik sekolah?	“kalau dari sisi waktu menurut kami kurang ideal karena kedua peserta ini kan datang pada saat kegiatan sekolah sudah berjalan, ya kalau bisa pas saat awal tahun pelajaran sehingga kami bisa membuat program untuk mereka di awal tahun pelajaran sekolah.” “ya, sebaiknya sekitar bulan juli atau agustus lah..sehingga kita juga bisa memberikan beban kerja ke mereka seperti guru-guru yang lain.”
Aspek Product	
7. Hasil yang dicapai selama peserta berada di Sekolah	“jadi kedua peserta karena mereka dari jurusan mesin maka saya serahkan langsung ke ketua program studinya sekaligus sebagai guru pamong bagi mereka, mungkin nanti guru pamong yang akan menjelaskan lebih lengkap.”

2. Nama Informan : Drs. Jaka Jarwanta
 NIP.195209291978031003
 Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kemusu, Kab. Boyolali

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1. Relevansi Program pendampingan dengan visi-misi dan tujuan sekolah	“ya, sesuai dengan misi dari Sekolah kan dalam rangka menghasilkan tamatan professional trus salah satu misi kami untuk menyelenggarakan pendidikan yang bisa menghasilkan tamatan yang kompeten, nah untuk bisa mencapai itu semua kan salah satunya dibutuhkan sumber daya manusia berupa guru yang cukup dan profesional.”
Aspek Input	
2. Ketersediaan Buku Panduan Program dari Perguruan Tinggi	“kalau boleh usul perlu juga dicantumkan kontak person yang bisa dihubungi sehingga ketika ada permasalahan dengan peserta misalnya kinerja peserta kurang bagus pihak sekolah bisa menyampaikan ke pihak perguruan tinggi untuk memberikan teguran “
3. Apakah sekolah yang ada merupakan unit sekolah baru yang membutuhkan guru produktif ?	”Sekolah ini didirikan pada tahun 2005, kemudian ada 3 Bidang Keahlian yang dibuka : teknik Mesin dengan program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif trus teknik Perkayuan,Program Keahlian : Teknik Konstruksi Kayu dan bisnis manajemen program keahliannya:penjualan. Dari 3 program keahlian ini yang paling dibutuhkan adalah untuk teknik mesin sebab kami total memiliki 9 rombongan belajar, adapapun untuk 2 program keahlian yang lain sudah cukup malah untuk program keahlian teknik perkayuan kita ngak ada peminatnya.”
4. Apakah ada kesesuaian program studi peserta dengan kebutuhan guru produktif di sekolah?	“ya, cukup sesuai..karenamas Aditya yangdari UNS jurusannya teknik mesin.”
Aspek Proses	
5. Kompetensi peserta dalam membantu	“ya..secara umum kami cukup terbantu dengan keberadaan peserta dan kemampuannya juga sudah cukup baik walaupun saya ngak

kegiatan sekolah	mengikuti setiap saat , mungkin nanti yang lebih tahu dari guru pembimbingnya.”
6. Apakah waktu Pelaksanaan program program sudah sesuai dengan kalender akademik sekolah?	“ya sebaiknya disesuaikan dengan tahun ajaran baru di sekolah, bisa bulan juli – Desember untuk semester I atau Januari – Juni untuk semester II , kalau yang sekarang berjalan kan ngak, jadi tidak mulai dari awal.”
Aspek Product	
7. Hasil yang dicapai selama peserta berada di Sekolah	“yang jelas kami minta peserta untuk ikut membantu dalam proses kegiatan belajar – mengajar di kelas disamping juga kita minta untuk membantu dalam praktikum siswa.”

3. Nama Informan : Drs. H. Budi Santoso, MM
 NIP.19571118 198403 1 003
 Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Miri, Kab. Sragen

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1. Relevansi Program pendampingan dengan visi-misi dan tujuan sekolah	”program ini cukup bagus untuk ikut membantu mengatasi kekurangan guru produktif di sekolah, kalo masalah relevansinya ya tentu sangat pas lah, salah satu tujuan SMK 1 Miri kan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, dan dapat diserap oleh DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, nah untuk mewujudkan itu semua kan tentu perlu dukungan tenaga pendidik yang memadai.”
Aspek Input	
2. Ketersediaan Buku Panduan Program dari Perguruan Tinggi	”ya ada dibawa oleh peserta pada saat ke sekolah ..”
3. Apakah sekolah yang ada merupakan unit sekolah baru yang	”sekolah ini kan dibangun pada tahun 2005 dan total rombongan belajar yang ada sebanyak 18 kelas dengan jumlah guru PNS

membutuhkan guru produktif ?	sebanyak 24 orang dan lokal kelas sejumlah 14 ruang, jadi kala dari sisi kebutuhan kita tidak hanya butuh guru produktif tapi juga lokal kelas.”
4. Apakah ada kesesuaian program studi peserta dengan kebutuhan guru produktif di sekolah?	“ya cukup sesuai karena kedua peserta berasal dari jurusan pendidikan teknik mesin. Di sekolah ini kan membuka 3 program keahlian : Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Listrik Penggunaan. “
Aspek Proses	
5. Kompetensi peserta dalam membantu kegiatan sekolah	“kemampuan peserta cukup bagus apalagi mereka kan sudah lulus jadi memang benar-benar kita libatkan untuk membantu mengajar di kelas.”
6. Apakah waktu Pelaksanaan program sudah sesuai dengan kalender akademik sekolah?	“kalau bisa pas awal tahun sehingga bisa mulai dari awal, bulan juni atau juli lah...”
Aspek Product	
7. Hasil yang dicapai selama peserta berada di Sekolah	“kita minta mereka membantu mengajar sesuai dengan jurusannya dan juga ikut membantu kegiatan administrasi sekolah, juga kalau ada guru yang berhalangan mengajar kita minta mereka untuk menggantikan.”

4. Nama Informan : Drs. Sugiyarno, M.Pd
 NIP.196106121988
 Jabatan :Kepala Sekolah SMK N 3 Sukoharjo, Kab. Sukoharjo

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Context	
1. Relevansi Program pendampingan dengan visi-misi dan tujuan sekolah	“ada.ada relevansinya, kan untuk mewujudkan lulusan yang kompeten tentu perlu ditunjang dengan guru yang cukup dan kompeten terlebih di pendidikan kejuruan yang perlu sekali adalah guru produktifnya.”

Aspek Input	
2. Ketersediaan Buku Panduan Program dari Perguruan Tinggi	”ya ada, tapi kalo bisa disampaikan sebelum peserta datang ke sekolah jadi kita bisa tahu sebelumnya.”
3. Apakah sekolah yang ada merupakan unit sekolah baru yang membutuhkan guru produktif ?	“Sekolah ini didirikan pada tahun 2007 jadi ya tergolong masih sekolah baru, sampai saat ini ada 5 program keahlian yang dibuka, teknik mekanik otomotif, akuntansi, penjualan, akomodasi perhotelan dan restoran. Dengan total guru PNS yang ada sebanyak 30 orang.”
4. Apakah ada kesesuaian program studi peserta dengan kebutuhan guru produktif di sekolah?	“dari 5 program keahlian yang ada sebenarnya kami sudah mencukupi tinggal bagaimana mengoptimalkan yang sudah ada karena guru yang non-PNS juga sudah cukup banyak.tapi dari peserta yang ada kita optimalkan sesuai jurusan mereka , mereka berdua kan dari akuntansi dan pemasaran.”
Aspek Proses	
5. Kompetensi peserta dalam membantu kegiatan sekolah	“saya kira cukup baik dan tidak ada masalah.” “nanti mungkin guru pamong yang lebih tahu dan bisa menjelaskan lebih banyak tugas-tugas yang diberikan ke peserta.”
6. Apakah waktu Pelaksanaan program program sudah sesuai dengan kalender akademik sekolah?	“kalau dari waktu saya alangkah lebih baiknya kalau dimulai di awal tahun pelajaran, sekarang kan ngak, bulan juni atau juli lah...”
Aspek Product	
7. Hasil yang dicapai selama peserta berada di Sekolah	“kitaminta mereka untuk ikut membantu membenahi lab akuntansi dan pemasaran serta manajemen koperasi karena kan sesuai dengan jurusannya sama bantu dilibatkan dalam proses belajar-mengajar di kelas.”

HASIL WAWANCARA

F. Guru Pamong

Informan :

Universitas Indonesia

1. Guru Pamong SMK Negeri Sawit 1, Boyolali
2. Guru Pamong SMK Negeri 3 Sukoharjo

1. Informan : Guru Pamong di SMK Negeri 1 Sawit, Boyolali

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Input	
1. Kebutuhan guru produktif di sekolah	“kalau menurut saya masih kurang Mas....di sini kan ada 2 program keahlian yang dibuka teknik mekanik otomotif dan teknik computer dan jaringan, dua-duanya masih kurang. Untuk teknik mekanik otomotif saja total ada 12 rombongan belajar trus guru produktifnya baru ada 4 orang.”
Aspek Proses	
2. Kompetensi Peserta	“ya sudah lumayan lah ikut membantu KBM disini tapi dari sisi kemampuan mengajar di kelas masih kurang baik dilihat dari sisi penguasaan materi dan cara penyampaian materi ke siswa, trus peserta masih sibuk dengan ujian semester, baru sebentar masuk ke sekolah dengan alasan ikut ujian semester kemudian tidak pernah masuk lagi ,kemudian dari sisi kinerja peserta juga perlu untuk ditingkatkan lagi.”
3. Waktu Pelaksanaan Program	“kalo dari sisi waktu pelaksanaan ya akan lebih bagus kalo dimulai pada awal semester.” “ya..bulan-bulan juni atau juli lah...”
Aspek Product	
4. Hasil yang dicapai	”jadi sesuai dengan program studinya untuk teaching kita minta untuk membantu mengajar mata pelajaran PDTM-Teknik otomotif serta praktek di jurusan otomotif.” ...trus untuk kegiatan non-teaching membantu sistem administrasi sekolah untuk pembuatan bagan-bagan struktur sekolah untuk menunjang Akreditasi. Juga membantu pengembangan kegiatan Ekstra kurikuler.

2. Informan : Guru Pamong di SMK Negeri 3 Sukoharjo

TOPIK WAWANCARA	HASIL YANG DIPEROLEH
Aspek Input	
1. Kebutuhan guru produktif di sekolah	<p>“ya, jadi di SMK Negeri 3 Sukoharjo ini kan ada 5 program keahlian yang dibuka : otomotif, akuntansi, tata boga, pemasaran, akomodasi perhotelan trus untuk Peserta dari UNS berasal dari jurusan akuntansi dan pemasaran, jadi saya kira ya pas lah...”</p> <p>“nah..kebetulan karena saya yang memegang pemasaran dan akuntansi jadi saya ditugasi oleh bapak kepala sekolah untuk menjadi guru pamong.”</p>
Aspek Proses	
2. Kompetensi Peserta	<p>Kemampuan mengajar :</p> <p>“Jadi pas peserta mengajar di kelas, saya beberapa kali ikut mendampingi dan sudah cukup baik dalam proses kegiatan belajar-mengajar di kelas tapi dari sisi kemampuan penguasaan IT masih kurang.”</p> <p>untuk kemampuan personal :</p> <p>“menurut saya cukup baik, dalam bergaul dengan guru maupun dengan siswa, sudah bisa melakukan Tanya jawab.”</p>
3. Waktu Pelaksanaan Program	<p>“ya lebih baik lagi kalau pas di awal jadi saya lebih enak mengaturnya, kan kalo di awal semester kita buat beban tugas untuk masing-masing guru, nah kalau ke-2 peserta ini bisa datang di awal semester nanti kami bisa memberikan beban tugas untuk mengajar seperti guru-guru yang lain jadi bisa lebih enak.”</p> <p>“ iya..paling tidak bulan juli..”</p>
Aspek Product	
4. Hasil yang dicapai	<p>“kita berikan tugas ke peserta untuk membenahan system pemasaran baik koperasi maupun lab. Pemasaran,trus ikut terlibat</p>

	<p>dalam proses KBM pemasaran.” “kemudian untuk program keahlian Pemasaran kan ada koperasi nah mereka kita minta untuk merekap hasil penjualan koperasi.” “untuk yang dari akuntansi kami minta masuk ke kelas untuk mengajar (KBM), membantu proses transaksi di bank mini</p>
--	--



**LEMBAR PENILAIAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DI KELAS**

NAMA MAHASISWA :

NIM :

PRODI / BKK :

KOMPETENSI DASAR :

SATUAN PENDIDIKAN :

Penskoran : 0-40=Gagal, 41-59=Kurang, 60-69=Cukup, 70-79=Baik, 80-100=Sangat Baik

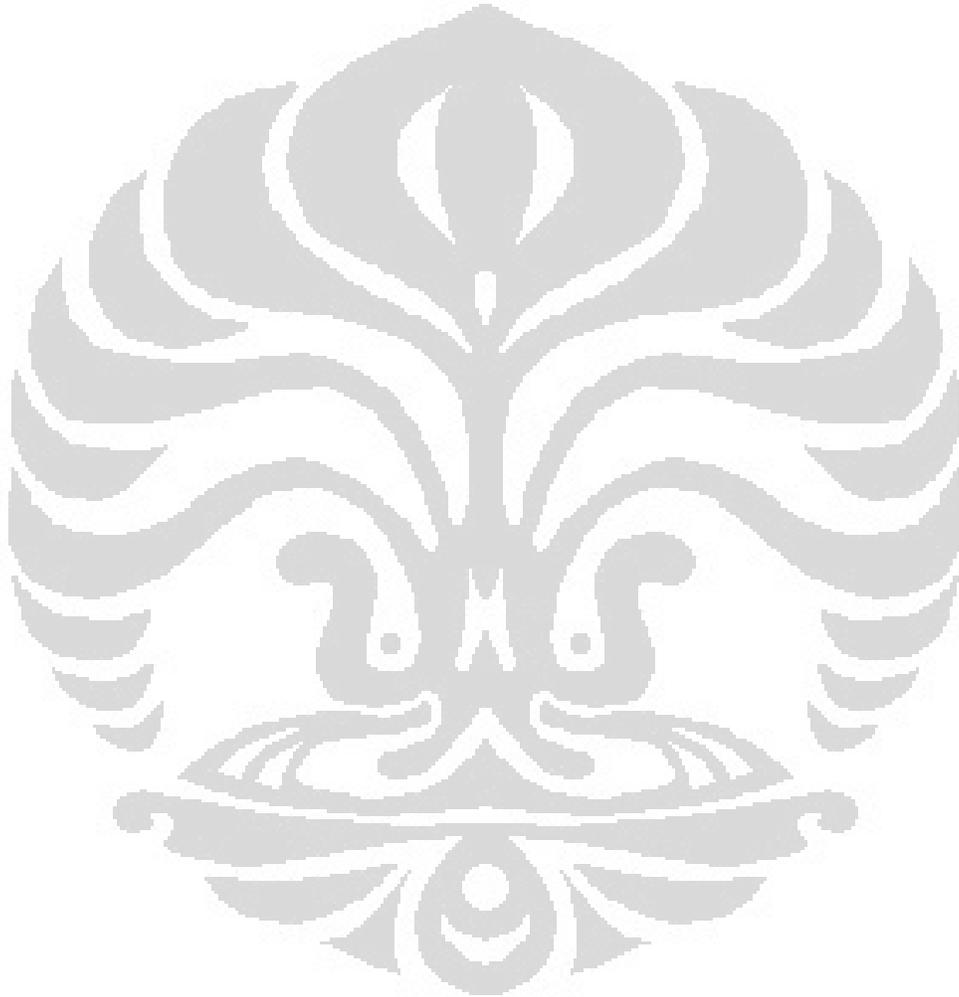
NO	KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN	SKOR 0 – 100
A.	Perumusan tujuan pembelajaran	
1.	Kejelasan perumusan	
2.	Kelengkapan cakupan perumusan	
3.	Kesesuaian dengan kompetensi dasar	
B.	Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar	
1.	Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran	
2.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik	
3.	Keruntutan dan sistematika materi	
4.	Kesesuaian materi dengan alokasi waktu	
C.	Pemilihan sumber belajar / media pembelajaran	
1.	Kesesuaian sumber belajar/ media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran	
2.	Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan materi pembelajaran	
3.	Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik	
D.	Skenario / kegiatan pembelajaran	
1.	Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran	
2.	Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan materi pembelajaran	
3.	Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik	
4.	Kelengkapan langkah-langkah dalam setiap tahapan pembelajaran dan kesesuaian dengan alokasi waktu	
E.	Penilaian hasil belajar	
1.	Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran	
2.	Kejelasan prosedur penilaian	
3.	Kelengkapan instrumen	
	Skor Total	

Surakarta,

$\frac{\text{Nilai} = \text{Skor Total}}{17} = \dots\dots\dots$

Guru Pamong / Dosen Pembimbing

NIP



PANDUAN APLIKASI *ON-LINE*
PROGRAM PENDAMPINGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN

I. PENDAHULUAN

A. TENTANG CMS DAN BLOG

Content Management System (CMS), adalah sebuah aplikasi berbasis web(web based application) yang memungkinkan setiap orang membuat dan mengembangkan sebuah situs dinamis, tanpa perlu memahami bahasa pemrograman. Atau, secara sederhana, CMS adalah aplikasi membuat web dinamis secara mudah. Sedangkan blog adalah sebuah web, biasanya dimiliki perseorangan, berisi catatan personal yang bisa diakses secara online. Sejarah blog bisa dilihat di <http://en.wikipedia.org/wiki/Blog>.

Dalam perkembangannya, blog menjadi sebuah gerakan citizen journalism dan lebih dari sekedar catatan harian pribadi belaka. Banyak toko online yang dikembangkan menggunakan blog.

Untuk membuat blog, diperlukan sebuah CMS. Salah satunya adalah Wordpress.

B. TENTANG WORDPRESS

Wordpress adalah salah satu jenis CMS yang paling populer di samping Blogspot atau Blogger.com, Multiply dan Joomla. Wordpress merupakan aplikasi open source yang dikembangkan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Kelebihan Wordpress dibanding dengan CMS lainnya:

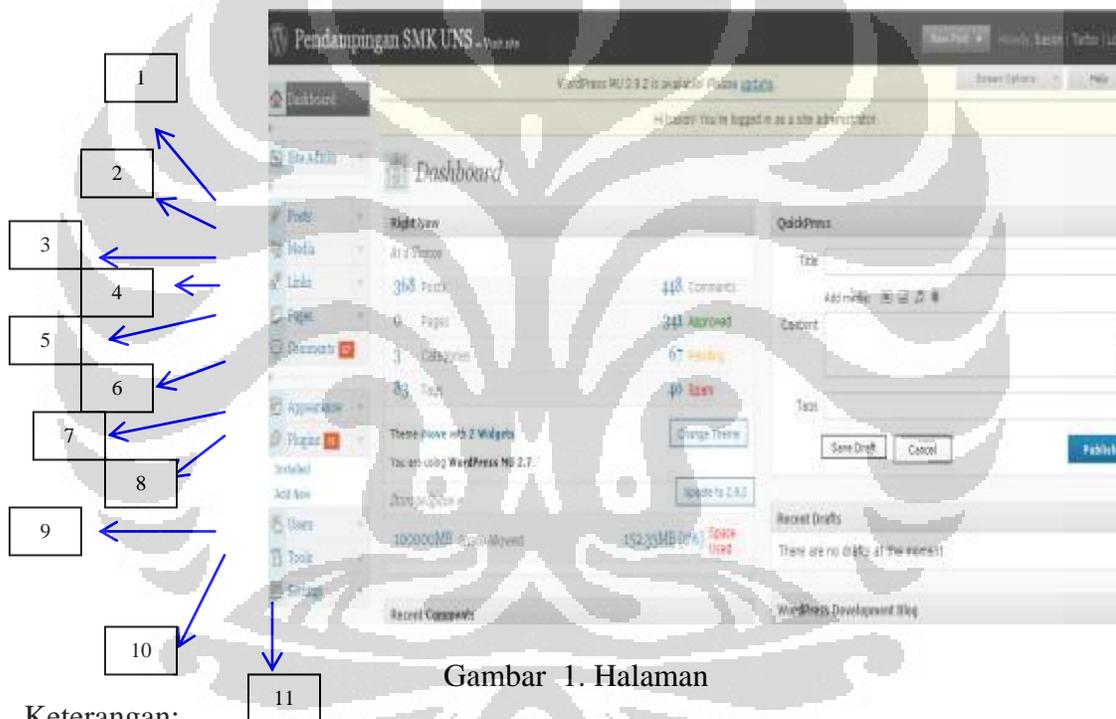
1. Mudah di-install.
2. Gratis.
3. Tersedia banyak desain gratis.
4. Support dan dokumentasinya lengkap.

Sedangkan kekurangan Wordpress adalah Harus diisi secara online.

II MENGEMBANGKAN BLOG BERBASIS WORDPRESS

Untuk melakukan pengelolaan blog/website, jalankan langkah-langkah berikut ini:

- a. Login, dengan membuka browser dan menyetikkan alamat <http://xxxxx.fkip.uns.ac.id/wp-admin> jika Anda membuatnya di
- b. Masukkan username (Nama pengguna) dan password (Kata Sandi), klik Masuk Log. Berikan tanda centang di bagian Ingat Saya apabila username dan password ingin tersimpan di komputer yang digunakan.
- c. Akan muncul halaman dashboard.

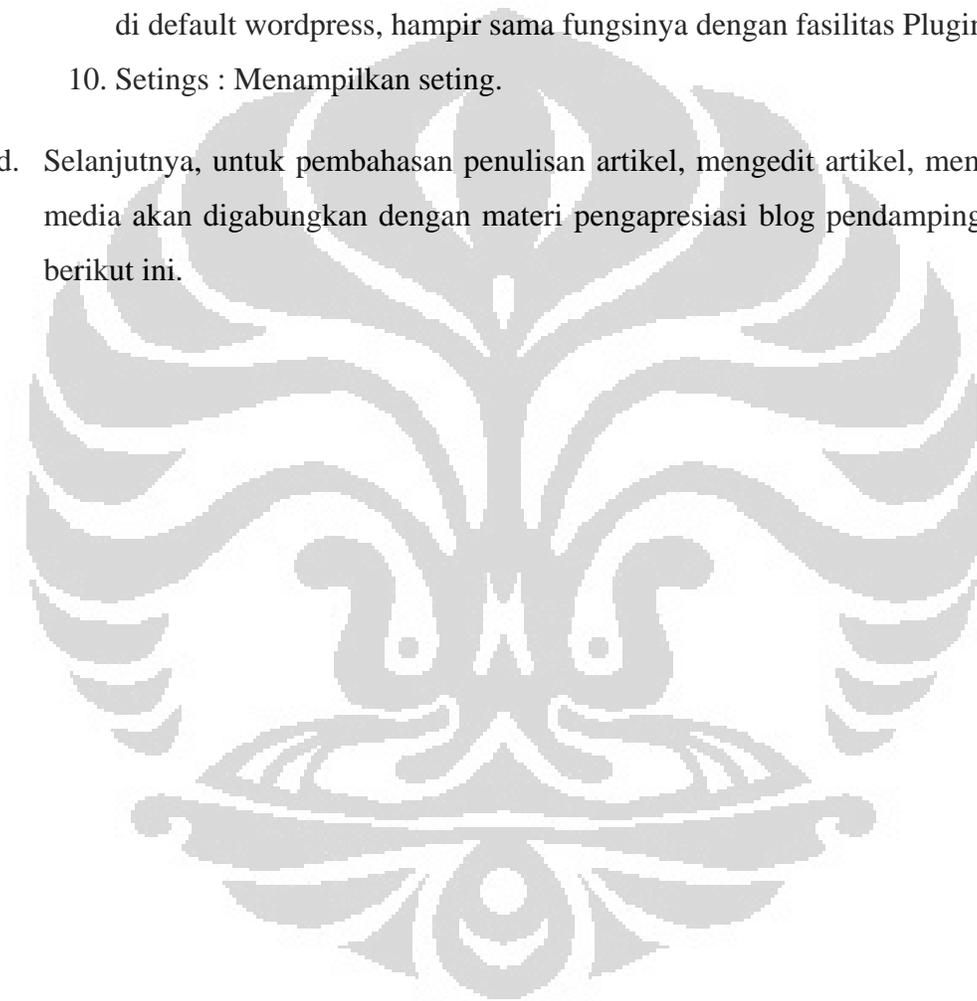


Gambar 1. Halaman

Keterangan:

1. Post : Digunakan untuk membuat dan mengedit tulisan atau artikel yang akan tampil di website Pendidikan SMK .
2. Media : Digunakan untuk management upload, baik gambar, audio, video, dan juga file.
3. Links: Digunakan untuk menghubungkan menu dengan alamat URL lain
4. Pages: Digunakan untuk memberikan tampilan halaman dalam web

5. Comments : Digunakan untuk melihat komentar pada tulisan atau artikel anda.
 6. Appearance: Digunakan untuk memodifikasi tema dan widget
 7. Plugins: Digunakan untuk memasukkan beberapa aplikasi yang tidak tersedia di default wordpress
 8. Users: Digunakan untuk melihat peserta yang bergabung dengan web.
 9. Tools: Digunakan untuk memasukkan beberapa aplikasi yang tidak tersedia di default wordpress, hampir sama fungsinya dengan fasilitas Plugins
 10. Setings : Menampilkan seting.
- d. Selanjutnya, untuk pembahasan penulisan artikel, mengedit artikel, memasukkan media akan digabungkan dengan materi pengapresiasi blog pendampingan SMK berikut ini.



III MENGAPRESIASI BLOG PENDAMPINGAN SMK

Pada bagian ini, akan ditampilkan beberapa cara mengapresiasi website pendampingan SMK. Apresiasi yang akan dibahas terutama bagaimana cara menuliskan artikel di dalam website ini. Sebagai contoh aplikasi akan digunakan website dengan alamat URL <http://1103.pendampingansmk.fkip.uns.ac.id>.

A. LOGIN KE ACCOUNT

Untuk dapat membuat artikel atau tulisan di website Pendampingan SMK UNS, maka anda harus mempunyai account. Sebelum mencoba untuk login ke website Pendampingan SMK UNS, pastikan user telah mempunyai account di website Pendampingan SMK UNS. Di tutorial ini tidak akan membahas masalah pembuatan account.

Cara untuk login ke halaman Dashboard account, silahkan ikuti langkah – langkah berikut ini :

- a. Buka browser, kemudian masukkan alamat url login website Pendampingan SMK UNS (<http://1103.pendampingansmk.fkip.uns.ac.id/wp-admin>) pada adress bar. Akan muncul halaman login.



Gambar 2. Halaman login

- b. Masukkan username dan password anda kemudian klik **Log In**

- c. Apabila anda lupa Pasword anda Klik *Lost your password?* Maka akan muncul halaman konfirmasi username atau e-mail.



Gambar 3. Get New Password

- d. Setelah muncul halaman diatas, silahkan masukkan Username atau email yang digunakan untuk membuat account. Kemudian Klik *Get New Password*
- e. Apabila berhasil login, maka akan muncul halaman Dashboard website Pendampingan SMK UNS.

B. PENGENALAN HALAMAN DASHBOARD

Halaman Dashboard adalah suatu halaman yang digunakan untuk manage tampilan suatu website. Karena akun sebagai contributor dalam website Pendampingan SMK UNS ini, maka hanya akan mendapatkan beberapa Menu Dashboard seperti Post, Media, Comments, Profile, Tool, dan Setings.

Halaman Dashboard secara umum dapat digunakan untuk membuat tulisan yang akan tampil di website Pendampingan SMK UNS, Mengedit tulisan yang sudah anda buat, upload gambar, music, video, dan juga file.

Halaman Dashboard ini juga dapat digunakan untuk mengubah profile yaitu pengaturan Personal Option, Contact info yang terdiri dari email anda, dan penggantian password account anda. Yang paling penting dari halaman profile ini adalah penggantian Password account.



Gambar 4. Halaman

Halaman Dashboard terdiri dari beberapa bagian berikut :

1. Post : Digunakan untuk membuat dan mengedit tulisan atau artikel yang akan tampil di website Pendampingan SMK UNS.
2. Media : Digunakan untuk management upload, baik gambar, audio, video, dan juga file.
3. Comments : Digunakan untuk melihat komentar pada tulisan atau artikel anda.

4. Profile : Digunakan untuk mengatur profile anda.
5. Tools : Melihat beberapa tool.
6. Setings : Menampilkan seting.
7. Quickpress : Digunakan untuk membuat tulisan secara cepat.
8. Tombol **Log Out** : untuk keluar dari halaman Dashboard.

C. MENULIS DAN MENGEDIT ARTIKEL

Untuk menulis sebuah artikel, harus login ke halaman Dashboard dengan account. User dapat menuliskan laporan mengenai kondisi dan berita tentang sekolah yang user dampingi. Artikel ini dapat dilihat secara langsung dan dapat digunakan sebagai laporan.

Untuk menulis artikel silahkan ikuti langkah – langkah berikut ini :

- a. Masuk halaman Dashboard dengan account anda.
- b. Setelah masuk halaman Dashboard Klik dropdown menu **Post** kemudian pilih **Add New**.
- c. Akan muncul halaman Add New Post.



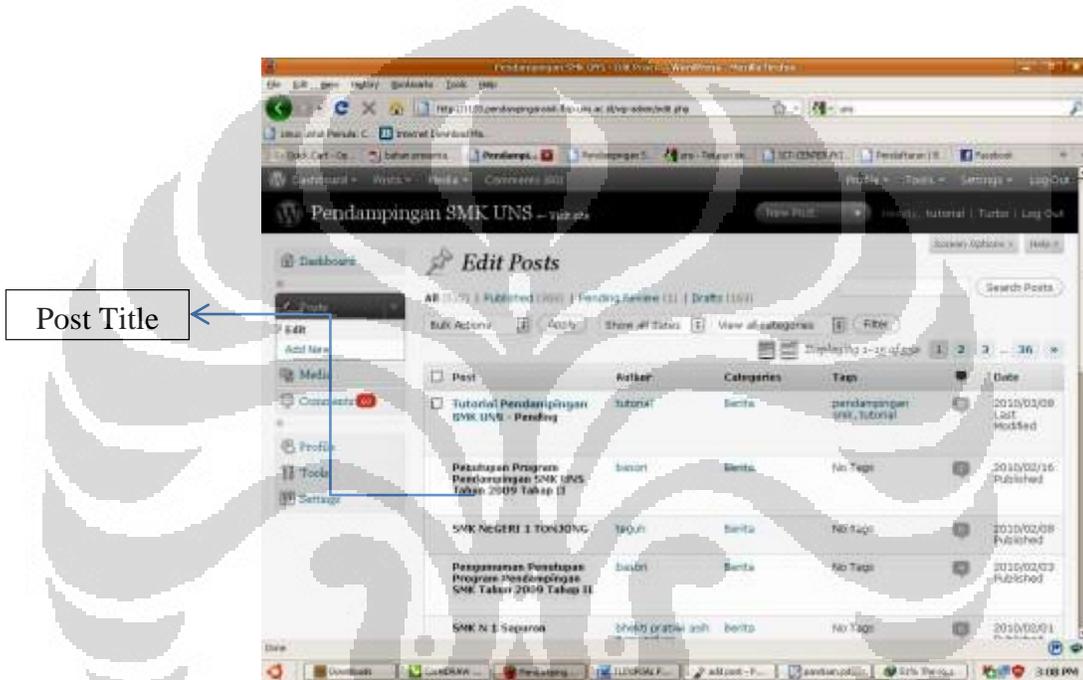
Gambar 5. Add New Post

- d. Ketikkan judul tulisan anda pada nomor 1.
- e. Ketikkan isi dari artikel atau tulisan anda pada form nomor 2.
- f. Kemudian tambahkan Tags (Kata kunci) pada nomor 4 kemudian Klik Add.

- g. Buatlah kategori tulisan anda pada nomor 5.
- h. Setelah semua selesai Klik **Submit for Review**

Untuk mengedit tulisan yang pernah dibuat, silahkan ikuti langkah-langkah berikut :

- a. Masuk ke halaman Dashboard anda dengan account.
- b. Setelah masuk halaman Dashboard Klik dropdown menu **Post** kemudian pilih **Edit** maka akan muncul halaman Edit Post



Gambar 6. Edit Post

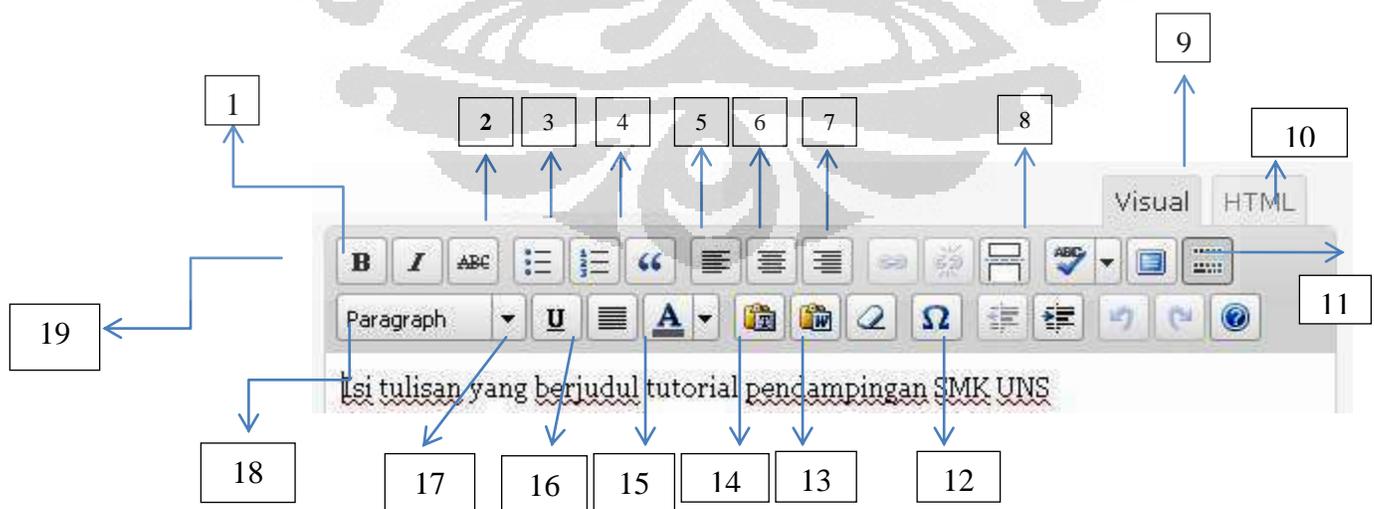
- c. Untuk mengedit tulisan yang pernah anda buat, Klik Judul Tulisan (**Post Title**)
- d. Setelah itu akan muncul halaman editing.
- e. Di halaman editing post anda dapat mengedit tulisan atau artikel yang pernah anda buat sebelumnya.



Gambar 7. Halaman Edit

Untuk mengedit tulisan yang pernah dibuat, pada prinsipnya sama ketika membuatnya. Tetapi disini akan dijelaskan beberapa fungsi toolbar yang berada di halaman Edit Post.

Berikut beberapa fungsi itu :



Gambar 8. Toolbar

Keterangan :

1. Digunakan untuk fungsi huruf cetak miring.
2. Digunakan untuk membuat Bullets.
3. Untuk membuat Numbering.
4. Untuk membuat huruf dengan variasi Quote.
5. Paragraf rata kiri.
6. Paragraf rata tengah.
7. Paragraf rata kanan.
8. Untuk membuat read more.
9. Untuk melihat tampilan sesungguhnya.
10. Untuk melihat tampilan HTML.
11. Untuk menampilkan toolbar yang tersembunyi.
12. Untuk menampilkan Simbol.
13. Untuk mengkopy artikel dari format Doc.
14. Untuk mengkopy artikel dari format Rtf.
15. Merubah warna huruf.
16. Paragraf rata kanan kiri.
17. Untuk membuat style underline.
18. Mengganti ukuran huruf.
19. Untuk membuat style Bold.

D. MEMASUKKAN MEDIA KE TULISAN

Untuk memasukkan media seperti Gambar, audio, video, dan file yang lain silahkan ikuti langkah – langkah berikut ini :

- a. Masuk ke halaman Edit Post (untuk editing) atau pada saat anda baru melakukan penulisan baru (Add New Post)
- b. Klik tool Media yang ada di bagian atas Toolbar.

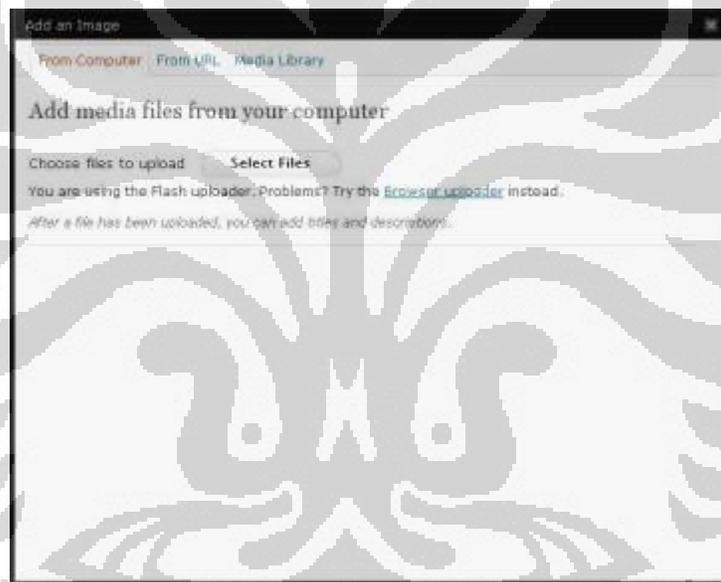


Gambar 9. Insert Media

Keterangan :

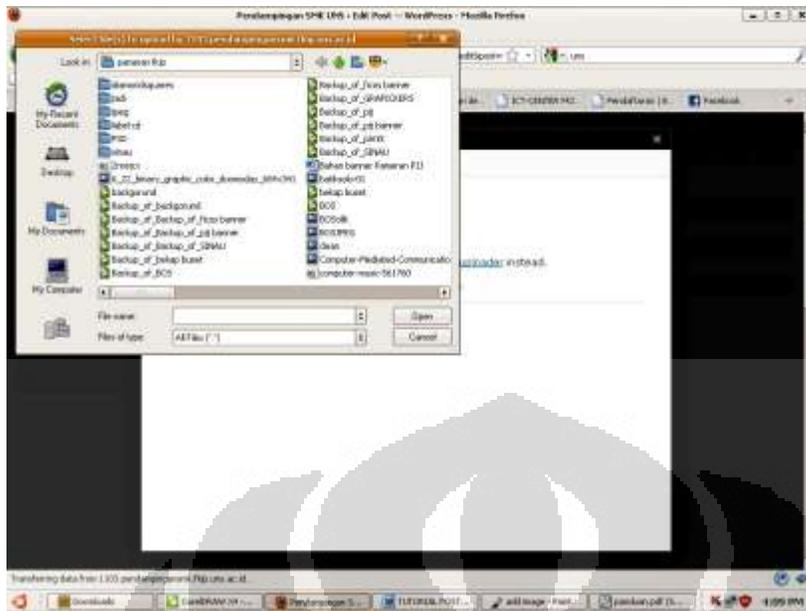
1. Insert Picture
 2. Insert Audio
 3. Insert Video
 4. Insert File : Doc, Xls, Pdf.
- c. Klik salah satu dari keempat pilihan tool media diatas sesuai dengan kebutuhan.
- d. Maka akan muncul halaman konfirmasi.

Berikut ini cara Menambahkan Gambar di dalam posting :



Gambar 10.
Add an Image

- a. Setelah muncul halaman di atas, silahkan Klik **Select Files**
- b. Maka akan muncul halaman pencarian gambar yang ada di computer.
- c. Pilih gambar kemudian Klik **Open**



Gambar 11.
Browse
Picture

a. Setelah gambar terupload maka akan muncul halaman berikut.

 **Upload New Media**

Choose files to upload

You are using the Flash uploader. Problems? Try the [Browser uploader](#) instead.

After a file has been uploaded, you can add titles and descriptions.

[Hide](#)

	ficos-des.jpg
	image/jpeg
	2010-03-08 16:54:21

Title *

Caption

Description

Gambar 12. Pengaturan Gambar

- b. Untuk mengatur gambar silahkan Isi Judul Gambar pada **Title**, dan masukkan text gambar pada **Caption**.
- c. Setelah semua selesai Klik **Save all changes**

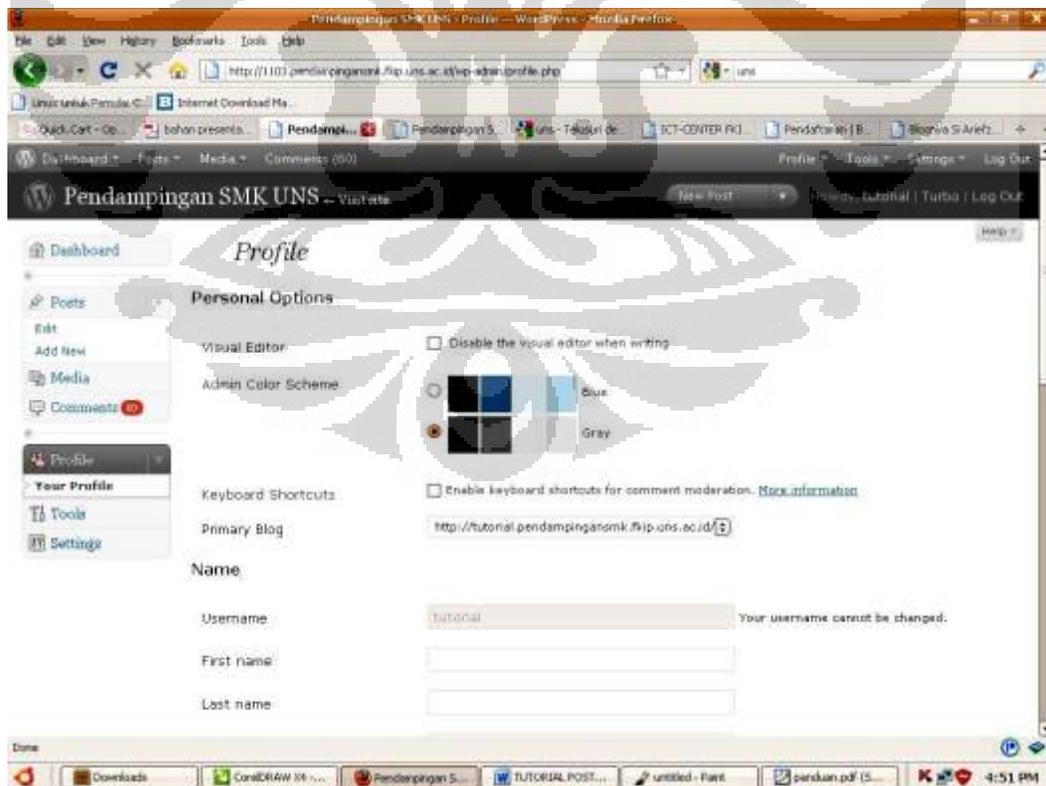
Untuk menambahkan file audio, video, dan file yang lain caranya sama. Untuk memanajemen file yang telah diupload silahkan Klik **Media** pada halaman Dashboard.

E. MELIHAT KOMENTAR

Untuk melihat siapa saja yang komentar dapat melihatnya dengan mengklik **Comments** pada halaman Dashboard.

F. MERUBAH PROFIL

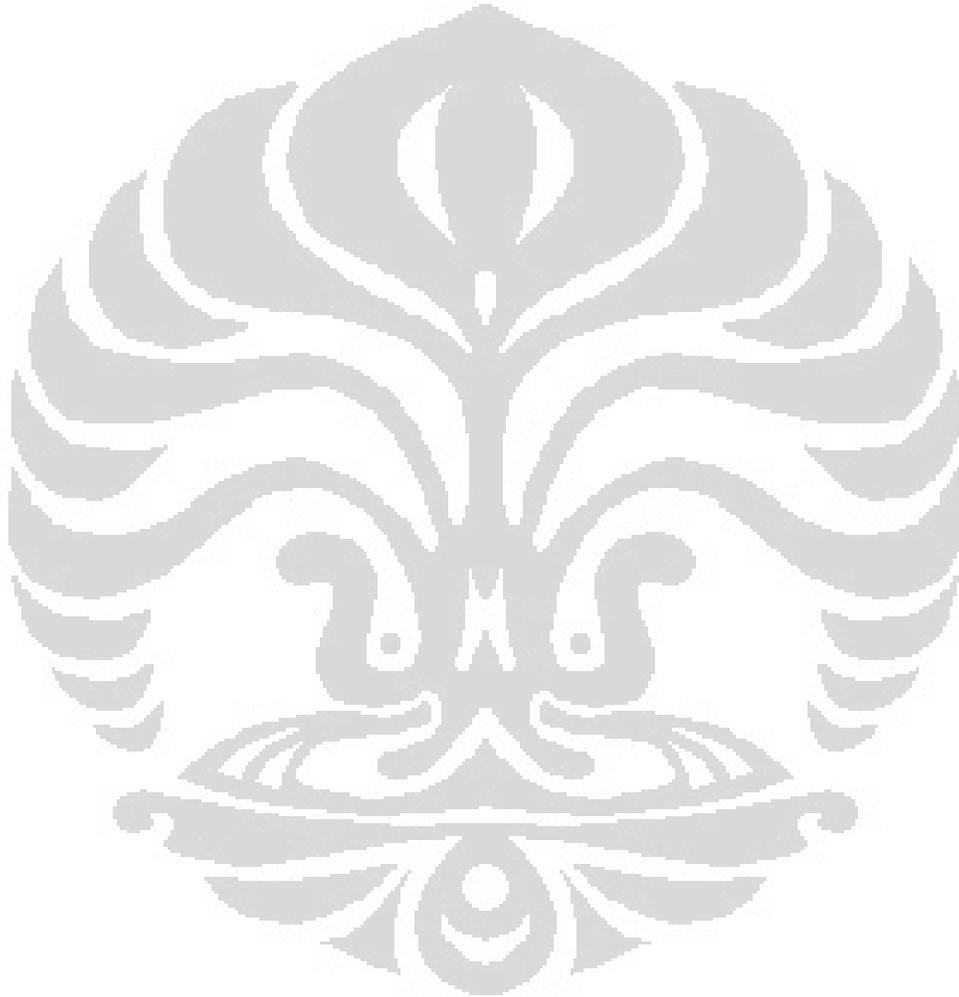
Profil user dapat dirubah sesuai dengan keinginan. Misalnya yaitu pengaturan Personal Option, Contact info yang terdiri dari email, dan penggantian password account. Yang paling penting dari halaman profile ini adalah penggantian Password account.

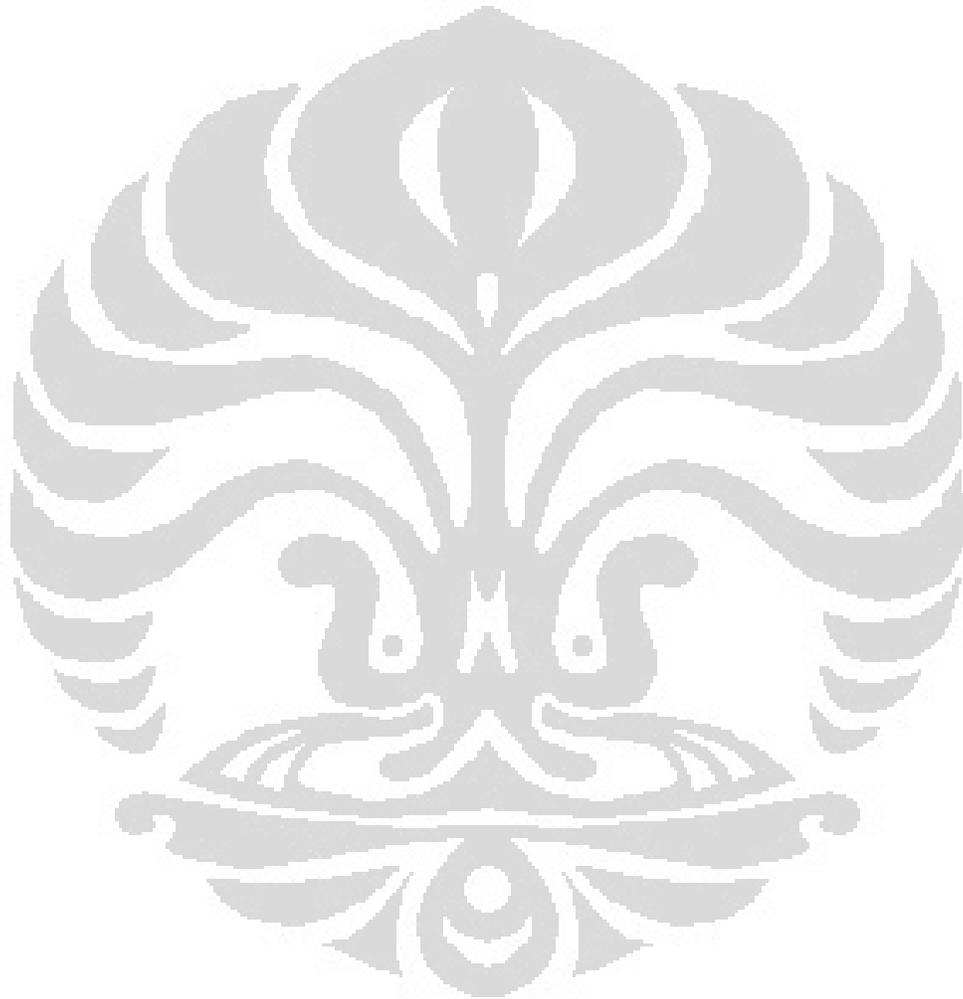


Gambar 13. Profile Seting

Untuk dapat mengubah Profil anda ikutilah langkah – langkah berikut ini :

- a. Buka halaman Dashboard
- b. Klik Menu Profile
- c. Kemudian isikan profil anda
- d. Setelah semua anda isi dan selesai jangan lupa untuk mengKlik ***Update Profile.***





Universitas Indonesia